



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LKPJ 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	3
1.3 DATA UMUM DAERAH	4
1. Kondisi Geografis Daerah	4
2. Jumlah Penduduk	7
3. Pertumbuhan Penduduk	8
4. Jumlah PNS	14
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	15
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	18
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	19
BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	66
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	66
3.2 SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH	72
A. URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR	109
1. Urusan Pendidikan; Urusan Kebudayaan (Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123
2. Urusan Kesehatan ; Dinas Kesehatan	112
3. Urusan Kesehatan; Rumah Sakit Suryah Khairuddin	147
4. Urusan Kesehatan ; Rumah Sakit KH. Daud Arif	151
5. Urusan Pekerjaan Umum; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157
6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	158

7.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Penanggulangan Bencana	174
8.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	177
9.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	187
B.	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR	196
	Urusan Sosial; Dinas Sosial	196
2.	Urusan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja	202
3.	Urusan Pemberdayaan Perempuan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	213
4.	Urusan Pangan; Dinas Ketahanan Pangan	232
5.	Urusan Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup	240
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	248
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	252
8.	Urusan Perhubungan; Dinas Perhubungan	258
9.	Urusan Komunikasi dan Informatika; Dinas Komunikasi dan Informatika	269
10.	Urusan Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Urusan Perdagangan (Urusan Pemerintahan Pilihan); Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	280
11.	Urusan Penanaman Modal; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	295
12.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga; Urusan Pariwisata (Urusan Pemerintahan Pilihan) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	302
13.	Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	311
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	320
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan; Dinas Perikanan	320
2.	Urusan Pertanian; Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	330
3.	Urusan Pertanian; Dinas Peternakan dan Perkebunan	335
D.	URUSAN PENUNJANG	345
1.	Urusan Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah	345
2.	Urusan Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD	358

E. URUSAN PENDUKUNG	365
1. Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	365
2. Urusan Keuangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah	373
3. Urusan Keuangan; Badan Pendapatan Daerah	381
4. Urusan Kepegawaian; Urusan Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	386
F. UNSUR PENGAWASAN	396
1. Urusan Pengawasan; Inspektorat	396
G. UNSUR KEWILAYAHAN	402
1. Kecamatan Bram Itam	402
2. Kecamatan Kuala Betara	406
3. Kecamatan Betara	413
4. Kecamatan Pengabuan	419
5. Kecamatan Senyerang	424
6. Kecamatan Seberang Kota	328
7. Kecamatan Tungkal Ilir	435
8. Kecamatan Merlung	442
9. Kecamatan Tungkal Ulu	448
10. Kecamatan Muara Papalik	457
11. Kecamatan Tebing Tinggi	463
12. Kecamatan Renah Mendaluh	470
13. Kecamatan Batang Asam	476
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	484
1. Urusan Pemerintahan Umum; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	484
3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	495
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	513
BAB IV	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	524
1. Dinas Tananman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat	524
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat	532
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	535

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5
Tabel 1.2.	Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian	6
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.	7
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.	8
Tabel 1.6.	Indikator Kependudukan Tanjung Jabung Barat	9
Tabel 1.7.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020-2024.	10
Tabel 1.8.	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020- 2024.	10
Tabel 1.9.	Statistik Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024.	11
Tabel 1.10.	Struktur Perekonomian (persen) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	13
Tabel 1.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	14
Tabel 1.12.	Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024	15
Tabel 1.13.	Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024	17

Tabel 1.14.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Tahun 2024	18
Tabel 1.15.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2024	19
Tabel 2.1.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024	21
Tabel 3.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per Januari 2024.	109
Tabel 3.2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	123
Tabel 3.3.	Urusan Kesehatan; Rumah Sakit Suryah Khairuddin Tahun Anggaran 2024.	147
Tabel 3.4.	Rumah Sakit KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	151
Tabel 3.5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	157
Tabel 3.6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	168
Tabel 3.7.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	174
Tabel 3.8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	177
Tabel 3.9.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	187
Tabel 3.10.	Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	196
Tabel 3.11.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	202
Tabel 3.12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	213

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.13.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	232
Tabel 3.14.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Barat Tahun Anggaran 2024.	240
Tabel 3.15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	248
Tabel 3.16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	252
Tabel 3.17.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	258
Tabel 3.18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	269
Tabel 3.19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	280
Tabel 3.20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	295
Tabel 3.21.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	302
Tabel 3.22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	311
Tabel 3.23.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	320
Tabel 3.24.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	330
Tabel 3.25.	Dinas Perternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	335
Tabel 3.26.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	345

Tabel 3.27.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	358
Tabel 3.28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	365
Tabel 3.29.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	373
Tabel 3.30.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	381
Tabel 3.31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	386
Tabel 3.32.	Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	396
Tabel 3.33.	Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	402
Tabel 3.34.	Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	406
Tabel 3.35.	Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	413
Tabel 3.36.	Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	419
Tabel 3.37.	Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	424
Tabel 3.38.	Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	428
Tabel 3.39.	Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	435
Tabel 3.40.	Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	442
Tabel 3.41.	Kecamatan Tungkal Ulu kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	448

Tabel 3.42.	Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	457
Tabel 3.43.	Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	463
Tabel 3.44.	Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	470
Tabel 3.45.	Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.	476
Tabel 3.46.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	484
Tabel 3.47.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.	495

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya juga disebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan amanat pasal 408 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” sehingga pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan mempedomani pasal 19 ayat (1) yang berbunyi Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan pertanggung jawaban tahun ke-4 (Empat) Kepala Daerah periode RPJMD 2021-2026. Hasil pembahasan laporan ini diterbitkan dalam bentuk rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan pasal 20 ayat (2) dimana rekomendasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menterin Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023);

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi adalah pandangan kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai dimasa mendatang agar kondisi dan kemampuan masyarakat dan pemerintah semakin meningkat dan maju sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Meningkatnya tantangan dan persaingan serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempersiapkan diri menghadapi segala macam perubahan dan tantangan yang datang dari dalam dan luar daerah sendiri dan berusaha melakukan perubahan baik pada struktur organisasi pemerintahan, sistem administrasi dan kebijakan pembangunan daerah kearah perbaikan dan peningkatan.

Perubahan tersebut disusun secara terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat berdasarkan kondisi umum yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini dan harapan dimasa mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, telah ditetapkan Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).**

Adapun deskripsi dari VISI tersebut diatas adalah:

1. BERKUALITAS:
Berarti sumber manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
2. EKONOMI MAJU:
Berarti meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. RELIGIUS:
Berarti berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
4. KOMPETITIF:
Berarti mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
5. AMAN:
Berarti suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

6. HARMONIS:

Berarti terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan memperhatikan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

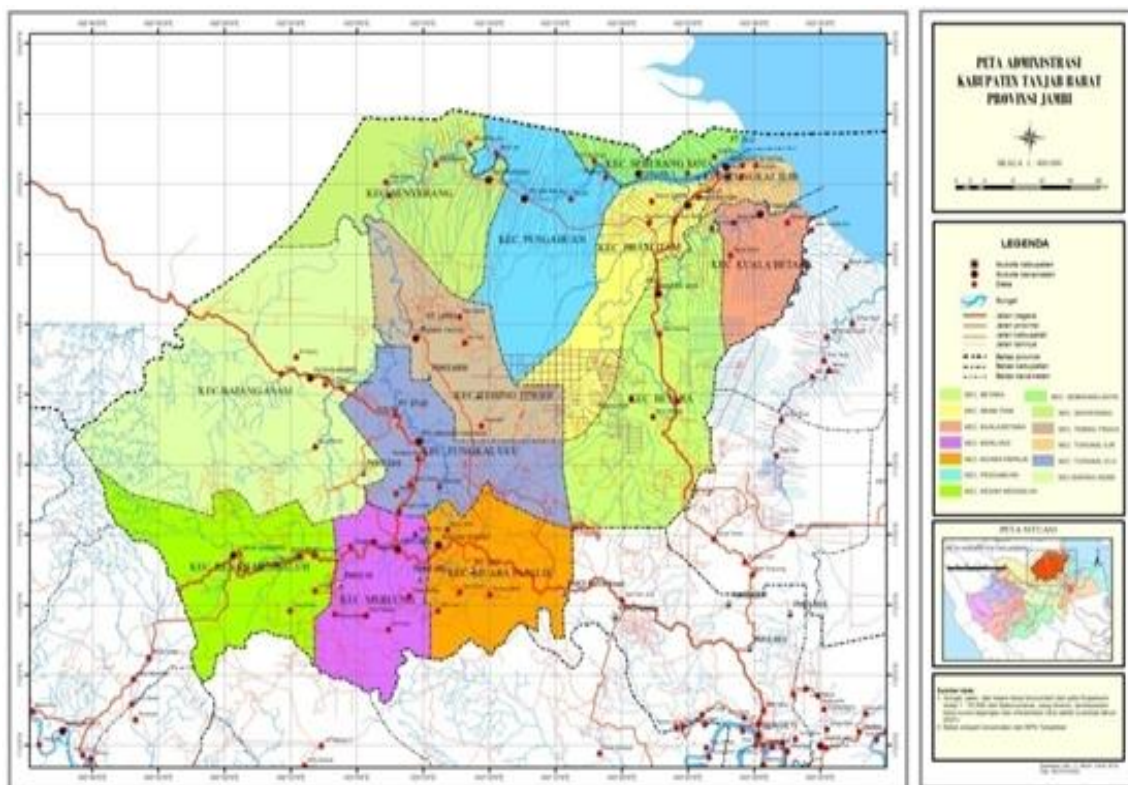
1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0°53' - 01°41' Lintang Selatan dan 103°23' - 104°21' Bujur Timur di bagian timur Provinsi Jambi. Dengan luas daerah daratan 5.009,82 km² dan luas lautan sebesar 365,34 km² sehingga luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan 5.375,16 km² (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024–2044). Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut China Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala
- c. Sebelah Selatan Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan Km ²	(%)
1.	Tungkal Ilir	8	2	222,09	4,13
2.	Seberang Kota	1	7	243,07	4,52
3.	Bram Itam	1	9	312,66	5,82
4.	Tungkal Ulu	1	9	345,69	6,43
5.	Tebing Tinggi	1	9	342,89	6,38
6.	Batang Asam	1	10	1.042,37	19,39
7.	Merlung	1	9	311,65	5,80
8.	Renah Mendaluh	1	9	473,72	8,81
9.	Muara Papalik	1	9	336,38	6,26
10.	Betara	1	11	570,21	10,61
11.	Kuala Betara	1	9	307,67	5,72
12.	Pengabuan	1	12	440,13	8,19
13.	Senyerang	1	9	426,63	7,94
JUMLAH		20	114	5.375,16	100,00

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl dibagian timur sampai pada ketinggian diatas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana dibagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0–25 meter diatas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surut air laut.

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kecamatan
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 25)	213.424,4	42,8	Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara.
Dataran sedang (25 – 500)	273.090,9	54,8	Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebagian Renah Mendaluh dan Muara Papalik.
Dataran Tinggi (>500)	11.910	2,4	Sebagian Batang Asam, Sebagian Renah Mendaluh
Jumlah	500.982	100	

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013)

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tipe Afa, yaitu tipe iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21°C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 3.307 mm pertahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin/perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah:

- 1) Kawasan Strategis Ekonomi adalah: Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
- 2) Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan

Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.

- 3) Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu:
 - a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya untuk merencanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembangunan di berbagai bidang dengan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi 2024. Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan, dari tahun 2023 sebanyak 331.058 jiwa menjadi 336.978 jiwa di tahun 2024.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
		2024	2024
1	Tungkal Ulu	15.326	4,55
2	Merlung	16.720	4,96
3	Batang Asam	36.562	10,85
4	Tebing Tinggi	37.036	10,99
5	Renah Mendaluh	17.269	5,12
6	Muara Papalik	11.811	3,50
7	Pengabuan	26.577	7,89
8	Senyerang	25.664	7,62
9	Tungkal Ilir	75.586	22,43
10	Bram Itam	19.669	5,84
11	Seberang Kota	9.205	2,73
12	Betara	32.434	9,62
13	Kuala Betara	14.119	4,19
Jumlah		336.978	1,00

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025.

Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 -59 tahun dengan persentase 66%, sisanya 34% merupakan penduduk tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun, pada tahun 2024 jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya sebesar 65%. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk

usia produktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk/Population		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12.436	11.525	23.961
5-9	15.872	14.874	30.746
10-14	16.342	15.285	31.627
15-19	14.297	13.789	28.086
20-24	15.405	14.386	29.791
25-29	13.841	12.865	26.706
30-34	12.646	12.262	24.908
35-39	13.504	13.301	26.805
40-44	14.248	13.469	27.717
45-49	12.488	11.629	24.117
50-54	10.632	9.581	20.213
55-59	7.973	7.298	15.271
60-64	5.874	5.239	11.113
65-69	3.784	3.384	7.168
70-74	2.312	2.176	4.488
75+	2.034	2.227	4.261
Jumlah	173.688	163.290	336.978

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

3. Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk. Namun Pada laporan ini tidak menggunakan metoda perhitungan data asumsi sebagaimana yang digunakan oleh BPS, angka pada laporan ini merupakan angka real yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 , yang mana tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat sebanyak 331.058 jiwa, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 336.978 jiwa. Selama kurun waktu 2020-2024 terjadi pertumbuhan penduduk rata rata pertahun sebesar 1,28%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,27%, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk sebesar 1,39% meningkat menjadi 1,66 pada tahun 2024. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2024, maka kepadatan penduduk 67,26 per Km². Sex ratio tahun 2024 tercatat sebesar 106,36 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki-laki. Untuk

melihat jumlah dan perkembangan penduduk Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6.
Indikator Kependudukan Tanjung Jabung Barat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	317.498	320.606	326.530	331.058	336.978
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,37	0,98	1,01	1,39	1,66
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	63	64	65,18	66,08	67,26
Sex Ratio (L/P)	106,7	106,56	106,46	106,33	106,36

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, metodologi penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sejak 2014 sampai dengan sekarang IPM menggunakan metode terbaru dalam pengukurannya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri Indeks Pembangunan Manusia mengalami tren meningkat yakni dari tahun 2020 sebesar 69,62 hingga pada tahun 2024 sebesar 72,01. Dari tabel dibawah terlihat bahwa dari tahun ke tahun rata – rata nilai IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan/pertambahan tiap tahunnya, dan pada tahun 2024 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dipengaruhi beberapa factor diantaranya terjadi peningkatan usia harapan hidup, peningkatan Rata-rata lama sekolah dan meningkatnya pengeluaran perkapita. Keseluruhan nilai IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020-2024

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2020	69,62
2021	70,26
2022	70,88
2023	71,44
2024	72,01

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel. 1.8.
Perkembangan Indeks Gini Ratio
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2024

TAHUN	INDEKS GINI RATIO
2020	0,281
2021	0,249
2022	0,262
2023	0,316
2024	0,292

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka Gini Ratio pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,281, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,249. Kemudian pada tahun 2022 gini ratio meningkat kembali sebesar 0,262 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,316. Untuk tahun 2024 angka gini ratio mengalami penurunan sebesar 0,292.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peleuang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan selain itu terjadinya.

Tabel 1.9
Statistik Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp.)	396.113	409.631	453.956	499.318	575.337
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	34.79	36,10	33,95	33,61	33,12
Penduduk Miskin (%)	10,29	10,75	10,00	9,79	9,54

Sumber: *Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025*

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, terlebih dahulu menentukan Garis Kemiskinan yang mencerminkan besaran (dalam rupiah) pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti makan dan minum (makanan), dan lainnya (non makanan) dalam periode waktu sebulan. Pada tabel 1.9. dapat dilihat tren garis kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Selama periode tahun 2020-2024 nilai garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kenaikan. Garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 396,113,- per kapita per bulan naik pada tahun 2024 menjadi Rp. 575.337,- per kapita per bulan. Artinya pada tahun 2024, penduduk yang nilai pengeluaran dibawah garis kemiskinan (Rp. 575.337,- per kapita per bulan) maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Selama periode tahun 2020-2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebanyak 34.790 jiwa turun setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 menjadi 33.120 jiwa.

Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebesar 10,29 % turun menjadi 9,54% pada tahun 2024. Persentase kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 tersebut adalah terbesar ketiga dibandingkan dengan persentase pendudukan miskin kabupaten/kota yang lain di Provinsi Jambi diantaranya Kota Jambi yaitu sebesar 47,25% dan Kabupaten Merangin sebesar 33,12%. Dengan persentase kemiskinan sebesar 9,54% pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimis untuk dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Target sebesar 7,41% pada akhir periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Mempedomani instruksi Presiden Rebulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan strategi kebijakan yang meliputi :

- (a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,
- (b) Peningkatan Pendapatan masyarakat,
- (c) Penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah kantong – kantong kemiskinan.

Melalui pelaksanaan program – program OPD seperti program perlindungan dan jaminan sosial, pengelolaan perikanan tangkap, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, kawasan permukiman, dan lainnya yang kegiatannya berupa pemberian bantuan sarana prasarana untuk kelompok masyarakat miskin, pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pemberian bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai, bantuan rehabilitasi rumah untuk masyarakat kurang mampu, hingga pendataan masyarakat miskin, yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, dan terus dilaksanakan hingga mencapai target angka kemiskinan.

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (*riil*) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan adanya Perubahan Tahun Dasar PDB Indonesia dari Tahun 2000 ke Tahun 2010, yang seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) berakibat terjadi perubahan terhadap struktur ekonomi, yakni menjadi sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Kontruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa Lainnya

Struktur perekonomian merupakan komposisi peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam perekonomian suatu daerah. Peranan masing-masing kategori lapangan usaha dapat dilihat dari besarnya kontribusi kategori tersebut terhadap PDRB daerah. Tahun 2024 peranan terbesar dipegang oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 34,57% kemudian diikuti Peranan dari kategori Pertambangan dan Penggalian masih cukup besar yaitu 25,92%. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar memiliki struktur fisik wilayah agraris dan pesisir yang potensial, mendorong petani, nelayan, atau masyarakat untuk berusaha terutama di sekitar bidang pertanian dan perikanan. Peningkatan hasil produksi dan harga pada sector pertanian seperti kelapa sawit, pinang dan kelapa dalam semakin meningkat, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang permintaannya semakin meningkat. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan mengakibatkan meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2024. Kategori lapangan usaha lainnya yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 17,54%. Sementara peranan kategori lainnya terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah enam persen. Meskipun demikian, kategori-kategori tersebut memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan. Adapun struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.10. berikut ini:

Tabel 1.10.
Struktur Perekonomian (persen)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i>	30,28	31,09	29,76	33,13	34,57
<i>Pertambangan dan Penggalian</i>	27,02	29,35	32,90	26,38	25,92
<i>Industri Pengolahan</i>	19,60	17,44	17,19	18,50	17,54
<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
<i>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</i>	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07
<i>Konstruksi</i>	5,46	5,42	4,73	5,20	5,22
<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</i>	4,51	4,50	4,31	4,92	4,89
<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	0,89	0,86	0,87	0,96	0,94
<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	0,55	0,51	0,48	0,52	0,53
<i>Informasi dan Komunikasi</i>	2,57	2,36	2,14	2,25	2,16
<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	1,25	1,22	1,09	1,12	1,08
<i>Real Estat</i>	0,88	0,82	0,76	0,79	0,77
<i>Jasa Perusahaan</i>	1,34	1,26	1,32	1,56	1,61
<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	2,11	1,88	1,56	1,60	1,69
<i>Jasa Pendidikan</i>	2,25	2,04	1,80	1,86	0,85
<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	0,61	0,64	0,52	0,56	0,58
<i>Jasa lainnya</i>	0,58	0,52	0,49	0,55	0,56
Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 meningkat mencapai 4,45 %. Berdasarkan Tabel 1.11 terlihat bahwa beberapa kategori lapangan usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,60%, kemudian diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 11,72% serta kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,01%.

Tabel 1.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,91	4,51	5,19	6,39	3,62
Pertambangan dan Penggalian	-1,22	-0,56	-0,12	-0,47	3,11
Industri Pengolahan	0,89	-2,41	4,57	5,29	5,38
Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	17	19,91	16,12	11,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21	4,21	2,84	1,03	2,11
Konstruksi	-0,06	9,05	-0,74	8,18	8,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,30	6,74	5,04	9,25	4,91
Transportasi dan Pergudangan	-4,95	8,60	13,31	5,42	6,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,13	4,87	11,39	8,30	9,56
Informasi dan Komunikasi	7,82	3,64	8,04	7,22	4,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,83	5,32	-0,63	1,32	2,43
Real Estat	-0,30	4,41	3,72	3,57	5,79
Jasa Perusahaan	-5,79	4,02	12,85	13,72	9,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,79	2,17	-0,87	2,90	11,72
Jasa Pendidikan	3,01	1,33	2,46	2,49	8,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	15,42	-3,02	4,20	13,60
Jasa lainnya	-4,27	1,64	6,63	7,76	7,29
Domestik Regional Bruto	-0,29	1,36	2,56	3,50	4,45

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

4. Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 sebanyak 3.266 orang yang terdiri dari 1.454 laki-laki dan 1.812 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, 69,01 persen PNS merupakan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana/Doktor/PHD. Dilihat dari jenis kelamin, PNS dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat kebawah didominasi oleh laki-laki. Sedangkan PNS dengan tingkat pendidikan Diploma/Sarjana muda didominasi oleh perempuan.

Tabel 1.12.
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	2	0	2
2	SMP/Sederajat	7	1	8
3	SMA/Sederajat	270	124	394
4	Diploma I, II/Akta I, II	52	37	89
5	Diploma III, IV/Akta III, IV	127	392	519
6	Tingkat Sarjana/Pasca Sarjana/Doktor	996	1.256	2.254
Jumlah		1.454	1.812	3.266

Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2025

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan disuatu daerah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mempunyai ketergantungan pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Peranan Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dalam pembiayaan daerah bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan peran Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Pemerintah Pusat mencapai titik keseimbangan. Meskipun begitu, secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun 2024 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang baik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi didalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dilakukan melalui:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu dengan cara:
 - i. Melakukan pendataan terhadap Subjek dan Objek Pajak Daerah;
 - ii. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
 - iii. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Penerimaan Daerah;
 - iv. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib retribusi melalui sosialisasi.
- c. Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

2) Dana Perimbangan

Penetapan pagu dana perimbangan ditetapkan berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan koordinasi secara kontinyu dengan pemerintah pusat agar ada peningkatan penerimaan setiap tahunnya, yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan dari Bagi Hasil pajak provinsi disesuaikan dengan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah.
- b. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dana transfer bagi hasil pajak.
- c. PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- d. Dana Desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 104/2021.
- e. Dana Hibah.

Tabel 1.13.
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	118.692.650.003,00	138.124.227.221,59	116,37
	Pajak Daerah	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	93,61
	- Pajak Hotel	428.500.000,00	591.976.652,00	138,15
	- Pajak Restoran	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	71,22
	- Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.629.600,00	104,20
	- Pajak Reklame	514.000.000,00	420.474.858,00	81,80
	- Pajak Penerangan Jalan	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	106,07
	- Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	220,02
	- Pajak Air Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	153,71
	- Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	114,34
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	98,28
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	84,40
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	74,39
	Retribusi Daerah	1.938.500.000,00	2.955.587.944,64	152,47
	- Retribusi Jasa Umum	311.500.000,00	257.500.000,00	82,66
	- Retribusi Jasa Usaha	927.000.000,00	1.132.012.000,00	122,12
	- Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	1.566.075.944,64	223,73
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	92,30
	- BUMD(Deviden)	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	92,30
	Lain-lain PAD yang Sah	67.395.936.734,00	89.141.671.002,58	132,27
	- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	166.000.000,00	183.652.650,00	110,63
	- Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	168,73
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000	1,09
	- Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	378,90
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	31.350.000,00	58.746.436,00	187,39
	- Pendapatan Dari Pengembalian	817.200.500,00	7.701.046.322,09	942,37
	- Pendapatan BLUD	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	104,70
2	Pendapatan Transfer	1.924.609.610.848,00	1.871.370.786.390,00	97,23
	Transfer Pemerintah Pusat	1.834.391.787.000,00	1.801.661.723.106,00	98,22
	- Dana Perimbangan	1.713.851.127.000,00	1.681.121.063.106,00	98,09
	- Insentif Fiskal	23.045.267.000,00	20.084.947.000,00	87,15
	- Dana Desa	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	103,04
	Transfer Antar Daerah	90.217.823.848,00	69.709.063.284,00	77,27
	- Pendapatan Bagi Hasil	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	85,39
	- Bantuan Keuangan	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	33,24
	JUMLAH	2.043.302.260.851,00	2.009.495.013.611,59	98,35

Sumber: BKAD Tanjab Barat, 2024

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.14.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	BELANJA OPERASI	1.159.955.397.895,00	1.050.208.712.129,03	90,54
	Belanja Pegawai	575.227.519.626,00	525.372.910.474,50	91,33
	Belanja Barang dan Jasa	521.152.602.429,00	463.971.082.740,63	89,03
	Belanja Subsidi	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	100,00
	Belanja Hibah	54.556.282.840,00	51.945.725.913,90	95,21
	Belanja Bantuan Sosial	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	97,85
2	BELANJA MODAL	771.197.360.700,00	762.157.755.699,88	98,83
	Tanah	725.000.000,00	0,00	0,00
	Peralatan dan mesin	69.909.763.597,00	68.236.477.554,19	97,61
	Gedung dan Bangunan	195.073.720.735,00	193.391.738.964,18	99,14
	Jalan, irigasi dan jaringan	496.114.936.705,00	491.162.017.186,36	99,00
	Aset Tetap lainnya	9.174.939.663,00	9.169.531.295,15	99,94
	Aset Lainnya	199.000.000,00	197.990.700,00	99,49
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.204.693.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	0,00	0,00
4	BELANJA TRANSFER	263.907.078.513,00	255.927.078.513,00	96,98
	Belanja Bagi Hasil	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	260.320.792.100,00	252.340.792.100,00	96,93
	JUMLAH	2.204.264.530.108,00	2.068.293.546.341,91	93,83

Sumber: BKAD Tanjab Barat, 2024

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD
 - c. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
 - d. Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - e. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
 - f. Dana Alokasi Umum
 - g. Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah.
 - a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Tabel 1.15.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	100,01
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	100,01
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	-
3	PEMBIAYAAN NETO	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	100,01
	JUMLAH	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	100,01

Sumber: BKAD Tanjab Barat, 2024

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam Bab ini dijelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tergambar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja. Berikut adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, yaitu:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	2.043.302.260.851,00	2.009.495.013.611,59	-33.807.247.239,41	98,35
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.692.650.003,00	138.124.227.221,59	19.431.577.218,59	116,37
4.1.01	Pajak Daerah	35.862.884.126,00	33.570.220.578,00	-2.292.663.548,00	93,61
4.1.01.06	Pajak Hotel	428.500.000,00	591.976.652,00	163.476.652,00	138,15
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000,00	574.836.652,00	174.836.652,00	143,71
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000,00	574.836.652,00	174.836.652,00	143,71
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	28.500.000,00	17.140.000,00	-11.360.000,00	60,14
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	28.500.000,00	17.140.000,00	-11.360.000,00	60,14
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.712.000.000,00	3.355.747.586,00	-1.356.252.414,00	71,22
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.642.000.000,00	2.027.857.519,00	-1.614.142.481,00	55,68
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.642.000.000,00	2.027.857.519,00	-1.614.142.481,00	55,68
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.070.000.000,00	1.327.890.067,00	257.890.067,00	124,10
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.070.000.000,00	1.327.890.067,00	257.890.067,00	124,10
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.629.600,00	629.600,00	104,20
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	8.000.000,00	11.720.000,00	3.720.000,00	146,50
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	8.000.000,00	11.720.000,00	3.720.000,00	146,50
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	2.419.600,00	-2.580.400,00	48,39
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	2.419.600,00	-2.580.400,00	48,39
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00	1.490.000,00	-510.000,00	74,50
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00	1.490.000,00	-510.000,00	74,50

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.1.01.09	Pajak Reklame	514.000.000,00	420.474.858,00	-93.525.142,00	81,80
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	460.000.000,00	359.192.958,00	-100.807.042,00	78,09
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	460.000.000,00	359.192.958,00	-100.807.042,00	78,09
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00	61.281.900,00	7.281.900,00	113,49
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00	61.281.900,00	7.281.900,00	113,49
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.160.434.126,00	18.202.300.149,00	1.041.866.023,00	106,07
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.592.866.459,00	18.160.328.644,00	2.567.462.185,00	116,47
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.592.866.459,00	18.160.328.644,00	2.567.462.185,00	116,47
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.567.567.667,00	41.971.505,00	-1.525.596.162,00	2,68
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.567.567.667,00	41.971.505,00	-1.525.596.162,00	2,68
4.1.01.11	Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	31.084.400,00	220,02
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	31.084.400,00	220,02
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	25.900.000,00	56.984.400,00	31.084.400,00	220,02
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	187.980.555,00	153,71
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	187.980.555,00	153,71
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	537.980.555,00	187.980.555,00	153,71
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	7.456.000,00	114,34
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	7.456.000,00	114,34
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	59.456.000,00	7.456.000,00	114,34
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.685.050.000,00	1.655.999.320,00	-29.050.680,00	98,28
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	110.000.000,00	102.600.000,00	-7.400.000,00	93,27
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	110.000.000,00	102.600.000,00	-7.400.000,00	93,27

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.300.000,00	-	-1.300.000,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.300.000,00	-	-1.300.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.573.750.000,00	1.553.399.320,00	-20.350.680,00	98,71
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.573.750.000,00	1.553.399.320,00	-20.350.680,00	98,71
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	-858.053.802,00	84,40
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	-858.053.802,00	84,40
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000,00	4.641.946.198,00	-858.053.802,00	84,40
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	-1.388.274.740,00	74,39
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	-1.388.274.740,00	74,39
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.420.000.000,00	4.031.725.260,00	-1.388.274.740,00	74,39
4.1.02	Retribusi Daerah	1.938.500.000,00	2.955.587.944,64	1.017.087.944,64	152,47
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	311.500.000,00	257.500.000,00	-54.000.000,00	82,66
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	71.082.000,00	-8.918.000,00	88,85
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	71.082.000,00	-8.918.000,00	88,85
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	72.700.000,00	-47.300.000,00	60,58
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	72.700.000,00	-47.300.000,00	60,58
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	111.500.000,00	113.718.000,00	2.218.000,00	101,99
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	66.000.000,00	53.421.000,00	-12.579.000,00	80,94
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.500.000,00	8.761.000,00	-3.739.000,00	70,09
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	33.000.000,00	51.536.000,00	18.536.000,00	156,17

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	927.000.000,00	1.132.012.000,00	205.012.000,00	122,12
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	391.636.000,00	-8.364.000,00	97,91
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	40.000.000,00	35.020.000,00	-4.980.000,00	87,55
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	135.000.000,00	314.066.000,00	179.066.000,00	232,64
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	22.250.000,00	-2.750.000,00	89,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00	20.300.000,00	-179.700.000,00	10,15
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00	613.827.000,00	213.827.000,00	153,46
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00	613.827.000,00	213.827.000,00	153,46
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	105.000.000,00	103.869.000,00	-1.131.000,00	98,92
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	105.000.000,00	103.869.000,00	-1.131.000,00	98,92
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	22.000.000,00	22.680.000,00	680.000,00	103,09
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	22.000.000,00	22.680.000,00	680.000,00	103,09
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	1.566.075.944,64	866.075.944,64	223,73
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	1.097.435.173,00	897.435.173,00	548,72
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	1.097.435.173,00	897.435.173,00	548,72
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00	468.640.771,64	-31.359.228,36	93,73
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00	468.640.771,64	-31.359.228,36	93,73
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	-1.038.581.446,63	92,30
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	-1.038.581.446,63	92,30
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	-1.038.581.446,63	92,30

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Keuangan)				
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.495.329.143,00	12.456.747.696,37	-1.038.581.446,63	92,30
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.395.936.734,00	89.141.671.002,58	21.745.734.268,58	132,27
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	166.000.000,00	183.652.650,00	17.652.650,00	110,63
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	1.717.000,00	-63.283.000,00	2,64
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	-	-50.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	1.717.000,00	-8.283.000,00	17,17
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	-	-5.000.000,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	113.865.558,67	63.865.558,67	227,73
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	113.865.558,67	63.865.558,67	227,73
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	51.000.000,00	53.194.150,00	2.194.150,00	104,30
4.1.04.01.05.0049	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	160,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	41.000.000,00	37.194.150,00	-3.805.850,00	90,72
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain		14.875.941,33	14.875.941,33	100,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang		9.475.941,33	9.475.941,33	100,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	1.374.686.460,69	168,73
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	1.374.686.460,69	168,73
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	3.374.686.460,69	1.374.686.460,69	168,73

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000,00	-524.224.000,00	1,09
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000,00	-524.224.000,00	1,09
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	530.000.000,00	5.776.000,00	-524.224.000,00	1,09
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	11.156.181.395,47	378,90
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	11.156.181.395,47	378,90
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	15.156.181.395,47	11.156.181.395,47	378,90
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	31.350.000,00	58.746.436,00	27.396.436,00	187,39
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.000,00	48.200,00	-251.800,00	16,07
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	250.000,00	48.200,00	-201.800,00	19,28
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	50.000,00	-	-50.000,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000,00	81.582,00	-218.418,00	27,19
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000,00	3.960,00	-196.040,00	1,98
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000,00	77.622,00	-22.378,00	77,62
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000,00	-	-100.000,00	0,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100.000,00	-	-100.000,00	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	200.000,00	387.612,00	187.612,00	193,81
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000,00	387.612,00	287.612,00	387,61
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00	-	-100.000,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	259.826,00	259.826,00	100,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	259.826,00	259.826,00	100,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000,00	555.119,00	455.119,00	555,12

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000,00	555.119,00	455.119,00	555,12
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00	-	-200.000,00	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00	-	-200.000,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000,00	-	-150.000,00	0,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000,00	-	-150.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.000.000,00	57.414.097,00	27.414.097,00	191,38
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	30.000.000,00	57.414.097,00	27.414.097,00	191,38
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	817.200.500,00	7.701.046.322,09	6.883.845.822,09	942,37
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	810.000.000,00	7.693.602.923,09	6.883.602.923,09	949,83
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	810.000.000,00	7.693.602.923,09	6.883.602.923,09	949,83
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.200.500,00	7.443.399,00	242.899,00	103,37
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	7.200.500,00	7.443.399,00	242.899,00	103,37
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	2.810.195.504,33	104,70
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	2.810.195.504,33	104,70
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	59.851.386.234,00	62.661.581.738,33	2.810.195.504,33	104,70
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.924.609.610.848,00	1.871.370.786.390,00	-53.238.824.458,00	97,23
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.834.391.787.000,00	1.801.661.723.106,00	-32.730.063.894,00	98,22

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.713.851.127.000,00	1.681.121.063.106,00	-32.730.063.894,00	98,09
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	933.510.958.000,00	927.121.176.000,00	-6.389.782.000,00	99,32
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	557.710.000.000,00	557.710.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.936.082.000,00	5.936.082.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	215.841.000,00	215.841.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	4.545.000,00	4.545.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	110.280.758.000,00	110.280.758.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212.439.561.000,00	212.439.561.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	287.637.000,00	287.637.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.924.851.000,00	19.924.851.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.394.327.000,00	-	-6.394.327.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.376.539.000,00	1.376.539.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	18.945.362.000,00	18.945.362.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	570.085.195.000,00	550.052.374.982,00	-20.032.820.018,00	96,49
4.2.01.01.02.0001	DAU	494.717.391.000,00	495.007.349.000,00	289.958.000,00	100,06
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	71.367.804.000,00	51.045.025.982,00	-20.322.778.018,00	71,52
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.778.615.000,00	69.578.191.171,00	-3.200.423.829,00	95,60
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	323.337.000,00	322.486.000,00	-851.000,00	99,74
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.665.321.000,00	7.619.055.300,00	-46.265.700,00	99,40

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.858.176.000,00	3.835.680.000,00	-22.496.000,00	99,42
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	200.000.000,00	199.700.000,00	-300.000,00	99,85
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.357.989.000,00	3.315.006.570,00	-42.982.430,00	98,72
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	17.963.657.000,00	17.599.150.095,00	-364.506.905,00	97,97
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.225.969.000,00	1.218.414.667,00	-7.554.333,00	99,38
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.730.000.000,00	8.528.668.950,00	-2.201.331.050,00	79,48
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	22.628.166.000,00	22.210.866.459,00	-417.299.541,00	98,16
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.826.000.000,00	4.729.163.130,00	-96.836.870,00	97,99
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137.476.359.000,00	134.369.320.953,00	-3.107.038.047,00	97,74
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.239.340.000,00	45.061.064.698,00	-178.275.302,00	99,61
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.427.500.000,00	1.427.500.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.987.909.000,00	53.555.310.000,00	-432.599.000,00	99,20
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.109.500.000,00	2.512.251.000,00	1.402.751.000,00	226,43
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.414.531.000,00	3.399.795.000,00	985.264.000,00	140,81
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.127.680.000,00	5.101.020.800,00	-26.659.200,00	99,48
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.454.460.000,00	2.431.745.400,00	-22.714.600,00	99,07
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.088.621.000,00	3.377.659.506,00	-1.710.961.494,00	66,38
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	404.744.000,00	404.744.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.122.612.000,00	10.482.909.708,00	-2.639.702.292,00	79,88
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.830.101.000,00	4.570.621.901,00	-259.479.099,00	94,63

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	586.411.000,00	477.484.300,00	-108.926.700,00	81,42
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.340.950.000,00	1.225.214.640,00	-115.735.360,00	91,37
4.2.01.05	Dana Desa	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	2.960.320.000,00	103,04
4.2.01.05.01	Dana Desa	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	2.960.320.000,00	103,04
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	97.495.393.000,00	100.455.713.000,00	2.960.320.000,00	103,04
4.2.01.06	Insentif Fiskal	23.045.267.000,00	20.084.947.000,00	-2.960.320.000,00	87,15
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	23.045.267.000,00	20.084.947.000,00	-2.960.320.000,00	87,15
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	23.045.267.000,00	20.084.947.000,00	-2.960.320.000,00	87,15
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.217.823.848,00	69.709.063.284,00	-20.508.760.564,00	77,27
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	-11.128.760.564,00	85,39
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.167.823.848,00	65.039.063.284,00	-11.128.760.564,00	85,39
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.107.388.485,00	10.619.197.035,00	-4.488.191.450,00	70,29
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.217.670.943,00	7.871.829.655,00	-3.345.841.288,00	70,17
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.482.297.496,00	28.193.561.808,00	-2.288.735.688,00	92,49
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	188.153.221,00	168.781.301,00	-19.371.920,00	89,70
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.172.313.703,00	18.185.693.485,00	-986.620.218,00	94,85
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	-9.380.000.000,00	33,24
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	-9.380.000.000,00	33,24
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.050.000.000,00	4.670.000.000,00	-9.380.000.000,00	33,24
5	BELANJA DAERAH	2.204.264.530.108,00	2.068.293.546.341,91	135.970.983.766,09	93,83

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1	BELANJA OPERASI	1.159.955.397.895,00	1.050.208.712.129,03	109.746.685.765,97	90,54
5.1.01	Belanja Pegawai	575.227.519.626,00	525.372.910.474,50	49.854.609.151,50	91,33
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.937.010.379,00	327.032.486.344,00	31.904.524.035,00	91,11
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	252.389.157.505,00	242.403.783.057,00	9.985.374.448,00	96,04
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	191.191.518.358,00	185.945.419.157,00	5.246.099.201,00	97,26
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.197.639.147,00	56.458.363.900,00	4.739.275.247,00	92,26
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.228.151.224,00	21.820.388.501,00	6.407.762.723,00	77,30
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.212.011.596,00	17.128.512.421,00	1.083.499.175,00	94,05
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.016.139.628,00	4.691.876.080,00	5.324.263.548,00	46,84
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.076.552.395,00	5.094.609.950,00	981.942.445,00	83,84
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.076.552.395,00	5.094.609.950,00	981.942.445,00	83,84
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.621.277.948,00	14.372.215.250,00	2.249.062.698,00	86,47
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.621.277.948,00	14.372.215.250,00	2.249.062.698,00	86,47
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.391.448.807,00	4.828.547.000,00	1.562.901.807,00	75,55
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.705.692.055,00	1.542.992.000,00	1.162.700.055,00	57,03
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.685.756.752,00	3.285.555.000,00	400.201.752,00	89,14
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.714.239.945,00	12.733.994.580,00	1.980.245.365,00	86,54
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.704.475.691,00	9.404.485.080,00	1.299.990.611,00	87,86
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.009.764.254,00	3.329.509.500,00	680.254.754,00	83,04
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.434.936.013,00	7.580.921.260,00	2.854.014.753,00	72,65
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.418.122.293,00	7.580.921.260,00	2.837.201.033,00	72,77
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	16.813.720,00	-	16.813.720,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	110.425.407,00	3.536.509,00	106.888.898,00	3,20

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.867.607,00	2.366.196,00	85.501.411,00	2,69
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.557.800,00	1.170.313,00	21.387.487,00	5,19
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.140.307.274,00	16.193.962.106,00	4.946.345.168,00	76,60
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.988.790.158,00	13.935.479.541,00	3.053.310.617,00	82,03
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.151.517.116,00	2.258.482.565,00	1.893.034.551,00	54,40
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	769.877.454,00	500.277.538,00	269.599.916,00	64,98
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	511.647.330,00	381.602.308,00	130.045.022,00	74,58
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	258.230.124,00	118.675.230,00	139.554.894,00	45,96
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.060.636.407,00	1.500.250.593,00	560.385.814,00	72,81
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.341.016.350,00	1.144.237.325,00	196.779.025,00	85,33
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	719.620.057,00	356.013.268,00	363.606.789,00	49,47
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110.435.385.084,00	97.934.035.487,00	12.501.349.597,00	88,68
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.542.649.998,00	37.441.502.047,00	4.101.147.951,00	90,13
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.542.649.998,00	37.441.502.047,00	4.101.147.951,00	90,13
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.491.951.994,00	4.065.809.512,00	426.142.482,00	90,51
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.491.951.994,00	4.065.809.512,00	426.142.482,00	90,51
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.191.123.032,00	3.033.921.157,00	157.201.875,00	95,07
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.191.123.032,00	3.033.921.157,00	157.201.875,00	95,07
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	61.209.660.060,00	53.392.802.771,00	7.816.857.289,00	87,23
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	61.209.660.060,00	53.392.802.771,00	7.816.857.289,00	87,23

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.185.359.870,00	69.790.805.173,00	3.394.554.697,00	95,36
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	440.700.000,00	398.639.773,00	42.060.227,00	90,46
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.400.000,00	9.600.000,00	800.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	52.000.000,00	48.000.000,00	4.000.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	260.000,00	240.000,00	20.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.700.000,00	10.800.000,00	900.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	130.000.000,00	117.800.000,00	12.200.000,00	90,62
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	520.000,00	480.000,00	40.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.150.000,00	6.600.000,00	550.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37.700.000,00	34.800.000,00	2.900.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	104.000.000,00	96.000.000,00	8.000.000,00	92,31
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	85.670.000,00	73.119.773,00	12.550.227,00	85,35
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.193.231.120,00	52.557.815.700,00	2.635.415.420,00	95,23

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	55.193.231.120,00	52.557.815.700,00	2.635.415.420,00	95,23
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.877.099.800,00	2.876.801.200,00	298.600,00	99,99
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.877.099.800,00	2.876.801.200,00	298.600,00	99,99
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.882.488.950,00	2.474.500.000,00	407.988.950,00	85,85
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.882.488.950,00	2.474.500.000,00	407.988.950,00	85,85
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.673.040.000,00	10.451.887.000,00	221.153.000,00	97,93
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.259.670.000,00	10.080.959.000,00	178.711.000,00	98,26
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	413.370.000,00	370.928.000,00	42.442.000,00	89,73
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.093.800.000,00	1.031.161.500,00	62.638.500,00	94,27
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.091.400.000,00	1.031.161.500,00	60.238.500,00	94,48
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.351.712.200,00	17.529.366.876,00	822.345.324,00	95,52
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000,00	780.570.000,00	72.591.000,00	91,49
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000,00	780.570.000,00	72.591.000,00	91,49
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000,00	73.983.000,00	38.158.000,00	65,97
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000,00	73.983.000,00	38.158.000,00	65,97
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000,00	86.614.320,00	44.204.680,00	66,21
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000,00	86.614.320,00	44.204.680,00	66,21
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000,00	66.885.000,00	20.259.000,00	76,75
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000,00	66.885.000,00	20.259.000,00	76,75
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000,00	1.131.826.500,00	24.189.500,00	97,91

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000,00	1.131.826.500,00	24.189.500,00	97,91
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.317.600,00	92.546.300,00	64.771.300,00	58,83
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.317.600,00	92.546.300,00	64.771.300,00	58,83
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600,00	-	29.781.600,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600,00	-	29.781.600,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.174.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.174.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.029.000.000,00	1.029.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.029.000.000,00	1.029.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000,00	-	14.350.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000,00	-	14.350.000,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000,00	-	622.000,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000,00	-	622.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.301.800.000,00	3.183.706.756,00	118.093.244,00	96,42
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	193.800.000,00	192.480.000,00	1.320.000,00	99,32
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000.000,00	1.605.744,00	4.394.256,00	26,76
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	4.821.012,00	1.178.988,00	80,35
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.096.000.000,00	2.984.800.000,00	111.200.000,00	96,41
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.970.400.000,00	4.590.300.000,00	380.100.000,00	92,35
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.970.400.000,00	4.590.300.000,00	380.100.000,00	92,35

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	319.935.000,00	15.225.000,00	95,46
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	319.935.000,00	15.225.000,00	95,46
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.137.996.803,00	750.987.099,50	387.009.703,50	65,99
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.968.000,00	54.600.000,00	54.368.000,00	50,11
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.968.000,00	54.600.000,00	54.368.000,00	50,11
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800,00	7.644.000,00	3.277.800,00	69,99
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800,00	7.644.000,00	3.277.800,00	69,99
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.680.000,00	98.280.000,00	10.400.000,00	90,43
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.680.000,00	98.280.000,00	10.400.000,00	90,43
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.728.600,00	8.111.040,00	617.560,00	92,92
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.728.600,00	8.111.040,00	617.560,00	92,92
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000,00	431.482,00	5.168.518,00	7,71
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000,00	431.482,00	5.168.518,00	7,71
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000,00	1.040,00	54.960,00	1,86
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000,00	1.040,00	54.960,00	1,86
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.842.500,00	5.503.680,00	338.820,00	94,20
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.842.500,00	5.503.680,00	338.820,00	94,20
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286.000,00	112.320,00	173.680,00	39,27
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286.000,00	112.320,00	173.680,00	39,27
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.800,00	336.960,00	129.840,00	72,19
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.800,00	336.960,00	129.840,00	72,19

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	888.447.103,00	575.966.577,50	312.480.525,50	64,83
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	10.712.500,00	10.712.500,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	117.800.000,00	47.120.000,00	70.680.000,00	40,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	375.000,00	56.250,00	318.750,00	15,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12.850.000,00	5.140.000,00	7.710.000,00	40,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	429.010.853,00	321.758.140,00	107.252.713,00	75,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	647.500,00	647.500,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	625.000,00	312.500,00	312.500,00	50,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.126.250,00	31.594.687,50	10.531.562,50	75,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	137.500.000,00	103.125.000,00	34.375.000,00	75,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	135.500.000,00	54.200.000,00	81.300.000,00	40,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	759.200.000,00	709.940.000,00	49.260.000,00	93,51
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000,00	285.340.000,00	33.860.000,00	89,39
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000,00	285.340.000,00	33.860.000,00	89,39
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440.000.000,00	424.600.000,00	15.400.000,00	96,50
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440.000.000,00	424.600.000,00	15.400.000,00	96,50

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.420.855.290,00	11.625.289.495,00	795.565.795,00	93,59
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.420.855.290,00	11.625.289.495,00	795.565.795,00	93,59
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.420.855.290,00	11.625.289.495,00	795.565.795,00	93,59
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.152.602.429,00	463.971.082.740,63	57.181.519.688,37	89,03
5.1.02.01	Belanja Barang	91.794.007.903,00	79.735.793.894,20	12.058.214.008,80	86,86
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.504.527.903,00	79.446.871.894,20	12.057.656.008,80	86,82
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	623.369.017,00	592.670.627,20	30.698.389,80	95,08
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.974.026.627,00	5.869.694.827,19	2.104.331.799,81	73,61
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	21.518.000,00	21.500.000,00	18.000,00	99,92
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	136.063.975,00	130.030.375,00	6.033.600,00	95,57
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	129.988.000,00	81.680.000,00	48.308.000,00	62,84
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	213.200.000,00	213.100.000,00	100.000,00	99,95
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.611.478.902,00	2.514.547.841,00	96.931.061,00	96,29
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.093.542.500,00	634.054.020,00	459.488.480,00	57,98
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.705.800,00	16.083.000,00	6.622.800,00	70,83
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	137.691.500,00	113.033.500,00	24.658.000,00	82,09
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.890.000,00	25.890.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.170.556.910,00	3.931.698.969,00	238.857.941,00	94,27
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.602.562.040,00	1.514.252.628,00	88.309.412,00	94,49
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.101.130.479,00	6.951.922.323,00	1.149.208.156,00	85,81
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda	294.650.000,00	252.389.000,00	42.261.000,00	85,66

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Pos				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.947.000,00	27.947.000,00	2.000.000,00	93,32
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.692.961.750,00	1.604.192.200,00	88.769.550,00	94,76
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.944.843.495,00	6.869.607.465,00	75.236.030,00	98,92
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.656.281.340,00	8.534.691.455,00	121.589.885,00	98,60
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	565.605.000,00	549.855.000,00	15.750.000,00	97,22
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.071.556.000,00	1.034.023.700,00	37.532.300,00	96,50
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.458.050.400,00	1.397.732.018,00	60.318.382,00	95,86
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.352.274.339,00	9.066.756.409,00	285.517.930,00	96,95
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	154.836.610,00	133.135.750,00	21.700.860,00	85,98
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.085.371.950,00	611.236.050,00	2.474.135.900,00	19,81
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.000.000,00	7.918.918,00	81.082,00	98,99
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	112.600.000,00	110.629.900,00	1.970.100,00	98,25
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	9.550.000,00	9.370.000,00	180.000,00	98,12
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.517.597.948,00	9.441.411.150,00	3.076.186.798,00	75,43
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.241.728.000,00	2.686.096.850,00	555.631.150,00	82,86
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	495.015.000,00	297.225.000,00	197.790.000,00	60,04
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.318.803.821,00	4.317.698.814,00	1.105.007,00	99,97

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	13.230.000,00	4.751.000,00	8.479.000,00	35,91
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.449.854.000,00	2.036.417.000,00	413.437.000,00	83,12
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	78.440.000,00	74.200.000,00	4.240.000,00	94,59
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	366.055.000,00	343.790.000,00	22.265.000,00	93,92
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	170.400.000,00	163.370.000,00	7.030.000,00	95,87
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.521.812.500,00	1.456.329.150,00	65.483.350,00	95,70
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.257.995.000,00	1.241.915.000,00	16.080.000,00	98,72
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	191.270.000,00	183.850.000,00	7.420.000,00	96,12
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	136.000.000,00	128.475.000,00	7.525.000,00	94,47
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	77.850.000,00	75.450.000,00	2.400.000,00	96,92
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.258.565.000,00	1.172.620.000,00	85.945.000,00	93,17
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.122.940.000,00	1.097.934.960,81	25.005.039,19	97,77
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.536.725.000,00	1.458.304.994,00	78.420.006,00	94,90
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	221.475.000,00	218.870.000,00	2.605.000,00	98,82
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	214.200.000,00	214.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	287.480.000,00	286.922.000,00	558.000,00	99,81
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.480.000,00	37.350.000,00	130.000,00	99,65
5.1.02.01.04.0541	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	250.000.000,00	249.572.000,00	428.000,00	99,83

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Fasilitas Umum				
5.1.02.02	Belanja Jasa	223.015.290.910,00	204.611.186.880,67	18.404.104.029,33	91,75
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	168.968.333.000,00	154.490.478.402,17	14.477.854.597,83	91,43
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	69.600.000,00	62.150.000,00	7.450.000,00	89,30
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.082.925.000,00	1.940.412.500,00	1.142.512.500,00	62,94
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.058.335.000,00	2.352.855.000,00	705.480.000,00	76,93
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	439.400.000,00	435.650.000,00	3.750.000,00	99,15
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.977.600.000,00	14.449.299.999,82	528.300.000,18	96,47
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	427.200.000,00	396.800.000,00	30.400.000,00	92,88
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.381.356.000,00	8.832.712.000,00	548.644.000,00	94,15
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.981.925.000,00	8.168.589.377,00	813.335.623,00	90,94
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	730.387.500,00	436.196.254,00	294.191.246,00	59,72
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.808.180.000,00	2.764.180.000,00	44.000.000,00	98,43
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.580.000.000,00	5.534.980.000,00	45.020.000,00	99,19
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.468.200.000,00	2.431.600.000,00	36.600.000,00	98,52
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	269.250.000,00	215.700.000,00	53.550.000,00	80,11
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	203.085.000,00	184.854.500,00	18.230.500,00	91,02
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.342.835.000,00	2.202.815.000,00	140.020.000,00	94,02
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	327.100.000,00	311.700.000,00	15.400.000,00	95,29
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.815.440.000,00	21.222.266.300,00	593.173.700,00	97,28
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.601.900.000,00	10.387.425.000,00	214.475.000,00	97,98

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.987.765.000,00	3.881.768.048,00	105.996.952,00	97,34
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.919.840.000,00	1.603.640.000,00	316.200.000,00	83,53
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.371.303.000,00	9.020.543.472,00	350.759.528,00	96,26
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.649.300.000,00	4.405.530.000,00	243.770.000,00	94,76
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	6.200.000,00	3.443.000,00	2.757.000,00	55,53
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.027.600.000,00	2.970.850.000,00	56.750.000,00	98,13
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.290.000.000,00	1.188.800.000,00	101.200.000,00	92,16
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	165.600.000,00	165.583.200,00	16.800,00	99,99
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	180.400.000,00	180.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	40.050.000,00	32.225.000,00	7.825.000,00	80,46
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	525.200.000,00	525.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	345.000.000,00	328.915.624,00	16.084.376,00	95,34
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.651.135.600,00	17.579.796.159,00	4.071.339.441,00	81,20
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	190.000.000,00	127.500.000,00	62.500.000,00	67,11
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	60.360.000,00	30.829.000,00	29.531.000,00	51,08
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	67.072.000,00	67.030.000,00	42.000,00	99,94
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23.425.000,00	16.797.152,00	6.627.848,00	71,71
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	136.000.000,00	84.645.200,00	51.354.800,00	62,24
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.927.850.000,00	4.747.627.344,00	180.222.656,00	96,34
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	154.200.000,00	136.487.251,00	17.712.749,00	88,51
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	447.539.900,00	358.402.682,00	89.137.218,00	80,08

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.959.870.000,00	17.441.282.312,35	2.518.587.687,65	87,38
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	672.774.000,00	593.564.000,00	79.210.000,00	88,23
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.044.540.000,00	2.964.586.350,00	79.953.650,00	97,37
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	175.800.000,00	19.083.330,00	156.716.670,00	10,86
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	2.868.450.000,00	2.791.297.013,00	77.152.987,00	97,31
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.214.340.000,00	646.634.430,00	567.705.570,00	53,25
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	23.500.000,00	-	23.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	126.500.000,00	102.000.000,00	24.500.000,00	80,63
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	50.000.000,00	43.831.904,00	6.168.096,00	87,66
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.833.704.910,00	22.077.519.390,50	1.756.185.519,50	92,63
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.017.275.000,00	14.084.007.000,00	933.268.000,00	93,79
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.873.382.000,00	1.556.861.600,00	316.520.400,00	83,10
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	693.385.000,00	563.972.377,00	129.412.623,00	81,34
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.442.557.200,00	1.130.431.669,00	312.125.531,00	78,36
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.550.550.000,00	1.508.075.534,50	42.474.465,50	97,26
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.237.655.710,00	3.234.171.210,00	3.484.500,00	99,89
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	18.900.000,00	-	18.900.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.476.855.000,00	3.163.695.040,00	313.159.960,00	90,99

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	493.045.000,00	481.933.640,00	11.111.360,00	97,75
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	842.010.000,00	709.016.400,00	132.993.600,00	84,21
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	6.000.000,00	5.200.000,00	800.000,00	86,67
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	259.500.000,00	182.475.000,00	77.025.000,00	70,32
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.113.750.000,00	1.112.500.000,00	1.250.000,00	99,89
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	731.550.000,00	662.570.000,00	68.980.000,00	90,57
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	659.600.000,00	549.100.000,00	110.500.000,00	83,25
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	211.500.000,00	184.500.000,00	27.000.000,00	87,23
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	358.100.000,00	275.600.000,00	82.500.000,00	76,96
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	90.000.000,00	89.000.000,00	1.000.000,00	98,89
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	33.000.000,00	2.000.000,00	94,29
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	35.000.000,00	33.000.000,00	2.000.000,00	94,29
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.812.045.000,00	20.374.912.346,00	437.132.654,00	97,90
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.893.800.000,00	8.723.192.047,00	170.607.953,00	98,08
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	150.000.000,00	149.770.000,00	230.000,00	99,85
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	7.000.000.000,00	6.862.741.329,00	137.258.671,00	98,04

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.318.300.000,00	4.211.886.720,00	106.413.280,00	97,54
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	448.545.000,00	427.322.250,00	21.222.750,00	95,27
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.003.000.000,00	868.834.530,00	134.165.470,00	86,62
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	90.000.000,00	89.921.000,00	79.000,00	99,91
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000,00	89.188.500,00	60.811.500,00	59,46
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	199.481.430,00	518.570,00	99,74
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	555.000.000,00	482.243.600,00	72.756.400,00	86,89
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.136.503.000,00	2.984.497.172,00	1.152.005.828,00	72,15
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.709.287.000,00	1.727.918.376,00	981.368.624,00	63,78
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.127.216.000,00	968.578.796,00	158.637.204,00	85,93
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	300.000.000,00	288.000.000,00	12.000.000,00	96,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	84.500.000,00	63.400.000,00	21.100.000,00	75,03
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	84.500.000,00	63.400.000,00	21.100.000,00	75,03
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.580.765.111,00	41.565.524.097,85	2.015.241.013,15	95,38
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.658.224.000,00	8.937.913.408,00	1.720.310.592,00	83,86
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.141.980.000,00	1.048.239.760,00	93.740.240,00	91,79
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.037.940.000,00	867.991.882,00	169.948.118,00	83,63
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.958.680.000,00	3.088.024.039,00	870.655.961,00	78,01
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	552.200.000,00	467.977.067,00	84.222.933,00	84,75
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	52.000.000,00	44.600.000,00	7.400.000,00	85,77
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	32.995.000,00	27.560.000,00	5.435.000,00	83,53
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	210.000.000,00	207.446.900,00	2.553.100,00	98,78
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	59.988.174,00	11.826,00	99,98
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	871.920.000,00	746.617.400,00	125.302.600,00	85,63
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	55.000.000,00	34.950.000,00	20.050.000,00	63,55
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	26.000.000,00	21.305.000,00	4.695.000,00	81,94
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	731.200.000,00	665.373.406,00	65.826.594,00	91,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	17.929.000,00	2.071.000,00	89,65
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam	71.100.000,00	68.700.000,00	2.400.000,00	96,62

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Kebakaran				
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	110.000.000,00	100.567.000,00	9.433.000,00	91,42
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00	99,58
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	22.000.000,00	3.516.000,00	18.484.000,00	15,98
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	37.000.000,00	36.919.450,00	80.550,00	99,78
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	22.683.000,00	22.515.000,00	168.000,00	99,26
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	43.200.000,00	41.902.855,00	1.297.145,00	97,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	619.780.000,00	543.105.411,00	76.674.589,00	87,63
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	55.000.000,00	32.095.000,00	22.905.000,00	58,35
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	94.000.000,00	25.890.000,00	68.110.000,00	27,54
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	592.046.000,00	552.070.000,00	39.976.000,00	93,25
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	175.500.000,00	148.215.064,00	27.284.936,00	84,45
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.752.723.349,00	11.631.001.453,91	121.721.895,09	98,96
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.568.472.349,00	6.467.950.066,91	100.522.282,09	98,47
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	4.361.756.000,00	4.345.959.387,00	15.796.613,00	99,64
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	380.000.000,00	379.890.000,00	110.000,00	99,97
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	299.940.000,00	60.000,00	99,98
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	122.780.000,00	117.547.000,00	5.233.000,00	95,74
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	19.715.000,00	19.715.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.493.817.762,00	20.386.285.185,94	107.532.576,06	99,48
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	454.998.600,00	454.648.000,00	350.600,00	99,92
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.669.038.668,00	5.658.923.406,21	10.115.261,79	99,82
5.1.02.03.04.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	12.145.200.494,00	12.053.235.385,96	91.965.108,04	99,24
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	27.580.000,00	27.507.393,77	72.606,23	99,74
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.197.000.000,00	2.191.971.000,00	5.029.000,00	99,77
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	673.000.000,00	610.324.050,00	62.675.950,00	90,69
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	673.000.000,00	610.324.050,00	62.675.950,00	90,69

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.128.457.900,00	45.431.406.330,00	15.697.051.570,00	74,32
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.128.457.900,00	45.431.406.330,00	15.697.051.570,00	74,32
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.052.011.800,00	39.981.865.190,00	13.070.146.610,00	75,36
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.587.746.100,00	4.984.741.140,00	2.603.004.960,00	65,69
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	488.700.000,00	464.800.000,00	23.900.000,00	95,11
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.468.922.000,00	5.462.030.000,00	3.006.892.000,00	64,49
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.468.922.000,00	5.462.030.000,00	3.006.892.000,00	64,49
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.398.640.000,00	2.990.130.000,00	1.408.510.000,00	67,98
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	50,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.172.500.000,00	1.595.400.000,00	1.577.100.000,00	50,29
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13.050.000,00	450.000,00	12.600.000,00	3,45
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	836.000.000,00	834.800.000,00	1.200.000,00	99,86
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	38.232.000,00	36.000.000,00	2.232.000,00	94,16
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.386.764.695,00	28.362.236.658,00	24.528.037,00	99,91
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.386.764.695,00	28.362.236.658,00	24.528.037,00	99,91
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.386.764.695,00	28.362.236.658,00	24.528.037,00	99,91
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.122.612.000,00	11.076.374.029,00	2.046.237.971,00	84,41
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.122.612.000,00	11.076.374.029,00	2.046.237.971,00	84,41
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.122.612.000,00	11.076.374.029,00	2.046.237.971,00	84,41
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.655.781.910,00	47.726.530.850,91	3.929.251.059,09	92,39

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.655.781.910,00	47.726.530.850,91	3.929.251.059,09	92,39
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.655.781.910,00	47.726.530.850,91	3.929.251.059,09	92,39
5.1.04	Belanja Subsidi	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	0,00	100,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	0,00	100,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	0,00	100,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.363.993.000,00	4.363.993.000,00	0,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.556.282.840,00	51.945.725.913,90	2.610.556.926,10	95,21
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.697.220.000,00	11.532.719.715,00	164.500.285,00	98,59
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.697.220.000,00	11.532.719.715,00	164.500.285,00	98,59
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.697.220.000,00	11.532.719.715,00	164.500.285,00	98,59
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.320.155.500,00	34.942.427.546,90	2.377.727.953,10	93,63
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.246.832.000,00	8.982.753.421,89	1.264.078.578,11	87,66
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.730.032.000,00	8.468.570.596,43	1.261.461.403,57	87,04
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	516.800.000,00	514.182.825,46	2.617.174,54	99,49
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.479.003.500,00	17.445.543.325,01	1.033.460.174,99	94,41

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.169.003.500,00	17.135.543.325,01	1.033.460.174,99	94,31
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.594.320.000,00	8.514.130.800,00	80.189.200,00	99,07
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.594.320.000,00	8.514.130.800,00	80.189.200,00	99,07
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.110.017.340,00	1.110.017.340,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.110.017.340,00	1.110.017.340,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.110.017.340,00	1.110.017.340,00	0,00	100,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.428.890.000,00	4.360.561.312,00	68.328.688,00	98,46
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.206.070.000,00	4.146.925.912,00	59.144.088,00	98,59
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.206.070.000,00	4.146.925.912,00	59.144.088,00	98,59
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	222.820.000,00	213.635.400,00	9.184.600,00	95,88
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	222.820.000,00	213.635.400,00	9.184.600,00	95,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	100.000.000,00	97,85
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	100.000.000,00	97,85
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	100.000.000,00	97,85
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.655.000.000,00	4.555.000.000,00	100.000.000,00	97,85
5.2	BELANJA MODAL	771.197.360.700,00	762.157.755.699,88	9.039.605.000,12	98,83

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	725.000.000,00	-	725.000.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	725.000.000,00	-	725.000.000,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	725.000.000,00	-	725.000.000,00	0,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	725.000.000,00	-	725.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.909.763.597,00	68.236.477.554,19	1.673.286.042,81	97,61
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	161.097.000,00	160.759.000,00	338.000,00	99,79
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	161.097.000,00	160.759.000,00	338.000,00	99,79
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	31.097.000,00	31.000.000,00	97.000,00	99,69
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	130.000.000,00	129.759.000,00	241.000,00	99,81
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.738.760.264,00	15.226.177.500,00	512.582.764,00	96,74
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.738.760.264,00	15.226.177.500,00	512.582.764,00	96,74
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.233.577.000,00	5.138.605.000,00	94.972.000,00	98,19
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.136.839.000,00	3.973.696.500,00	163.142.500,00	96,06
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	180.000.000,00	177.000.000,00	3.000.000,00	98,33
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.563.870.000,00	1.486.976.000,00	76.894.000,00	95,08
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	195.574.264,00	44.700.000,00	150.874.264,00	22,86
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.428.900.000,00	4.405.200.000,00	23.700.000,00	99,46
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	179.120.000,00	179.032.444,00	87.556,00	99,95
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	175.700.000,00	175.612.444,00	87.556,00	99,95
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	171.200.000,00	171.162.444,00	37.556,00	99,98
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	33.995.000,00	33.750.000,00	245.000,00	99,28
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	33.995.000,00	33.750.000,00	245.000,00	99,28
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	33.995.000,00	33.750.000,00	245.000,00	99,28
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.025.732.787,00	19.684.993.377,25	340.739.409,75	98,30
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.486.011.715,00	5.314.719.637,25	171.292.077,75	96,88
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00	44.800.000,00	200.000,00	99,56
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	153.918.000,00	153.360.000,00	558.000,00	99,64
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.287.093.715,00	5.116.559.637,25	170.534.077,75	96,77
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.964.846.872,00	13.871.377.540,00	93.469.332,00	99,33
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.100.006.000,00	11.032.105.000,00	67.901.000,00	99,39
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.036.255.100,00	2.030.959.100,00	5.296.000,00	99,74
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	25.176.700,00	24.120.000,00	1.056.700,00	95,80
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	561.709.072,00	542.993.440,00	18.715.632,00	96,67
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	241.700.000,00	241.200.000,00	500.000,00	99,79
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	574.874.200,00	498.896.200,00	75.978.000,00	86,78
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	270.160.000,00	246.580.000,00	23.580.000,00	91,27
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	203.000.000,00	151.670.000,00	51.330.000,00	74,71
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	101.714.200,00	100.646.200,00	1.068.000,00	98,95
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.084.139.320,00	2.000.071.000,00	84.068.320,00	95,97

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.849.454.320,00	1.795.806.000,00	53.648.320,00	97,10
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.575.414.320,00	1.547.380.000,00	28.034.320,00	98,22
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.000.000,00	12.750.000,00	250.000,00	98,08
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	86.040.000,00	85.950.000,00	90.000,00	99,90
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	175.000.000,00	149.726.000,00	25.274.000,00	85,56
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	234.685.000,00	204.265.000,00	30.420.000,00	87,04
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	149.580.000,00	149.580.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	85.105.000,00	54.685.000,00	30.420.000,00	64,26
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.950.514.978,00	9.847.989.172,00	102.525.806,00	98,97
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.607.577.187,00	1.598.696.000,00	8.881.187,00	99,45
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	128.936.866,00	122.866.000,00	6.070.866,00	95,29
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	230.569.610,00	229.830.000,00	739.610,00	99,68
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	133.811.232,00	132.000.000,00	1.811.232,00	98,65
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.114.259.479,00	1.114.000.000,00	259.479,00	99,98
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.342.937.791,00	8.249.293.172,00	93.644.619,00	98,88
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.342.937.791,00	8.249.293.172,00	93.644.619,00	98,88
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.720.446.000,00	4.713.297.587,00	7.148.413,00	99,85
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.582.246.000,00	4.575.561.587,00	6.684.413,00	99,85
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	225.321.000,00	224.884.587,00	436.413,00	99,81
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	4.356.925.000,00	4.350.677.000,00	6.248.000,00	99,86
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	138.200.000,00	137.736.000,00	464.000,00	99,66
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang	48.200.000,00	47.780.000,00	420.000,00	99,13

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Studi:Kesenian				
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	90.000.000,00	89.956.000,00	44.000,00	99,95
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.306.757.410,00	6.203.757.000,00	103.000.410,00	98,37
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.977.939.000,00	4.951.000.000,00	26.939.000,00	99,46
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	674.800.000,00	673.850.000,00	950.000,00	99,86
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.303.139.000,00	4.277.150.000,00	25.989.000,00	99,40
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.328.818.410,00	1.252.757.000,00	76.061.410,00	94,28
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	14.000.000,00	13.900.000,00	100.000,00	99,29
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.111.419.410,00	1.036.452.000,00	74.967.410,00	93,25
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	57.599.000,00	56.655.000,00	944.000,00	98,36
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	145.800.000,00	145.750.000,00	50.000,00	99,97
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	454.500.000,00	381.802.712,94	72.697.287,06	84,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	454.500.000,00	381.802.712,94	72.697.287,06	84,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	454.500.000,00	381.802.712,94	72.697.287,06	84,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	104.000.000,00	103.540.800,00	459.200,00	99,56
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	104.000.000,00	103.540.800,00	459.200,00	99,56
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	104.000.000,00	103.540.800,00	459.200,00	99,56
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	103.817.946,00	103.443.000,00	374.946,00	99,64
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	103.817.946,00	103.443.000,00	374.946,00	99,64
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	103.817.946,00	103.443.000,00	374.946,00	99,64
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	763.524.000,00	751.072.000,00	12.452.000,00	98,37
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	763.524.000,00	751.072.000,00	12.452.000,00	98,37

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	345.204.000,00	343.502.000,00	1.702.000,00	99,51
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	418.320.000,00	407.570.000,00	10.750.000,00	97,43
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.270.113.892,00	6.072.103.447,00	198.010.445,00	96,84
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.270.113.892,00	6.072.103.447,00	198.010.445,00	96,84
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.270.113.892,00	6.072.103.447,00	198.010.445,00	96,84
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.013.245.000,00	2.774.688.514,00	238.556.486,00	92,08
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.013.245.000,00	2.774.688.514,00	238.556.486,00	92,08
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.013.245.000,00	2.774.688.514,00	238.556.486,00	92,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.073.720.735,00	193.391.738.964,18	1.681.981.770,82	99,14
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	193.881.397.960,00	192.363.535.084,89	1.517.862.875,11	99,22
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	193.743.397.960,00	192.225.638.139,19	1.517.759.820,81	99,22
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	105.451.971.560,00	104.723.247.835,84	728.723.724,16	99,31
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	200.000.000,00	199.839.422,12	160.577,88	99,92
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.612.618.043,00	2.602.709.000,00	9.909.043,00	99,62
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.234.478.175,00	3.222.560.179,95	11.917.995,05	99,63
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	69.229.590.322,00	68.802.498.950,00	427.091.372,00	99,38
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.892.200.000,00	3.877.059.309,46	15.140.690,54	99,61
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	544.000.000,00	542.182.830,00	1.817.170,00	99,67
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.929.819.860,00	5.617.455.560,79	312.364.299,21	94,73
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	71.000.000,00	70.903.051,03	96.948,97	99,86
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.577.720.000,00	2.567.182.000,00	10.538.000,00	99,59
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	138.000.000,00	137.896.945,70	103.054,30	99,93

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Tinggal				
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	138.000.000,00	137.896.945,70	103.054,30	99,93
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.000.000,00	497.250.755,29	2.749.244,71	99,45
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	500.000.000,00	497.250.755,29	2.749.244,71	99,45
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	500.000.000,00	497.250.755,29	2.749.244,71	99,45
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	692.322.775,00	530.953.124,00	161.369.651,00	76,69
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	692.322.775,00	530.953.124,00	161.369.651,00	76,69
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	692.322.775,00	530.953.124,00	161.369.651,00	76,69
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	496.114.936.705,00	491.162.017.186,36	4.952.919.518,64	99,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	436.077.441.705,00	431.557.635.864,71	4.519.805.840,29	98,96
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	392.433.426.705,00	388.265.705.145,35	4.167.721.559,65	98,94
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	292.562.026.345,00	288.930.568.027,22	3.631.458.317,78	98,76
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	5.459.200.000,00	5.336.914.063,46	122.285.936,54	97,76
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	93.812.200.360,00	93.405.029.152,67	407.171.207,33	99,57
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	600.000.000,00	593.193.902,00	6.806.098,00	98,87
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	43.644.015.000,00	43.291.930.719,36	352.084.280,64	99,19
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.311.300.000,00	20.076.070.420,88	235.229.579,12	98,84
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	14.821.825.000,00	14.733.039.701,99	88.785.298,01	99,40
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	8.510.890.000,00	8.482.820.596,49	28.069.403,51	99,67
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.403.245.000,00	8.162.212.871,65	241.032.128,35	97,13
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.609.445.000,00	6.368.912.871,65	240.532.128,35	96,36
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	900.000.000,00	699.148.000,00	200.852.000,00	77,68
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.709.445.000,00	5.669.764.871,65	39.680.128,35	99,31

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.728.000.000,00	1.727.500.000,00	500.000,00	99,97
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.728.000.000,00	1.727.500.000,00	500.000,00	99,97
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	100,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	51.634.250.000,00	51.442.168.450,00	192.081.550,00	99,63
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	51.634.250.000,00	51.442.168.450,00	192.081.550,00	99,63
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	46.618.750.000,00	46.436.725.290,00	182.024.710,00	99,61
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.015.500.000,00	5.005.443.160,00	10.056.840,00	99,80
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.174.939.663,00	9.169.531.295,15	5.408.367,85	99,94
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	427.545.000,00	425.050.000,00	2.495.000,00	99,42
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	427.545.000,00	425.050.000,00	2.495.000,00	99,42
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	420.045.000,00	417.550.000,00	2.495.000,00	99,41
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	884.553.250,00	883.175.395,15	1.377.854,85	99,84
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	884.553.250,00	883.175.395,15	1.377.854,85	99,84
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	884.553.250,00	883.175.395,15	1.377.854,85	99,84
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.803.891.413,00	7.802.355.900,00	1.535.513,00	99,98
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.803.891.413,00	7.802.355.900,00	1.535.513,00	99,98
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.803.891.413,00	7.802.355.900,00	1.535.513,00	99,98
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	100,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	100,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	199.000.000,00	197.990.700,00	1.009.300,00	99,49
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	199.000.000,00	197.990.700,00	1.009.300,00	99,49
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	199.000.000,00	197.990.700,00	1.009.300,00	99,49
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	199.000.000,00	197.990.700,00	1.009.300,00	99,49
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	9.204.693.000,00	-	9.204.693.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	263.907.078.513,00	255.927.078.513,00	7.980.000.000,00	96,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	0,00	100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	0,00	100,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	0,00	100,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.586.286.413,00	3.586.286.413,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	260.320.792.100,00	252.340.792.100,00	7.980.000.000,00	96,93
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	260.320.792.100,00	252.340.792.100,00	7.980.000.000,00	96,93
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	260.320.792.100,00	252.340.792.100,00	7.980.000.000,00	96,93
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	11.400.000.000,00	3.420.000.000,00	7.980.000.000,00	30,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	100.455.713.000,00	100.455.713.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota	148.465.079.100,00	148.465.079.100,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa				
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(160.962.269.257,00)	(58.798.532.730,32)	102.163.736.526,68	36,53
6	PEMBIAYAAN DAERAH	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	16.246.800,38	100,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	16.246.800,38	100,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	16.246.800,38	100,01
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	5.562.309.699,00	5.578.556.499,38	16.246.800,38	100,29
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	3.470.353.439,00	3.482.790.239,00	12.436.800,00	100,36
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	514.795.925,00	514.795.925,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.012.498.436,00	1.012.498.436,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	57.007.782,00	69.444.582,00	12.436.800,00	121,82
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	1.794.900,00	1.794.900,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	433.786.568,00	433.786.568,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	370.313.172,00	370.313.172,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.080.156.656,00	1.080.156.656,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	312.289.100,00	316.099.100,00	3.810.000,00	101,22
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	86.473.400,00	90.283.400,00	3.810.000,00	104,41
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	225.815.700,00	225.815.700,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.779.667.160,00	1.779.667.160,38	0,38	100,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	652.762.840,00	652.762.840,38	0,38	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	1.021.199.982,00	1.021.199.982,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.707.795,00	49.707.795,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.996.543,00	55.996.543,00	0,00	100,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	44.843.212.131,00	44.843.212.131,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	44.843.212.131,00	44.843.212.131,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.745.715.387,00	6.745.715.387,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	367.697.080,00	367.697.080,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	15.711.869,00	15.711.869,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	34.288.330,00	34.288.330,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	5.720.111.273,00	5.720.111.273,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber	8.032.526.501,00	8.032.526.501,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Daya Alam Gas bumi				
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	6.362.529,00	6.362.529,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	2.468.402.168,00	2.468.402.168,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.462.623.567,00	20.462.623.567,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	105.876.606,00	105.876.606,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	15.397.871,00	15.397.871,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	868.498.950,00	868.498.950,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	105.712.320.360,00	105.712.320.360,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	91.240.313.443,00	91.240.313.443,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.164.826.725,00	35.164.826.725,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	9.152.583.864,00	9.152.583.864,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.934.020.069,00	1.934.020.069,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	134.932.868,00	134.932.868,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	130.920.400,00	130.920.400,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	31.797.245,00	31.797.245,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	14.890.076.031,00	14.890.076.031,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	16.356.626.965,00	16.356.626.965,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.622.006.981,00	2.622.006.981,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	7.711.574.054,00	7.711.574.054,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	645.926.900,00	645.926.900,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	426.214.870,00	426.214.870,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	5.762.896,00	5.762.896,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0034	Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD	701.219.629,00	701.219.629,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0036	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	49.480.440,00	49.480.440,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.226.663.506,00	1.226.663.506,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.345.872.917,00	9.345.872.917,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	20.280.256,00	20.280.256,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	56.295.500,00	56.295.500,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	85.451.654,00	85.451.654,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.321.112,00	15.321.112,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	24.061.000,00	24.061.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.111.931.559,00	1.111.931.559,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.162.900,00	10.162.900,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.472.607.444,00	1.472.607.444,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	80.164.093,00	80.164.093,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	343.875.200,00	343.875.200,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	160.105.411,00	160.105.411,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	48.294.880,00	48.294.880,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.098.255.076,00	1.098.255.076,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.352.000,00	10.352.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	2.146.749.680,00	2.146.749.680,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
	Irigasi-Jalan dan Jembatan				
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	77.611.768,00	77.611.768,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	988.462.189,00	988.462.189,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	23.700.830,00	23.700.830,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0037	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	47.261.923,00	47.261.923,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0038	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	638.781.538,00	638.781.538,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0039	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	578.677.000,00	578.677.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0041	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.502.904,00	4.502.904,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0043	Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	302.784.000,00	302.784.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.126.134.000,00	5.126.134.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.126.134.000,00	5.126.134.000,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.844.427.067,00	4.844.427.067,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.844.427.067,00	4.844.427.067,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.844.427.067,00	4.844.427.067,00	0,00	100,00
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	160.962.269.257,00	160.978.516.057,38	16.246.800,38	100,01
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	102.179.983.327,06	102.179.983.327,06	100,00

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA RPJMD

Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari masa kepemimpinan (Bapak Bupati Drs.Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Wakil Bupati Hairan, SH (periode Tahun 2021-2024), sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, diusung Visi “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” dengan 5 Misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Slogan **BERKAH** adalah merupakan bentuk dari suatu cita-cita untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa kepemimpinan UAS-HAIRAN.

B: Berkualitas, yaitu mencita-citakan sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

E: Ekonomi maju, yaitu mencita-citakan meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

R: Religius, yaitu mencita-citakan meletakkan nilai – nilai agama sebagai landasan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan di masyarakat.

K: Kompetitif, yaitu mencita-citakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan Aman, daerah.

A: Aman, yaitu mencita-citakan suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

H: Harmonis, yaitu mencita-citakan terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak.

Sumberdaya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu di bekali dengan iman, ilmu, dan akhlak agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berakhlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH, dengan sasaran **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.**

Kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian misi 1 ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu **Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah, status Kabupaten Layak Anak (KLA), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase pemuda berprestasi atau mandiri yang di bina, dan indeks pembangunan keluarga (Ibangga).**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Di tahun 2024, angka IPM sebesar 72,01, dimana target IPM di tahun 2024 sebesar 68.83, capaian 2024 tersebut telah mampu melampaui target IPM di tahun 2024 artinya pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami kemajuan. Dukungan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara signifikan mampu mendorong kualitas sumber daya manusia.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di definisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Capaian HLS di tahun 2024 sebesar 12,68 target HLS di tahun 2024 sebesar 13,32, maka rasio capaian HLS tahun 2024 terhadap target tahun 2024 adalah sebesar 95,20%, artinya harapan lama sekolah anak-anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga diploma I.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang di habiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah di jalani. Capaian RLS di tahun 2024 sebesar 8,32 artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP/MTS), Target RLS di tahun 2024 sebesar 8,03. Maka capaian RLS tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024 atau dengan rasio capaian sebesar 103,61%.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun/umur seseorang dapat hidup sejak lahir. UHH di tahun 2024 sebesar 73,41 tahun artinya rata-rata umur masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat hidup sejak lahir sebesar 73,41 tahun, Target UHH di tahun 2024 sebesar 68,46 maka capaian UHH di tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024 atau dengan rasio capaian sebesar 107,23%.

Pengeluaran perkapita (Ribu rupiah/orang/tahun) adalah Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun. Capaian pengeluaran perkapita tahun 2024 sebesar Rp. 10.696.000.- artinya rata-rata biaya yang dikeluarkan anggota keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 10.696.000,- pertahun. Target pengeluaran perkapita tahun 2024 sebesar Rp. 9.648.000 /orang/tahun. Maka capaian pengeluaran perkapita tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2024 atau dengan rasio capaian sebesar 110,86%

Status Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023/2024 adalah Kategori “Madya”, artinya Status KLA Kabupaten Tanjung Jabung Barat naik satu jenjang dari kategori pratama menjadi madya. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak,. Target KLA di tahun 2024 adalah status Nindya maka perlu peningkatan satu jenjang lagi menuju status Nindya dari Status Madya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia (perempuan dan laki-laki). Capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 86,51, nilai IPG tersebut diatas skor 80 atau di klasifikasikan sangat tinggi, hal ini menunjukkan pembangunan berbasis gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mencapai kesetaraan yang tinggi. Target IPG tahun 2024 sebesar 89.00, maka capaian IPG tahun 2023 terhadap target tahun 2024 sebesar 97,20%.

Indeks Pembangunan Gender (IDG), IDG adalah indicator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi, pejabat senior, dan manajer dalam posisi profesional dan teknis, dan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 73,39, menunjukkan secara kolektif peran perempuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari aspek keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dapat di kategorikan cukup merata. Target IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebesar 70,00, maka capaian IDG tahun 2022 telah melampaui target di tahun 2024, atau secara rasio capaian IDG tahun 2022 terhadap tahun 2024 sebesar 104,84%.

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), Ibangga merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kerluarga yang di indikasikan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga, Ibangga

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebesar 58,20 yang dihasilkan dari rata- dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Nilai-nilai tersebut diatas menunjukkan kondisi keluarga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati dan pikiran, mampu memenuhi kebutuhan hidup, didalamnya terdapat unsur kasih sayang serta mampu mengaktualisasikan diri baru mencapai 58,20% dari seluruh jumlah keluarga. Target Ibangga tahun 2024 sebesar 64,56, maka rasio capaian Ibangga tahun 2023 terhadap target tahun 2024 sebesar 90,14%.

Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis.

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menciptakan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas dan kondusif bagi investor untuk terinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan instansi vertikal, dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Tetangga, dan pemerintah pusat. Misi 2 Mempunyai sasaran meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, dan terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah. Kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian misi 2 di tunjukkan dengan indikator persentase perda dan perkara yang ditegakkan dan persentase keberlangsungan kelompok budaya.

Persentase perda dan perkara yang di tegakkan merupakan indikator yang mengukur pelaksanaan implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman pada masyarakat dan pemerintah daerah. Capaian persentase perda yang di tegakkan pada tahun 2024 sebesar 100%, artinya perda-perda yang fungsinya terkait mengatur masyarakat secara substansi dapat di tegakkan implemetasinya, Target perda dan perkara yang di tegakkan pada tahun 2024 sebesar 85%, maka capaian tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024.

Persentase keberlangsungan kelompok budaya merupakan indikator yang menunjukkan kelompok budaya yang terus bertahan dan aktif sampai saat ini, Capaian di tahun 2024 sebesar 100%, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelompok budaya dari tahun sebelumnya, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari bermacam suku dan kultur senantiasa gemar berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

Misi 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik.

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Efektif dan Efisien, dan Akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima dan kerja pemerintah yang berorientasi kinerja. Misi 3 Mempunyai 3 sasaran yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian misi 3 di tunjukkan dengan indikator **Nilai Sakip Kabupaten, Maturitas SPIP, Nilai survey kepuasan masyarakat dan Nilai opini BPK terhadap laporan keuangan.**

Nilai SAKIP menunjukkan sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah 64,68 dengan kategori B, kemenpan dan RB menyatakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengimplementasikan Akuntabilitas kinerja sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja. Target SAKIP tahun 2024 adalah 66,01, maka rasio capaian tahun 2024 terhadap target tahun 2024 sebesar 97,98%.

Maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terstruktur dan berkelanjutan. Maturitas SPIP di tahun 2024 di level 3, level 3 menunjukkan pemerintah daerah telah melaksanakan praktek pengendalian intern dengan baik namun dokumentasi atas evaluasi pengendalian intern belum dilakukan secara memadai, Target Maturitas SPIP di tahun 2024 adalah level 3 artinya capaian tahun 2024 telah memenuhi target tahun 2024.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai SKM memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang di berikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai SKM tahun 2024 sebesar 83,60 dengan kategori Baik, hal ini menunjukkan sikap layanan dan kualitas layanan sudah memenuhi standar pelayanan yang baik, Target SKM tahun 2024 adalah 80,72 maka capaian SKM tahun 2024 terhadap target SKM tahun 2024 adalah 103,57%

Nilai opini BPK terhadap laporan keuangan adalah pendapat dari hasil pemeriksaan keuangan berdasarkan data dan fakta, opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), opini WTP dapat di artikan laporan keuangan yang di periksa dapat menyajikan secara wajar dalam semua hal, Target opini BPK terhadap laporan keuangan di tahun 2024 adalah WTP maka capaian tahun 2023 telah memenuhi target 2024.

Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian, pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran, pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian. Misi 4 Mempunyai sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian misi 4 di tunjukkan **dengan indikasi laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks kualitas lingkungan hidup.**

Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator makro yang menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,45%, hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun lalu, ada 3 sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengelolaan. Target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebesar 3,00%, maka capaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup, IKLH di generalisasi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH tahun 2024 sebesar 77,36 angka tersebut menggambarkan secara rata-rata kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup baik, untuk itu kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih harus ditingkatkan lagi. Target IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebesar 70,78, maka capaian IKLH tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024.

Misi 5. Pemerataan pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota.

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, di tujukan agar desa-desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang. Misi 5 Mempunyai 2 sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, dan menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan. Kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian misi 5 di tunjukkan dengan indikator **Indeks Gini**.

Indeks Gini adalah Indikator yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 0,316, (dengan kategori ketimpangan sedang) menunjukkan masih terdapat ketimpangan pendapatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beberapa kecamatan yang tertinggal menjadi penyumbang nilai ketimpangan. Target Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,25, maka rasio capaian Indeks Gini tahun 2023 terdapat target tahun 2024 sebesar 79,11%.

3.2 SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	100%	100%	100%	

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman, berilmu dan berahlak	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	80%	99%	85%	123.75
		Presentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil	37%	37%	62.50%	100.00
		Angka harapan Hidup	68,40	73.41	68.58	107.32
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga	Angka Kematian Ibu	183/ 100.000 KLH	63,50/100.000 KLH	178/100.000 KLH	34.69
		Angka Kematian Neonatal	10/1000 KLH	4,76/1000 KLH	8/1000 KLH	47.60
	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting	16%	14.10%	14%	88.13
	Menurunnya Prevalensi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Success rate TBC	100%	89.22%	100%	89.22
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	95%	80.50%	95%	84.74
		Persentase Penemuan Kasus HIV/AIDS yang di obati	61%	87.50%	64%	143.44
		Prevalensi Hipertensi	31.00%	24.65%	30%	79.52
		Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	1.52%	1.43%	1.50%	94.08
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	87.68	84,50	105.01
		Nilai AKIP	66,05	78,04	70	118.15

3. Rumah Sakit KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE	RASIO CAPAIAN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Persentase SPM Rumah Sakit yang Terpenuhi (%)	79.0%	79,44%	85.0%	100,56
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS	83.5%	81,77%	84.5%	97,93
		Pencapaian Indikator Pelayanan Sesuai Standart				
		- B O R	53.00%	57.81%	60.00%	109.08
		- L O S	3 Hr	3.64	3 Hr	82.42
		- T O I	2 Hr	1.52	2 Hr	131.58
		- G D R	3.3	2.97	3	111.11
		- N D R	2.5	1.13	2.5	221.2

4. Rumah Sakit Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis	Persentase Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	75%	73.90%	80%	98.53

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Tersedianya jalan kabupaten yang mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	49%	46.87%	53%	88.43
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75%	76.40%	84%	90.95
	Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	87.65%	100%	87.65
	Terpenuhinya Kebutuhan Jaringan Irigasi Untuk Pertanian	Persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	60%	65.00%	70%	92.86
	Tersedianya Tata Ruang Wilayah yang Sesuai dengan Dokumen RTRW	Kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW	63%	97.00%	73%	132.88
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80	84.98	84	101.17
		Nilai AKIP	76	78.16	80	97.70

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	9.61%	13.85%	9.61%	9.61%
		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	25%	25%	30%	30%
		Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	10%	10%	10%	10%

7. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	97%	90.35%	95%	93.14

8. Dinas Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Mewujudkan kondisi sosial yang aman, tertib dan demokratis	Meningkatnya penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	

9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Mewujudkan kondisi sosial yang aman, tertib dan demokratis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota SatPol PP yang profesional	Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	15%	12%	15%	125%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85%	100%	90%	118%

10.Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Target di Akhir Periode (2026)	Rasio Capaian
Mewujudkan Kondisi Sosial yang tentram, Tertib dan Demokratis	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	46%	42%	47%	91.30%
	Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS	85%	85%	87%	100.00%

11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87.86%	95%	103%
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%	67,50%	43%	156%
	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90%	84.93%	100%	94.36%
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50	81.88	87.50	94.65%
		Nilai SAKIP Disnaker	72	80.49	78	111%

1. Uraian tentang bagaimana Capaian terhadap Target :

- a. Indikator Sasaran Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, jumlah yang dilatih sebanyak 152 orang yang mendaftar sebanyak 173 orang (per 31 Desember 2024);
- b. Indikator Sasaran Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 orang bekerja di Sektor Formal (25 Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha) dan Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar sebanyak 1.357 orang (per 31 Desember 2024); 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut:
 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK
 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop
 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membuat di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membuat di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat).
 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)
- c. Indikator Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), sebagai berikut:
 1. Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81%
 2. Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%;
 3. Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75%
 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70%
 5. Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan =98,14%
- d. Indikator Sasaran Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, ada 9 (sembilan) kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat (per 31 Desember 2024). Dan semua kasus perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat diselesaikan;
- e. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024, Disnaker Tahun 2024 adalah 81,88 yang dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

f. Indikator Sasaran Nilai SAKIP Disnaker Tahun 2024 adalah 80,49 yang dilakukan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat dari Kepala Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : LHE-007.121/188/M/ISP/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disnaker Kab. Tanjab Barat Tahun 2024.

2. Faktor Pendorong/Faktor Penghambat

a. Faktor Pendorong :

1. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.
2. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.
3. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
4. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
5. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya sosialisasi terkait struktur skala upah sehingga belum banyak perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Target di Akhir Periode (2026)	Rasio Capaian
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	89.00	86.51	90	97.20
		Indeks Pemberdayaan Gender	70	73.39	71	104.84
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	6	33.3	1	555%
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian	0.75	2.1	0.25	280%
	Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nindya	Madya	Utama	Madya
	Terkendalinya Kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka total kelahiran (Total Fertility Rate/TFR- per WUS 15-49 th)	2.40	2.39	2.3	99.58
			Angka kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	66.00	50.80	64
	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64.56	62.61	66.68	96.98
		Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	68.3	69.9	70.1	102.34
		Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi (Unmeet-Need)	18.05	8.2	15.05	45.43

13. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87.00	76.39	90.00	87,8%
	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93.00	93.2	95.2	100,2%
	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan kabupaten	40%	41,42%	60%	104%

- Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Beragam:

Faktor Pendorong :

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk membantu ketersediaan dan distribusi bahan pangan ke masyarakat

Faktor Penghambat :

masih kurangnya ketersediaan bahan pangan dari kelompok/jenis pangan dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat terutama dari produksi lokal Kabupaten Tanjab Barat. Adapun beberapa bahan pangan tersebut yaitu beras, daging ruminansia, telur, kacang hijau, dan sayur

- Meningkatkan Keberagaman Konsumsi Masyarakat

Faktor Pendorong :

Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu.

Faktor Penghambat :

masih kurangnya Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai pentingnya keberagaman konsumsi pangan dan pangan yang bergizi seimbang

- Meningkatkan cadangan pangan pemerintah

Faktor Pendorong :

Dukungan dana APBD II TA 2024 dalam pengadaan beras untuk Cadangan Pangan

14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.80	77.36	70,00	112%
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%

FAKTOR PENDORONG

Kinerja dapat melebihi target yang di tetapkan karena kerjasama yang solid dalam Perangkat Daerah, serta metode kerja yang efektif dalam mengejar kinerja masing-masing indikator sasaran.

FAKTOR PENGHAMBAT

Beberapa penghambat dalam mengejar sasaran indikator adalah kondisi alam dan cuaca yang terkadang menyulitkan pekerjaan, serta beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang adalah tantangan yang harus diatasi bersama.

15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	kepemilikan KTP-el	100%	99.32%	100%	99.32%
		kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	99%	93.58%	100%	94.53%
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	62.27%	80%	103.78%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80.72%	85.70%	80.74%	106.17%

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	30%	24.56%	35%	70.17%

Faktor Pendorong; Adanya Bantuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Faktor Penghambat; Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur Dinas PMD dan Aparatur Pemerintahan Desa

17. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024		Target Di Akhir Priode (2026)	Rasio Capaian %
			Target 2024	Realisasi 2024		
MISI KE 5 : Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Des Sampai Ke Kota	1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Yang Tersedia	55%	66%	60%	110%
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	4 Unit	10 Unit	80.00%
		1.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	55% (195.000 Orang)	153.957 Orang	969.000 Orang	88%
			6.300 Ton	12.422 Ton	31.500 Ton	95.15%
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	B	V/C Ratio (B) angka 0,33	Rasio B disetiap Ruas Jalan Kabupaten	100.00%	
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	20 unit	31 Unit	195 Unit	35.38%
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1210 Unit	2004 Unit	5.840 Unit	64.37%
		1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	30 Kasus	53 Kasus	10 Kasus	73.53%

18. **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik untuk Pelayanan Publik	- Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	- Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	75%	79.75%	100%	106 %
	- Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	- Persentase Aplikasi Umum SPBE yang di Gunakan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 %
	- Meningkatnya OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	- Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100 %
	- Meningkatnya Pengamanan System Elektronik & Informasi	- Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	level 1	Level 2	50 %

FAKTOR PENDORONG

1. Terbangunnya Citra Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3. Terwujudnya indikator Jumlah OPD yang menyampaikan data di aplikasi Satu Data, melalui Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan

Daerah

4. Tercapainya pengembangan pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
5. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Database di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat
6. Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Kendala pada kebijakan : kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya pengaturan dalam bentuk kebijakan , serta perencanaan strategis jangka panjang.
2. Kendala aspek anggaran : belum adanya rencana keuangan jangka panjang terkait SPBE sebagai intensif maupun motivasi untuk staf/karyawan.
3. Kendala penerapan dalam aspek SDM : Kompetensi yang belum memadai kurangnya kesiapan individu dalm Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Kendala belum tercapainya sasaran ke-4 terkait Indeks KAMI adalah tidak adanya tenaga fungsional di bidang persandian seperti Sandiman dan belum adanya political will terkait persandian sehingga infrastruktur terkait keamanan informasi belum menjadi prioritas.

19. **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR (2026)	RASIO CAPAIAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	- Peningkatan jumlah koperasi aktif	10 Koperasi	10 koperasi	211 koperasi	100%
		- Peingkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	100%
	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	- Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	6 kali	6 kali	6 Kali	100%
		- Jumlah pasar yang layak dan berfungsi	5 pasar	5 pasar	5 pasar	100%
		- Peningkatan ekspor non migas	5%	4,8%	5%	96%
		- Persentase UTTP yang tertib dan akurat	41,16%	40,60%	49,82%	98,63%
	Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	- Peningkatan jumlah sentra industri	1 sentra	1 sentral	1 sentra	100%
	Meningkatakandaya saiang industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif	- Peningkatan jumlah usaha industri	40 IK	175 IK	40 IK	437,5%
		- Jumlah Perusahaan yang memiliki izin industry dan perdagangan	300 izin	1.861 izin	300 Izin	620,3%

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026) (Rp)	RASIO CAPAIAN
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan perikanan	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	370,000,000,000.00	554.635.799.232	509,000,000,000.00	150%
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi Kehidupan beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A (91.207)	A	91,20%

21. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	TARGET DIAKHIR PERIODE 2024	RASIO CAPAIAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Meningkatnya Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina	Persentase Pemuda Berprestasi/ mandiri/ Religius yang Dibina	49%	37%	54%	75%
	Peningkatan Prestasi di Bidang Olahraga	Jumlah Perolehan medali Tingkat Nasional/ Regional	9 Medali	21 Medali	11 Medali	233%
Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	40%	186%	50%	464%
	Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di HKI	20%	100%	40%	500%
	Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase SDM Pariwisata Berkompeten yang Dibina	20%	41%	25%	205,9%

22. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Target Pada Akhir Periode (2026)	Rasio Capaian
				Target	Target	
(3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Peningkatan Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah	65,85 (B)	72.27	70,51 (BB)	102.50
(4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan	NTUP	113	113,5*	115	100.44
		Angka Konsumsi Ikan	36.15	36,2*	36.2	100.13

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan Berahlak	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	56.5	58.81	58	104%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	69.5	71.23	70	102%
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Arsip/Dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan	Hasil Audit Pengawasan Kearsipan	Kategori CC (60 %)	Kategori BB (70,01%)	Kategori BB (80%)	116%

Faktor penting meningkatnya capaian IPLM dan TGM tahun 2024 sehingga melampaui target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program TPBIS yang sudah mencapai 31 Desa/ Kelurahan
2. Kegiatan kelas literasi (6 kelas)
3. Peningkatan inovasi/refleksi mandiri pojok baca digital di 3 titik sarana perkantoran
4. Peningkatan inovasi platform titik baca di tempat-tempat umum
5. Peningkatan jumlah bahan pustaka yang beragam

24. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Target di Akhir Periode (2026)	Rasio Capaian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)				
		- Padi	46,540	31,748	48,411	68.22
		- Jagung	2,727	918	2,835	33.66
		- Kacang Tanah	14	28	14	200.00
		- Ubi Kayu	5,030	3,870	5,233	76.94
		- Ubi Jalar	343	847	356	246.94
		Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)				
		- Duku	720	5,137	749	713.47
		- Durian	1,697	5,971	1,763	351.86
		- Jeruk	1,853	3,638	1,928	196.33
		- Pisang	29,045	4,239	30,213	14.59
		- Nenas	120	327.7	126	273.08
		- Jahe	166	194	173	116.87
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72	70.21	76	97.51
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80.50	80	103.21

25. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024 (Data ASEM 2024)	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Misi Keempat, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)				
		- Kelapa Sawit	127,419	156,381	132,437	118%
		- Karet	3,890	2,829	3,936	72%
		- Kelapa Dalam	56,549	55,202	57,800	96%
		- Kopi	1,207	1,127	1,224	92%
		- Pinang	10,909	14,042	11,182	126%
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)				
		- Sapi	9,641	9,396	10,029	94%
		- Kerbau	788	768	819	94%
		- Kambing	51,166	49,588	53,232	93%
		- Domba	878	843	912	92%
		- Unggas	1,584,799	1,569,029	1,648,823	95%

26. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang Efektif	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	66.50 (B)	77.19 (BB)	70,01 (BB)	116%
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	83.00%	83.00%	90.00%	100%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81.00	83.60	89.00	103.21%
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	35	35	43	100%
	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	3<ST<4	-	3<ST<4	-
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%	85%	100%	100%
	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Bidang Keagamaan	100%	100%	100%	100%
		Peringkat Prestasi MTQ tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar	3 Besar	100%
	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naskah Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang di Implementasikan	86.00%	86.00%	95%	100.00%
	Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang di Implementasikan	Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang diImplementasikan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Administasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Impelementasi Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kebijakan Bidang Urusan Sumber Daya Alam yang di Implementasikan	100%	100%	100%	100%

27. **Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	90%	89.67%	92%	99.63

28. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN (%)
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	82	84	82	102.44
		Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100
		Nilai AKIP Bappeda	75	72.36	78	96.48
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	95%	95%	96%	100
		Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan	94%	94%	95%	100
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian	14%	14%	18%	100

29. **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik	Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Ketersediaan Kas / Dana tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Sinkronisasi Laporan Keuangan OPD terhadap LKD	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Hasil Sinkronisasi Aset OPD terhadap BMD	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	67 (B)	70,15 (BB)	69 (B)	104.70%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (B)	81,94 (B)	87 (B)	96.40%

30. **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.16%	11.40%	8.18%	139.71%
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	69.00	78.44	70.00	113.68%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.00	82.06	83.00	101.31%

31. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahklak	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73	N/A	77	
	Meningkatnya Penataan ASN	Persentase Penetapan Jabatan Sesuai Kompetensi	92	82.9	93	89.1
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	80	80.8	61	132.5

32. **Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	1. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	80%	59.0%	100%	73.75%
		2. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI	80%	62.5%	80%	78.13%
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	77%	71.35	80%	92.7%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	79%	81.17%	80%	102.7%
		Nilai AKIP	74%	77.11%	76%	104.2%

33. Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	81,61	71,80	115%
		Nilai SAKIP SKPD	60.10	62.09	60.50	103%
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	85%	100%	90%	118%

34. Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	83.01	71.80	117%
		Nilai SAKIP SKPD	60.20	65.52	60.50	108%
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	85%	100%	90%	117%

35. Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	80,71	71.80	113,8%
		Nilai SAKIP SKPD	60,20	64,26	60.50	106,7%
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	85%	100%	90%	117%

36. Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Terwujudnya kondisi sosial kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	81,58	71.80	115.06%
		Nilai SAKIP SKPD	60.10B	50,.29	60.50B	84%
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik.	100%	100%	100%	100%

37. **Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	86.08	71.80	100%
		Nilai SAKIP SKPD	60.00	60.52	60.50	100%
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	72%	79%	90%	100%

38. Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE 2026	RASIO CAPAIAN
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah Dan Pemerintah Desa Yang Efektif , Efisien Dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90%	82%	71,80 %	115.66
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60.10	53.39	60.50	88.84
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%	100%
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana Kecamatan yang termanfaatkan /berfungsi baik	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	0.7	0.6559	0.75	92.86

39. Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta Kondisi Sosial yang tentram, tertib dan Harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100.00%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	81,57	71,80	115 %
		Nilai SAKIP SKPD	60,20	74,85	60,50	124 %
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	85%	100.00%	90%	117%

40. Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	82.07	71.80	115%
		Nilai SAKIP SKPD	60.10	56.87	60.50	95%
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	100%	100%	100%	117%

41. Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	82.82	71.80	116.81%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60.20	60.74	60.50	100.89%
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa		Persentase sarana prasaranan di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	85%	100%	90%	117.65%

42. Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Mewujudkan Kondisi sosial Yang Tentram, Tertib dan Demokratis	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman Ketertiban Dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	82,50	71,80	116.36%
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,10	57.23	60,50	125.17%
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	100%	100%

43. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Mewujudkan Kondisi sosial Yang Tenram, Tertib dan Demokratis	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman Ketertiban Dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	86,48	71,80	121,97%
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,2	63,96	60,50	106,25 %
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	100%	100%

44. Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatna Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	80.25	71,80	111.71%
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/ Stunting Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60.1	70.01	60,50	72.90%
Tercapainya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Suasana Kehidupan Tenteram, Tertib dan Rukun Antar Umat Beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketenteraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti/ difasilitasi	100%	100%	100%	100%

45. Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DIAKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatna Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	79.2	71,80	111.71%
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	60.1	43.81	60,50	72.90%
Tercapainya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Suasana Kehidupan Tenteram, Tertib dan Rukun Antar Umat Beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketenteraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%	100%

46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	87%	87%	93%	100%

3.2. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab III ini akan digambarkan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dimana keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan disesuaikan dengan target dalam dokumen anggaran dan dilengkapi dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disertai dengan solusi pemecahannya.

a. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan; Urusan Kebudayaan (Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD *	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perbub nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	12 Bulan				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Tidak ada masalah			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada			

				Tunjangan ASN			Masalah		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Stel	100 Stel	Tidak Ada Masalah		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Masalah		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Tidak Ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah		

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Permasalahan			
			Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten	Program Pengelolaan Pendidikan						

			Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;						
			Permendikbud No 32 Th 2018 tentang SPM Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	10 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10 Ruang	10 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	10 Ruang	10 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80	80 Unit	Tidak Ada Permasalahan.		
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4 Unit	4 Unit	Tidak Ada Permasalahan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	4 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	7 Unit	7 Unit	Tidak Ada Permasalahan.		
				Pengadaan Mebel Sekolah	4370 Paket	4370 Paket	Tidak Ada Permasalahan.		

				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	41 Paket	41 Paket	Tidak Ada Permasalahan.			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2 Medali	2 Medali	Kegiatan minat bakat dan kreatifitas siswa berupa kegiatan lomba-lomba seperti OSN, O2SN dan FLS2N yg dalam penganggarannya , lomba-lomba dilaksanakan secara luring, namun Pedoman yg dikeluarkan oleh Kemdikbudristek pelaksanaan lomba-lomba dilaksanakan secara online.	Akan melaksnakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Kemendikdakmen untuk alokasi anggaran tahun selanjutnya		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	200 Orang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembinaan	201	201 Satuan	Penilaian LSS	Akan		

				Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	Pendidikan	tidak dilaksanakan, karena ada perubahan nama kegiatan dari LSS menjadi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) berdasarkan SE Dirjendikdasmen NO. 1725/C.C4/DM.00.02/2024	dilaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggaran untuk tahun selanjutnya.		
			Permendikbud No.8 tahun 2020 tentang Juknis BOS PMDN No.24 tahun 2020 tentang tatacara, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban BOS.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32600 siswa	32600 siswa	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	9 Ruang	9 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 Unit	9 Unit	Tidak Ada Permasalahan			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi	201 Satuan	201 Satuan Pendidikan	Tidak Ada Permasalahan			

				Peserta Didik	Pendidikan					
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	55 Ruang	55 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
			Permendikbud No 3 Th 2018 tentang SPI Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3 Ruang	3 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Laboratorium	4 Ruang	4 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21 Unit	21 Unit	Tidak Ada Permasalahan Pada Realisasi Pekerjaan Pada Target Awal Penyusunan Unit dan Pada APBD Perubahan Mendapat Penambahan Alokasi Dana sehingga bertambah Realisasi.			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	8 Ruang	8 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			

				Kelas Sekolah					
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 Ruang	8 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Pengadaan Mebel Sekolah	2.186 Set	2.186 Set	Tidak Ada Permasalahan		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Paket	1 paket	Tidak Ada Permasalahan		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	Tidak Ada Permasalahan		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 orang	5 Orang	Tidak Ada Permasalahan		
			Permendikbud No.8 tahun 2020 tentang Juknis BOS PMDN No.24 tahun 2020 tentang tatacara,	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	Tidak Ada Permasalahan		

			perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban BOS.						
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	3 Ruang	3 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	Tidak Ada Permasalahan		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Ruang	1 Ruang	Tidak Ada Permasalahan		
			Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud 13 Tahun 2020 dan SK Kepala Dinas Dikbud Nomor 420/102/Dikbud.2.1/2020	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	10 Unit	10 Unit	Tidak Ada Permasalahan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Unit	3 Unit	Tidak Ada Permasalahan		
				Pengadaan Mebel PAUD	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan		

				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada Permasalahan			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300 Orang	300 Orang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	280 PAUD	280 PAUD	Tidak Ada Permasalahan			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	273 PAUD	273 PAUD	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	4 Ruang	5 Ruang	Tidak Ada Permasalahan			
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada Permasalahan			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	Tidak Ada Permasalahan			
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	Tidak Ada Permasalahan			
				Penyelenggaraan	500	500	Tidak Ada			

				Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	Peserta Didik	Permasalahan			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan			
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Dokumen	20 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuka jumlah formasi sesuai kebutuhan tenaga pendidik tanjung jabung barat namun	Dalam penyelesaian masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat akan membuka formasi tahun 2024 untuk memenuhi

									pada pelaksanaannya banyak formasi yang disediakan tidak terisi oleh pelamar.	kebutuhan tenaga pendidik pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat.
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada permasalahan			
			Undang – Undang No.05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek	2 Objek	Tidak ada permasalahan			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	50 Orang	50 Orang	Tidak Ada Permasalahan			

				Kebudayaan						
			Undang – Undang No.05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	10 Orang	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada Permasalahan		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Barat

2. Urusan Kesehatan; Dinas Kesehatan

Tabel 3.2
Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	612 orang	612 orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 Laporan			

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	1300 paket	1300 paket			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18 paket	18 paket			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 paket	18 paket			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 paket	18 paket			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 unit	16 unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	20 unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 unit	69 unit			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16 unit kerja	16 unit kerja			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	100%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

			Pengembangan Puskesmas	1 unit	1 unit			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6 unit	6 unit			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 unit	3 unit			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9 unit	9 unit			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1620 unit	1620 unit			
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4 paket	4 paket			
			Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	192 paket	192 paket			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
		- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan). -	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.290 orang	6.188 Orang	- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan ibu hami	- Penggerakan dan pemeberdayaa n masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksa	- Kerjasama lintas sektor tingkat desa dan kecamatan

								Kesehatan ke fasilitas kesehatan	
		- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024						- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua SPM dapat terpenuhi sesuai standar.	- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
		- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)							
		- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.070 orang	6.013 Orang				-
		- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.718 orang	5.961 Orang				

			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024						
			Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.998 orang	23.624 Orang	- Kurangnya partisipasi ibu balita untuk membawa anak pemeriksaan Kesehatan di faskes dan posyandu.	- Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan untuk pemeriksaan Kesehatan anak balita	- Kerjasama lintas sektor tingkat kecamatan dan desa
			- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.065 orang	50.772 orang			
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024						
			- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	216.604 orang	172.405 orang	1.Kurangnya kerjasama dengan Lintas Sektor, Lintas Program,	1.Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas	Dukungan lintas program dan lintas sektor

							dan Jejaring diwilayah kerja Puskesmas	program, dan jejaring diwilayah kerja puskesmas	dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024				2. Belum maksimalnya skrining kesemua wilayah kerja, Posbindu jauh dari jangkauan masyarakat, masih perlu menambahkan Posbindu PTM, sehingga masyarakat melakukan skrening di puskesmas saat sakit saja	2. Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangi suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, sebelum/sesudah sholat Jum'at),	
							3. Kurangnya minat masyarakat untuk datang ke posbindu PTM, salah satu alasannya karena takut mengetahui hasil pemeriksaan.	3. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile ke rt-rt, membuat inovasi Skrining PTM ditempat	

								keramaian (pasar tradisional), serta memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah di wilayah kerja,	
								4.Saat kegiatan skrining dilaksanakan peserta tidak membawa KTP/KK	4.Kegiatan dilakukan dan terintegrasi dengan kegiatan program lain, serta dengan jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas
								5.Peserta banyak tidak hadir pada saat kegiatan skrining dilaksanakan karena bekerja dan sekolah,serta banyak yang berdomisili diluar kota dikarenakan melanjutkan pendidikan	5.Menambah posbindu PTM, sehingga setiap desa memiliki 1 atau 2 posbindu sesuai dengan keadaan wilayah dan jumlah penduduk,

							6.Kurangnya SDM, Dana dan Prasarana untuk penginputan laporan di Sehat Indonesiaku (ASIK)	6.Dapat mengusulkan kegiatan program PTM di Rencana usulan kinerja (RUK) Puskesmas	
							7.Data diaplikasi asik berbeda dengan manual (tidak semua data manual diinput di ASIK)	7.Memaksimal kan penginputan data PTM di ASIK dengan membuat tim penginput	
		- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)							
		- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.098 orang	27.292 orang				
		-Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) '- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80.113 orang	42.504 orang		- Kurangnya Kerjasama dengan Lintas sektor dan lintas program, serta jejaring diwilayah kerja	- Melakukan Peningkatan kapasitas petugas, terus berkoordinasi dengan lintas	Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan

			Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024				puskesmas	sektor, lintas program jejaring dan jaringan wilayah Kerja Puskesmas	pelayanan terhadap penyakit hipertensi
							- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit hipertensi	- Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, meningkatkan penyuluhan tentang hipertensi baik secara langsung ataupun dimedia sosial yang dimiliki puskesmas agar Pasien dapat melakukan kontrol rutin akan tekanan darah meskipun tidak ada keluhan	

							<ul style="list-style-type: none"> - Masih Banyak masyarakat yang takut untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah karena takut dengan hasil pemeriksaan serta tidak rutin kontrol dan makan obat - Memaksimalkan SDM, sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan setiap poli layanan yang ada di puskesmas, pada kader kesehatan, serta pada jejaring di wilayah kerja puskesmas. 		
							<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan di ASIK Karena SDM masih kurang. 		
		<ul style="list-style-type: none"> -Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 	4.976 orang	3.130 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program, dan jejaring di wilayah kerja puskesmas - Melakukan Peningkatan kapasitas petugas, lintas program, jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas, 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyakit Diabetes Mellitus 		
		<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung 				<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman - Meningkatkan 			

			Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024				masyarakat terhadap penyakit Diabetes melitus	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
							- Masih banyak masyarakat yang takut untuk melakukan pemeriksaan gula darah karena takut dengan hasil pemeriksaannya dan masih banyak masyarakat yang tidak rutin kontrol dan makan obat	- Meningkatkan penyuluhan tentang DM baik secara langsung ataupun dimedia sosial yang dimiliki puskesmas sehingga pasien dapat melakukan kontrol rutin walaupun tidak ada keluhan	
							- Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan di ASIK karena SDM masih Kurang	- Memaksimalkan SDM, sarana dan Prasarana penunjang pemeriksaan setiap poli layanan yang ada dipuskesmas, pada kader Kesehatan, serta pada jejaring	

								diwilayah kerja puskesmas	
			-Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)						
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	413 orang	741 orang			
			- Permenkes 67 Tahun 2018 tentang Pengendalian TBC						
			-Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)						
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.855 orang	4.840 orang			
			-Permenkes No. 21 Tahun 2022 Tentang Penganggulangan HIV, PIMS dan AIDS	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.486 orang	5.258 orang			

			-Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)					
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024					
			- UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3 dokumen	3 dokumen		
			Perpres no 72 Tahun 2021, Perbub no 12 tahun 2020	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 dokumen	4 dokumen		
			PP no 66 tahun 2014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen		
			PMK No. 8 tahun 2019	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 dokumen	5 dokumen		

			1. PMK no. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. PMK No. 15 tahun 2016 tentang istitoah Kesehatan Jamaah Haji 3. PMK No. 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 dokumen	6 dokumen			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	413 orang	413 orang			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	200 orang	135 orang	1. Kurangnya pengetahuan & pemahaman masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa & NAPZA 2. Belum terbentuknya tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat kabupaten 3. Terbatasnya sumber dana	1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa dan Napza di semua tingkat lapisan masyarakat 2. Membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten	1. Akan melaksanakan kegiatan sosialisasi keswa napza di masyarakat 2. Akan membentuk TPKJM kab.Tanjung jabung barat
			Permenkes No. 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	2 dokumen			

		<p>1. Perpres 82 Th 2018 dan Perpres no 64 Th 2020 Tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>2. Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>- Data Peserta PBPU dan BP Pemda yang tersedia belum memenuhi kuota. Data peserta bersifat fluktuatif setiap bulannya.</p>	<p>- Memenuhi data peserta PBPU dan BP Pemda berdasarkan kuota yang ada melalui mutasi tambah kurang peserta</p>	<p>- koordinasi dengan lintas sektor terkait</p>
						<p>- Terdapat kompensasi tagihan iuran BPJS Kesehatan (kelebihan tagihan oleh BPJS sehingga pengembalian dana Pemda), berdasarkan BA Perhitungan dan Perlakuan Kompensasi Atas kelebihan Pembayaran Bantuan iuran PBPU dan BP Mandiri kelas III Tahun 2021 dan 2024 BPJS kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>	<p>- Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan</p>	<p>- Melakukan koordinasi dengan BPJS</p>

							Nomor 7376/BA/II-07, Nomor 400.7.3.6/4057/Dinkes/2024 terdapat kelebihan tagihan Bantuan luran sebesar Rp 364.039.200,- yang kemudian diperuntukan untuk membayar tagihan tagihan berikutnya pada tahun anggaran 2024		
			Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Operasional Pelayanan Puskesmas	16 dokumen	16 dokumen			
			UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	230 paket	230 paket			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			

		Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	16 unit	16 unit			
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan			
		UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	1 dokumen			
		1. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 802) 2. UU RS No 44 Tahun 2009	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 unit	2 unit			

		<p>3. PP No 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan</p> <p>4. Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</p> <p>5. Permenkes No 12 tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit</p> <p>6. Permenkes Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan</p> <p>7. Kep.Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/1131/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi</p> <p>8. Permenkes No 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah</p> <p>9. Permenkes No 21 Tahun 2020 Tentang Strategi Kemenkes</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil</p>						
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100 orang	450 orang			

			- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan). -	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen			
			- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024						
			Permenkes Nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data Bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 aplikasi	2 aplikasi			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen	2 dokumen			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	75% 87,50%	75% 87,50%			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%			

			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	2 dokumen			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	148 orang	148 orang			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511 orang	511 orang			
		PMK 37 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511 orang	511 orang			
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	35% 35%	100% 100%			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	100%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 dokumen	5 dokumen			

			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	36 sampel	36 sampel			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen			
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 IRTP	80 IRTP			
		Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen			

			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90 IRTP	90 IRTP			
		Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	92 unit	92 Unit			
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80%	80%			
		Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205 Posyan du	205 Posyandu			
		Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	- kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan/men datangi Posyandu ,	- Melakukan edukasi, komunikasi, dan informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik dan penyuluhan keliling	- Melakukan pencetakan media KIE

							- kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader dalam pelaksanaan posyandu	- Melakukan pelatihan kecakapan kader posyandu	- Pelaksanaan pelatihan kecakapan kader Posyandu
							- terbatasnya sumber daya yang tersedia	- Melakukan monitoring dan evaluasi melalui pemberdayaan masyarakat	- Dilakukan monev secara berkala

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Kesehatan; Rumah Sakit Suryah Khairuddin

Tabel 3.3
Rumah Sakit Rumah Sakit Suryah Khairuddin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	100%	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100.0%			
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
			Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	9 Unit	9 Unit	Tidak Ada		
			Pengadaan Mebel	33 Unit	33 Unit	Tidak Ada		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit	Tidak Ada		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185 Unit	185 Unit	Tidak Ada		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	100%			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Tidak Ada		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	99.8%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100%	99%			
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Tidak Ada		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	8 Unit	8 Unit	Tidak Ada		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77 Unit	77 Unit	Tidak Ada		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	105 Paket	105 Paket	Tidak Ada		
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5 Paket	4,75 Paket	Pemakaian oksigen untuk pasien rawat inap kurang dari target yang di buat	menghitung kembali jumlah kebutuhan pemakaian oksigen pada pasien rawat inap untuk tahun selanjutnya	

			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	93.2%			
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Kunjungan dokter Spesialis Paruh Waktu tidak tercapai di akibatkan pemutusan kontrak beberapa dokter kunjungan paruh waktu dan beberapa dokter yang melakukan cuti	mencari pengganti dokter spesialis yang putus kontrak serta menghitung dengan seksama jumlah kunjungan dokter spesialis paruh waktu	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	100%			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Seuai Standar	97 Orang	97 Orang	Tidak Ada		

Sumber : Rsud Suryah Khaidruddin Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Urusan Kesehatan; Rumah Sakit KH. Daud Arif

Tabel 3.4
Rumah Sakit KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Kesehatan	RSUD KH. Daud Arif		01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	98.33%			
		Kab. Tanjung Jabung Barat		2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				0001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/Bln	155 Orang/Bln			
				0002. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen			
				2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			

				0002. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket			
				2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				0002. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket			
				0004. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				0005. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
				0006. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				0009. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
				2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	100%			
				0006. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit			
				2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%			

				0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
				0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
				0004. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan			
				2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.65%			
				0001. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
				0002. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	12 Unit	semula di rencanakan Pemeliharaan 17 Unit Kendaraan, namun Kendaraan yang dipelihara sebanyak 8 unit yang akan dilakukan pemeliharaan beberapa kali, sebagai berikut : > Pemeliharaan Ambulance 3 Unit X 2 kali pemeliharaan > mobil Jenazah 2 Unit X 3 Kali Pemeliharaan	Pengadaan Mobil Ambulance pada tahun berikutnya	

							<p>> Mobil UTD 1 Unit X 1 Kali Pemeliharaan</p> <p>> Mobil Operasional 2 Unit X 2 Kali Pemeliharaan</p> <p>Dari rencana 17 kali pemeliharaan terealisasi hanya 12 kali yang terdiri dari :</p> <p>> Pemeliharaan Ambulance 3 Unit X 1 kali pemeliharaan</p> <p>> mobil Jenazah 2 Unit X 3 Kali Pemeliharaan</p> <p>> Mobil UTD 1 Unit X 1 Kali Pemeliharaan</p> <p>> Mobil Operasional 2 Unit X 1 Kali Pemeliharaan</p> <p>Beberapa kendaraan yang dipelihara kondisinya kurang baik Pemeliharaan terkendala karena Intensitas penggunaan kendaraan yang cukup tinggi</p>		
				0006. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				0009. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit			

			0011. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			
			2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD	85%	100.00%			
			0001. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
			02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 RS	1 RS			
			2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 RS	1 RS			
			0014. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	30 Unit			
			0015. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	6 Unit	6 Unit			
			0020. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85 Unit	85 Unit			
			0022. Pengembangan Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit			

				0023. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 RS	1 RS			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Dokumen	3 Dokumen	Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Sulit mencari dokter spesialis 2. rencana 3 dokter spesialis yang akan kontrak kunjungan (Sp.Anak 1 orang, Sp.Radiologi 1 orang, dan dokter Sp.P.Dalam 1 Orang) tidak terealisasi	> Usulan Kebutuhan Dokter Spesialis dan SubSpesialis > Tubel dokter Umum untuk pendidikan Spesialis.	

Sumber : Rsud KH. Daud Arif Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Urusan Pekerjaan Umum; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.5.
Dinas Pekerjaan Umum.
dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12 bulan	12 bulan	100.00 %		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00 %		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %		

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	5	Laporan	100.00 %			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan	12	bulan	100.00 %			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang	55	Orang	103.77 %			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00 %			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100.00 %			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100.00 %			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100.00 %			
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %			

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100.00%			
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	274	Stel	120	Stel	43.80 %	Pakaian dinas di anggarkan 2 stel/pegawai. Ternyata yang di setuju untuk di anggarkan hanya 1 stel	akan berusaha menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebutuhan	Agar diisi permasalahan
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Set	60	Set	100.00 %			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Dokumen	5	Dokumen	100.00 %			

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100.00 %						
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00 %						
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Unit	35	Unit	166.67 %	Pengadaan /pembelian baru pada peralatan kantor diperuntukkan untuk kantor PKK.	akan mendata ulang peralatan kantor yang sudah dihibahkan ke kantor lain.				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	35	Unit	350.00 %						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Laporan	20	Laporan	100.00 %						
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	100.00 %						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100.00 %						
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	69	Unit	69	Unit	100.00 %						

					Urusan Pemerintahan Daerah															
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	5	Unit	100.00 %										
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5	Unit	5	Unit	100.00 %										
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57	Unit	57	Unit	100.00 %										
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	1	Unit	50.00 %	rencana awal pemeliharaan gedung akan dilakukan bertahap, pada APBD murni dan APBD perubahan	perencanaan lebih detail lagi.								
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60	%	65	%	108.33 %										
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	70	%	70	%	100.00 %										

					Kabupaten/Kota																				
					Normalisasi/Restorasi Sungai	22.82	Km	##	Km	112.36 %	dibantu dengan peralatan amfibi	pekerjaan lebih mudah													
					Rehabilitasi Tanggul Sungai	22.82	Km	##	Km	138.71 %	dibantu dengan peralatan amfibi	pekerjaan lebih mudah													
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80	%	85	%	106.25 %															
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	10	Km	24	Km	235.00 %	dibantu dengan peralatan amfibi	pekerjaan lebih mudah													
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	20	Km	31	Km	157.00 %	dibantu dengan peralatan amfibi	pekerjaan lebih mudah													
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	85	%	88	%	103.15 %															
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	2050	SR	0		66.67 %	dana anggaran tidak mencukupi	penambahan anggaran													

					Kabupaten/Kota								
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3	Dokumen	2	Dokumen	66.67 %	dana anggaran tidak mencukupi	penambahan anggaran	
					Pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2050	SR	0	SR	0.00%	belum teranggarkan untuk pembangunan SPAM Jaringan perpipaan. Dana yang tersedia hanya untuk penggantian pipa distribusi.	Diajukan kembali untuk di anggarkan di tahun berikutnya	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		100 %		100 %		100.00%		
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20	Unit	48	Unit	240.00 %			

						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15	Dokumen	16	Dokumen	106.67 %	banyak bangunan yang harus diperbarui	pendataan bangunan gedung yang akan diperbarui		
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120	Dokumen	558	Dokumen	465.00 %	meningkatnya kesadaran masyarakat dan di dukung kemudahan dalam pengurusan izin IMB melalui OSS sehingga meningkatnya permintaan rekomendasi IMB yang di keluarkan	pendataan berkala untuk persetujuan bangunan gedung		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49	%	47	%	95.65 %				
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50	Km	79	Km	158.00 %				

						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5	Dokumen	14	Dokumen	280.00 %			
						Rehabilitasi Jembatan	10	Unit	4	Unit	40.00 %	kurangnya anggaran untuk penanganan rehabilitasi jembatan	perlu di rehabilitasi, terbatas dengan anggaran	
						Rekonstruksi Jalan	30	Km	73	Km	242.33 %			
						Pemeliharaan Berkala Jalan	10	Km	6.2	Km	62.00 %	dana anggaran tidak mencukupi	penambahan anggaran	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	10	Unit	12	Unit	120.00 %			
						Pembangunan Jembatan	7	Unit	1	Unit	14.29 %	dana yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 unit jembatan sangat besar	penambahan anggaran	

					Pemeliharaan Rutin Jalan	10	Km	39	Km	390.00 %	Pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola, sehingga lebih banyak panjang jalan yang terpelihara	anggaran tersedia		
					Survey Kondisi Jalan / Jembatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %				
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			18	%	26	%	108.02%		
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20.63	%	26	%	126.03 %				
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	200	Org	180	Org	90.00 %				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5	Dokumen	3	Dokumen	60.00 %				
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4	Dokumen	3	Dokumen	75.00 %				
					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan	3	Dokumen	1	Dokumen	33.33 %	Kurangnya permintaan izin rekom ruang			

						Penataan Ruang						oleh masyarakat			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00 %				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	45	dokumen	6	dokumen	13.33 %	Kurangnya permintaan izin rekom ruang oleh masyarakat	Sosialisasi ke masyarakat		
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	45	dokumen	6	dokumen	13.33 %				

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.6.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KET
1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik mempunyai peranan penting untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				
				Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	25 Dokumen				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut	130 Paket	130 Paket				

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	300 Laporan	Dalam Penganggaran di SIPD, Kegiatan Ini dilakukan secara terperinci berdasarkan Eselon dan per Hari, Sehingga ini sedikit menyulitkan Pembagian dari Dana dari setiap Eselon	Dinas Perkim Akan Lebih Teliti dan Mengaggarkan sesuai dengan Kebutuhan.		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 unit	33 unit				

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 unit	33 unit				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan LAinnya	1 unit	1 unit				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	100%	100%				

				Kabupaten/Kota						
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				
				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%				
				Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	2 unit rumah tangga	2 unit rumah tangga				
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%				
				Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	6 Dokumen	6 Dokumen				
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 kelompok masyarakat	6 kelompok masyarakat				

				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	97.50%						
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	80 unit rumah	78 unit rumah	Terdapat 2 Penerima Bantuan tidak terealisasi dikarenakan penerima bantuan telah mendapatkan bantuan kegiatan Bedah Rumah Lainnya berupa Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024	Dinas Perkim akan melakukan koordinasi kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait Penerima Bantuan Kegiatan Dumisake agar tidak terjadi double pencatatan				
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Pemerajaan Permukiman Kumuh	1 Ha	3,98 Ha						
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	97.85%						

				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	140 unit rumah	137 unit rumah	Terdapat 3 Penerima Bantuan tidak terealisasi dikarenakan penerima bantuan telah mendapatkan bantuan kegiatan Bedah Rumah Lainnya berupa Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024	Dinas Perkim akan melakukan koordinasi kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait Penerima Bantuan Kegiatan Dumisake agar tidak terjadi double pencatatan		
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARAN , SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	100%				
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	21 Dokumen	21 Dokumen				
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	892 Lokasi	892 Lokasi				
				Verifikasi dan Penyerahana PSU Permukiman dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan				

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Badan Penanggulangan Bencana

Tabel 3.7.
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 'MEWUJUDKAN KONDISI SOSIAL YANG TENTRAM , TERTIB DAN HARMONIS'	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Terwujudnya Masyarakat Yang Tentram, Tertib dan Harmonis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	40 Dokumen	40 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang PNS	21 Orang PNS	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	100 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah									

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25 Unit	25 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas	25 Unit	25 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	

			operasional atau lapangan					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7 Unit	7 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota								
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	120 Orang	120 Orang	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	3 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	

Sumber : BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat

8. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 3.8.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.0				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
00				Penyusunan Dokumen	100%	100%	Memaksimalkan anggaran yang ada	Diperlukan penambahan anggaran			
00				Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen					
2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
00				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Realisasi jumlah anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.	Menyesuaikan jumlah ASN			
01	32 orang	24 Orang									

				00	Penyediaan Administrasi	100%	100%	Memaksimalkan	Diperlukan	
				02	Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	anggaran yang ada	penambahan anggaran	
				2.0	Administrasi Kepegawaian					
				5	Perangkat Daerah					
				00	Pengadaan Pakaian Dinas	100%	100%	Memaksimalkan	-	
				02	Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	5 Paket	anggaran yang ada		
				2.0	Administrasi Umum					
				6	Perangkat Daerah					
				00	Penyediaan komponen	100%	100%	Memaksimalkan	-	
				01	instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Paket	12 Paket	anggaran yang ada		
						100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran namun, masih dibutuhkan anggaran agar dapat berjalan dengan maksimal	Diupayakan penambahan anggaran	
				00	Penyediaan Peralatan dan					
				02	Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket			
				00	Penyediaan Bahan Logistik	100%	100%	Memaksimalkan	Diupayakan	
				04	Kantor	12 Paket	12 Paket	anggaran yang ada	penambahan anggaran	
				00	Penyediaan Barang Cetak	100%	100%	Memaksimalkan	Diupayakan	
				05	dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	anggaran yang ada	penambahan anggaran	
				00	Penyelenggaraan Rapat	100%	100%	Pada Sub	Diupayakan	

				09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diharapkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan, untuk itu sangat diperlukan adanya penambahan anggaran di tahun yang akan datang.	penambahan anggaran	
				2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	Diupayakan penambahan anggaran	
						5 Unit	5 Unit			
				00 01 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	Diupayakan penambahan anggaran	
						2 Unit	2 Unit			
				2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				00	Penyediaan Jasa Surat	100%	100%	Jumlah anggaran	Diupayakan	-

				01	Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	penambahan anggaran	
						100%	100%	Memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan jumlah penggunaan	Diupayakan penambahan anggaran	-
				00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
						100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	Diupayakan penambahan anggaran	-
				00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						100%	100%	Diperlukan peningkatan anggaran agar mampu menunjang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Anggaran pemeliharaan perlu ditingkatkan	-
				00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 Unit	27 Unit			
				00	Pemeliharaan Peralatan dan	100%	100%	Diperlukan	Anggaran	

				06	Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	peningkatan anggaran agar mampu menunjang Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan perlu ditingkatkan	
				00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	Belum maksimal dalam pemeliharaan gedung kantor	Anggaran pemeliharaan perlu ditingkatkan	-
				09		5 Unit	5 Unit			
				04	PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMTAN NON KEBAKARAN					
				2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota					
				00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di Lapangan lebih maksimal.	Diupayakan penambahan anggaran	
				01		12 Dokumen	12 Dokumen			
				00	Pemadaman dan Pengendalian	100%	100%	Diperlukan adanya	Diupayakan	

				02	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di Lapangan lebih maksimal.	penambahan anggaran	
				00 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di Lapangan lebih maksimal.	Diupayakan penambahan anggaran	
						12 Dokumen	12 Dokumen			
				00 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	100%	Masih diperlukan standarisasi Sarana Prasarana di 6 Pos Damkar sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk tahun yang akan datang	Diupayakan penambahan anggaran	
						12 Dokumen	12 Dokumen			

				00 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100%	100%	Masih banyak Aparatur Pemadam Kebakaran yang belum tersertifikasi sehingga diperlukan adanya pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Diupayakan penambahan anggaran	
						100 orang	100 orang			
				00 01 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	100%	Masih membutuhkan Sarana Prasarana pendukung di 6 Pos Damkar sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk tahun yang akan datang	Diupayakan penambahan anggaran	
				00 01 8	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	-	
						1 Dokumen	1 Dokumen			

				2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
						100%	100%	Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Pendataan terhadap Sapras di Lapangan lebih maksimal	Diupayakan penambahan anggaran
				00 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen		
						100%	100%	Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Penilaian terhadap Sapras Operasional di Lapangan lebih maksimal	
				00 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen		
				2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran				
						100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran	-
				00 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				

						100%	100%	Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran, namun pelaksanaan masih belum maksimal, masih terdapat Desa yang belum diadakan sosialisasi. Pada Tahun 2024 sudah dilakukan Sosialisasi di 2 Kelurahan yaitu Patunas dan Kelurahan Tungkal V. Sehingga pelaksanaan masih belum merata ke seluruh Kelurahan/Desa.	Adanya penambahan anggaran	
				00 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 orang	100 orang			
				00 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam	100%	100%	Relawan Kebakaran yang telah dikukuhkan	Adanya penambahan anggaran	

				Kebakaran	4 Desa/ Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	berjumlah 400 orang. Total seluruh relawan kebakaran berjumlah 1.546 orang dan yang telah terdata di Aplikasi SiPadam berjumlah 210 orang. Namun, untuk pelaksanaan Pembinaan belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.		
				JUMLAH TOTAL 12 KEGIATAN	100%	100%			

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat

9. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.9.
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	PENJELASAN CAPAIAN PROGRAM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan			Terdapat sisa karena adanya PNS yang pensiun	

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Terdapat sisa dari Honor Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak bisa dibayarkan karena menerima Honor PPTK
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	Tidak ada permasalahan		terdapat sisa pada belanja barang karena ada PNS yang pensiun
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	35 Orang	Tidak ada permasalahan		Sesuai dengan Perpres nomor 33 Tahun 2020 bahwa jasa pelatih yang berasal dari SKPD penyelenggara dibayarkan 50% dari honor yang tertera di DPA sub kegiatan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	11 Paket	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77 Paket	77 Paket	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket			Makan minum rapat tidak terealisasi seluruhnya menyesuaikan dengan aturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket			Tidak ada permasalahan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			Tidak ada permasalahan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Tidak ada permasalahan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Pengadaan Mebel	17 Unit	17 Unit	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	9 Unit			Tidak ada permasalahan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit			Tidak ada permasalahan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			a. Penggunaan ATK dan Bahan cetak sesuai kebutuhan b. Pembayaran Honorarium Narasumber yang disesuaikan dengan Perpres No. 33 Tahun 2020 c. Pembayaran Uang Saku Peserta yang disesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan	30 Orang	30 Orang			Sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, untuk narasumber dan

			tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia					pelatih berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan honor sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium yang tercantum dalam DPA Satpol PP Tahun 2024.
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen			Tidak ada permasalahan
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			a. Penggunaan ATK dan Bahan Cetak sesuai Kebutuhan b. Makan/Minum Rapat tidak diklaim sesuai dengan Perpres No. 33 tahun 2020
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	12 Laporan	12 Laporan			Terdapat sisa penggunaan Dana pengamanan Pilkada : a. Sisa Dana Hibah pengamanan Pilkada Polres Tanjab Barat

			Pengamanan dan Pengawalan					<ul style="list-style-type: none"> b. Tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Dana PSU) c. Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Pilkada oleh Satpol PP sesuai dengan Tahapan
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	12 Laporan	12 Laporan			<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan ATK sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian b. Makan / minum yang digunakan sesuai dengan jumlah petugas pengamanan dan jumlah unjuk rasa yang dilakukan pengamanan
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada permasalahan		Tidak ada warga yang terkena dampak akibat kegiatan penegakan Perda dan Perkada
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	17 Unit	17 Unit	Tidak ada permasalahan		Tidak ada permasalahan

				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa Belanja ATK, Biaya cetak dan sisa honorarium narasumber yang berasal dari SKPD penyelenggara, Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 hanya boleh di bayarkan sebesar 50%	Akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan	Terdapat sisa belanja ATK, belanja cetak, tidak terealisasinya belanja materai dan terdapat sisa pada honorarium narasumber yang hanya terealisasi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) karena berasal dari SKPD penyelenggara
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	1 Laporan	1 Laporan	Terkait Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dipastikan sehingga terdapat sisa anggaran	a. Melakukan komunikasi yang lebih instens lagi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan / Desa hingga ke RT b. Akan dilakukan penyesuaian jumlah personil dengan biaya Makan/Minum dan jasa tenaga keamanan	Terdapat sisa belanja BBM, sisa belanja makan minum penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sisa belanja makan / minum petugas dan sisa belanja jasa tenaga keamanan

				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati / Walikota	1 Laporan	1 Laporan	Tidak terealisasinya belanja benda Pos dan terdapat sisa belanja BBM, belanja makan/minum dan Belanja jasa petugas pada 2 (dua) kali Kegiatan pengawasan	Akan dilakukan penyesuaian antara jumlah personil petugas pengawasan dengan anggaran yang tersedia	Tidak terealisasinya belanja benda Pos dan terdapat sisa belanja BBM, belanja makan minum dan belanja jasa petugas pengawasan
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	---

Sumber : Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1. Urusan Sosial; Dinas Sosial

Tabel 3.10.
Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	17 orang	ASN Memasuki masa purna tugas		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	279 Paket	279 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi	6 Paket	6 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	17 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432 Laporan	432 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit			
				Pengadaan Mebel	31 Unit	31 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	22 Unit	22 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	24 laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 laporan	8 laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	20 Unit	20 Unit			

				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	36 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 Unit			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					

				Penyediaan Permakanaan	750 ORANG	750 ORANG			
				Penyediaan Sandang	200 Orang	200 Orang			
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
				Pemberian Layanan Rujukan	142 Orang	156 Orang			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pendataan fakir Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.000 orang	60,293			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.550 Keluarga	13.142 keluarga			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Makanan	550 orang	1.245 Orang			
				Penyediaan sandang	550 orang	1.245 Orang			
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	43 Makam	43 Makam			
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	1 laporan	1 laporan			

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Tenaga Kerja; Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3.11.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang	Tidak Ada		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		

				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56 paket	56 paket	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Bahan Logistik Kantor	1086 paket	1086 paket	Tidak Ada		
				Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	960 Dokumen	960 Dokumen	Tidak Ada		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485 Laporan	485 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ada		

				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer 	Tidak Ada		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu layanan AK.I-V - 1 unit meja ½ Biro 	Tidak Ada		
					layanan AK.I-V <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit meja ½ Biro - 1 unit meja 1 Biro - 3 Kursi Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit meja 1 Biro - 3 Kursi Kerja 			

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	100 Laporan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	12 Unit	Tidak Ada		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 unit	18 unit	Tidak Ada		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	Tidak Ada		
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		

				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	85%	87.86%	Tidak Ada	Target Program Pelatihan Kerja dapat dicapai dengan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBN, selain APBD.
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi	80 orang	152 orang		
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	80 orang	152 orang		<p>Kegiatan pelatihan tahun 2024 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Orang pelatihan menjahit (APBN) - 16 Orang pelatihan Komputer (APBN) - 16 Orang pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (APBN) - 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBN) - 16 Orang pelatihan Komputer Operator Asistant (APBN) - 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBD) - 12 orang pelatihan Hidroponik (APBD) - 10 orang pelatihan operator MIGAS (APBD) - 20 orang pelatihan BARBERSHOP (APBD) - 14 Orang Pelatihan Program Bantuan

								Pelatihan Untuk Masyarakat (11 orang Pelatihan Rigger dan 3 orang Teknisi Sistem Utilitas) (APBN PPSDM MIGAS)	
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
			1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63	Program Penempatan Tenaga Kerja	41%	86.74%	Tidak Ada		
				Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	410 orang	916 orang	Tidak Ada		
				pelayanan antar kerja	410 orang	916 orang	Tidak Ada	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha). 345 orang yang	

			<p>Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.</p> <p>3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.</p>				<p>berwirausaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membuat batik di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membuat batik di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat). 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta 	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

								anggota kelompok tani hidroponik)	
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 orang	100 orang	Tidak Ada		
				Perluasan Kesempatan Kerja	40 orang	90 orang			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1000 orang	1056 orang	Tidak Ada		
				Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	1000 orang	1357 orang	Tidak Ada		
				Job Fair/Bursa Kerja	75 orang	82 orang	Tidak Ada		
			1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Program Hubungan Industrial	90%	84.93%	Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	Meningkatkan kegiatan pembinaan hubungan industrial untuk mendorong perusahaan membentuk LKS Bipartit di dalam perusahaan, sebagai wadah dialog sosial untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan	

			Rentan.				sebagai berikut: 1) Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81% 2) Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%; 3) Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75% 4) Persentas	
--	--	--	---------	--	--	--	---	--

							e Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70% 5) Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan =98,14%		
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	10 Perusahaan	5 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/B	Mendorong perusahaan dan pekerja/buruh dalam perusahaan untuk membentuk serikat pekerja/buruh sehingga dapat menambah jumlah	

							uruh sebanyak 19 perusaha an dengan masa aktif Perjanjian Kerja Bersama 2 (dua) tahun.	Perjanjian Kerja Bersama.	
				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15 Perusahaan	18 Perusahaan	Tidak Ada		
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Kasus	9 Kasus	Tidak Ada		
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak Ada		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.12.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	PENJELASAN CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WAJIB NON PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan KKG dengan fokus pada Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10%	10%		Telah dilaksanakan kegiatan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15	15		<i>Telah dilaksanakan kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15	15		Jumlah peserta kegiatan yang ada dalam DPA kegiatan sebanyak 30 orang dari 15 OPD, agar lebih banyak Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		

				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	200 orang	200 orang		Telah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4	4		kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi Bank Sampah, Pelatihan Pemulasaran Jenazah, Pelatihan Merangkai Bunga dengan memberdayakan perempuan di Tanjung Jabung Barat
					Dokumen	Dokumen		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	5	5		Telah dilakukan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota pada lembaga PKK, PATBM, Karang Taruna, Unsur organisasi masyarakat
					Lembaga Layanan PP	Lembaga Layanan PP		
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5		Terlaksananya kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga penyedia layanan PP di 2 (dua) Desa (Desa Kuala Dasal

					Lembaga	Lembaga		dan Desa Pinang Gading) dengan peserta dari unsur organisasi/lembaga yaitu PKK Desa Kuala Dasal dan Desa Pinang Gading, PLKB Kec. Tungkal Ulu dan Merlung dan PATBM.
2				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	100%		
				<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten /Kota</i>	2 Kali	2 Kali		
				Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		Pelaksanaan Kegiatan adalah pertemuan KOordinasi dan kerjasama Pencegahan KTP, Pertemuan Satgas TPPO, Antar Perusahaan, Rakor Eva Pencegahan KTP dan TPPO, FGD Tentang Pencegahan KTP dan KTA, cetak media KIE
				<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Kasus	2 Kasus	tidak semua kasus perempuan korban kekerasan membutuhkan rujukan lanjutan ke instansi/lembaga lain karena korban sudah mendapat layanan di UPT PPA seperti layanan konsultasi/bantuan hukum, layanan bimbingan rohani	

							serta pemeriksaan dan penanganan psikologi korban dan tidak semua korban mau dirujuk karena masih sekolah, membantu pekerjaan dirumah dan orang tua tidak ingin berpisah sama anak mereka.	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	45 Orang		Semua perempuan korban kekerasan yang melaporkan secara langsung maupun tidak langsung (WA dan Aplikasi SINPAN) ke UPT PPA dan UPPA Polres mendapat layanan
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	8	7	Perempuan korban kekerasan yang melaporkan ke Polres seharusnya mendapat berbagai layanan seperti pengaduan, Pendampingan Hukum (Bantuan Hukum), Penegakan	

					Layanan	Layanan	Hukum, Layanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Tokoh Agama tetapi tahun 2024 hanya 7 layanan yang diberikan kecuali layanan Reintegrasi Sosial. Layanan Reintegrasi Sosial sulit dilakukan karena kurang support system dari keluarga dan masih adanya stigma negatif dari lingkungan masyarakat pada korban kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan pada korban kekerasan tidak semua layanan diberikan tetapi diberikan berdasarkan kebutuhan dari korban.	
				<i>Penguatan dan Pengembangan</i>	24	24		

				<i>Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota</i>	unit layanan	unit layanan		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 Orang	Tidak Ada	Terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dr lembaga layanan antara lain Puskesmas, PATBM dan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah)
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ada	Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan PP terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Sosialisasi di Kabupaten dan Pembinaan di Kecamatan Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, Merlung, Muara Papalik dan Senyerang.
3				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2%	2%		Telah dilaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				<i>Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>200</i>	<i>180</i>	<i>dari rencana 200 KK</i>	<i>Perlu dilakukan sosialisasi dan</i>

				<i>dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat daerah kabupaten/Kota</i>	<i>Keluarga</i>	<i>Keluarga</i>	<i>yang diikuti sertakan hanya 180 KK yang bersedia ikut hal ini dikarenakan tidak semua keluarga langsung bersedia mengikuti karena beberapa hal antara lain waktu mereka yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan berbarengan dengan rutinitas bekerja dan sebagian besar adalah nelayan, dan kurangnya keterbukaan menerima sosialisasi yang disampaikan petugas</i>	<i>kegiatan persiasif secara terus menerus untuk menyamakan pemahaman tentang keluarga berkualitas</i>
				Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan kab/Kota	4	4		Kegiatan hanya dilaksanakan pada satu kelurahan saja untuk beberapa kali kegiatan sehingga tidak merata pada kelurahan/desa lainnya. Kedepan perlu kegiatannya dilaksanakan di beberapa kelurahan/desa lainnya
					Dokumen	Dokumen		

4				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	49%	43%	Penilaian KLA pada Cluster1 tentang hak sipil dan kebebasan masih kurang, (ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang masih kurang) dan Cluster 4 tentang Pendidikan, pemanfaatan waktu luang pada Bidang Pendidikan yang masih rendah.	
				<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	65	65		
					<i>Lembaga PHA</i>	<i>Lembaga PHA</i>		
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	Pada Tahun 2024 Peraturan Penilain tentang KLA berubah yang biasanya 1 tahun sekali menjadi 2 Tahun sekali sehingga Dana kegiatan yang sudah di rencanakan berubah ada kelebihan pada Dana Kegiatan	Telah dilaksanakan kegiatan rapat Kordinasi KLA 2 kali dan Rakor Gugus Tugas KLA 1 kali dan Pelatihan KHA, Dekelana dan Kelana yang melibatkan 35 organisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
					<i>Organisasi</i>	<i>Organisasi</i>		

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	5	Tidak ada	Tersedia dokumen hasil pelaksanaan kegiatan terdiri dari
					Dokumen	Dokumen		1.Dokumen Forum Anak Daerah
								2. Dokumen Rencana Kerja FAD Kabupaten
								3. Dokumen Analisa Kegiatan
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20	20		
					<i>Sekolah</i>	<i>Sekolah</i>		
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150	Penyusunan Target Sub Kegiatan pada Renstra sebanyak 6000 orang, dalam pelaksanaan dan ketersediaan Anggaran mencukupi untuk 90 orang, Kegiatan ini sebagai salah satu metode pendekatan terhadap anak-anak terdampak narkoba yang	Pelaksanaan Kegiatan Diawali dengan Skrining terhadap 150 anak yang terindikasi NAPZA yang dilakukan oleh Tim Skring terdiri dari Kesehatan, Psikolog, Polres Tanjab Barat, hasil skrining terjaring 90 orang Anak yang dilakukan Pendampingan Tim Psikolog, Tim IKAI (Ikatan Konselor Adiksi Indonesia), Sosialisasi Napza oleh Polres Tanjab Barat, dan Boot Camp outdoor
					orang	orang		

							membutuhkan waktu , tehnik dan metode pendekatan yg membutuhkan anggaran besar.	untuk pembentukan karakter Anak.
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen		Telah dilakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (SRA 3 angkatan 120 peserta)
5				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.50%	25.50%		
				<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	2	2		Sosialisasi dan Advokasi
					upaya pencegahan	upaya pencegahan		
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10	10	tidak Ada	Terlaksananya Kegiatan KTA (Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak) yang dilaksanakan di aula dinas P3AP2KB dibuat komitmen bersama OPD terkait Permasalahan /tindakan yang dilakukan setelah anak korban sudah selesai menghadapi kasus dan sedang dalam proses sebuah kasus.
					Orang	Orang		
				Penyusunan kebijakan perlindungan	15	15	tidak Ada	telah terlaksananya kegiatan

				khusus anak kewenangan kab/ kota	Dokumen	Dokumen		sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi kekerasan terhadap anak dan pendampinga psikolog di 2 kelurahan yaitu kelurahan tunggal IV kota dan kelurahan Tungkal Harapan serta sosialisasi perkawinan usia anak di 4 desa yaitu desa teluk sialang,desa pembengis , Desa kepayang dan desa Bunga Tanjung
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30	30		Semua anak yang memerlukan perlindungan khusus yang melaporkan secara langsung maupun tidak langsung (WA dan Aplikasi SINPAN) ke UPT PPA dan UPPA Polres mendapat layanan
					Orang	Orang		
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	30	30		Kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan BootCamp sehingga waktu yang telah di rencana 12 bulan hanya bisa dilaksanakan 6 bulan menunggu apbd murni dirubah ke abpd perubahan tidak semua anak bersedia mengikuti kegiatan ini , dan pelaksanaan screening hanya berdasarkn pemeriksaan / konsultasi psikologis tidak melalui tes narkoba, sehingga ada kesulitan menentukan anak yang benar2 terdampak
					Orang	Orang		

								dan memiliki kecanduan narkoba , dan pemahaman tentang bahaya narkoba yang masih kurang dari orangtua/pendamping anak-anak
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	17	17	Tidak ada	
					<i>Unit layanan PA</i>	<i>Unit layanan PA</i>		
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	2	2	Tidak ada	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PATBM yaitu kec. Tungkal Ulu kec. Tungkal Ilir, kec.bram Itam, Kec. Senyerang, kec. Betara ,Kec. Kuala Betara dan pengabuan Kelompok PATBM Kab.Tanjung Jabung
					Kegiatan	Kegiatan		
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan	17	17	Tidak ada	Terlaksana Pelatihan Perlindungan anak untuk

				perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Orang	Orang		aktivis PATBM dilaksanakan di Hotel Aryad dengan nara sumber dari provinsi dan kabupaten untuk 4 Kelompok PATBM Kab.Tanjung Jabung Barat (PATBM Kel.Tungkal Ilir , PATBM tunggal Ulu, PATBM Desa Mandala Jaya Betara, PATBM kel.Tebing Tinggi)
6				Program Pengendalian Penduduk	1.91	1.45	Tidak Ada	Rata rata Laju pertumbuhan Penduduk , Sumber Data BPS Februari 2024
					100%	100%		OPD Pemanfaat GDPK 100%
				<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	3	2	<i>Dalam Proses Pengajuan PerDa/PerBup GDPK 5 Pilar</i>	<i>akan dilanjutkan penyusunan perda ke dpr</i>
					<i>Kebijakan / Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK</i>	<i>Perbup/G DPK</i>		
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan	23	23		Satuan Pendidikan yang telah diberikan sosialisasi ; 117 Sekolah, Advokasi ; 117 Sekolah, Fasilitasi ; 6 Sekolah
				Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan		
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	Tidak Ada	Proses Penyempurnaan
					Dokumen	Dokumen		

				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	3	3		Tersedia profil KKBPk dalam bentuk dokumen data dan informasi
					Profil KKBPk	Profil KKBPk		1. Data TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
								2.Data PK (Pendataan Keluarga)
								3. Data Verifikasi dan Validasi Kependudukan
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3	3	Tidak Ada	Tersedia Dokumen pelaporan Radaogram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan
					Dokumen	Dokumen		
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	13	13	Tidak Ada	Tersedia Dokumen pelaporan Radaogram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan
					Dokumen	Dokumen		
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	Tidak Ada	Tersedia Dokumen pelaporan Radaogram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan
					Dokumen	Dokumen		
7				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	19.62%	25.20%	Disebabkan oleh kegagalan, kompilkasi, ingin hamil atau ingin mempunyai anak segera, ganti cara, efek samping, biaya serta aksesibilitas, akseptor bercerai atau suami meninggal, menopause.	Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta meningkatkan kualitas Pelayanan dan kelangsungan kesertaan Ber- KB .

				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21 Kali	21 Kali		
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1	1		Operasional kegiatan di Balai penyuluhan KB terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran dan waktu yg tersedia 12 bulan
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dokumen	Dokumen		Kurang Efisiensi waktu pelaksanaan dengan jumlah peserta minilok yang terbatas, sehingga kegiatan minilok terlaksana 90%
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan Elektronik melalui media ruang	1	1		Promosi dan KIE program Bangga telah terlaksana 100% melalui media cetak dan elektronik
				Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	1	1		Telah dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan bangga kencana oleh kades PPKBD dan SubPPKBD di 134 Desa
				Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Dokumen	Dokumen		
					21	21	Tidak Ada	
					Organisasi	Organisasi		

				<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>	100%	100%		
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	268 Orang	268 orang		
				Fasilitasi Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Bernencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan		Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 kali serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan IBANGGA oleh motivator dan penyuluh KB
				<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%		<i>Tersedianya laporan pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya</i>
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan	1 Laporan	Pelaksanaan Kegiatan MKJP MOW tidak dapat dilaksanakan 100%,dikarenakan tidak ada kesesuaian antara Perda Tarif RS dengan Juknis BOKB Non Fisik	Optimalisasi KIE tentang pentingnya peran serta menjadi akseptor KB
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	Belum Optimalnya Penyampaian data oleh tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan	Tersedianya Laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan KB selama 12 bulan

							Kesehatan kepada Operator SIGA Kecamatan	
				<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	100%	100%	<i>Perlu Pembinaan dan Pendampingan Lebih Lanjut</i>	<i>Telah dilaksanakan pemberdayaan dan peningkatan Peran organisasi dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Organisasi	30 Organisasi	Belum Seluruh organisasi dan lembaga kemasyarakatan bersinergi Untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang Pembinaan dan Pelayanan Kesertaan Ber KB	Perlu tindak lanjut lintas OPD untuk meningkatkan kerjasama organisasi kemasyarakatan terkait Pembinaan dan Pelayanan Kesertaan Ber KB
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	134 Kampung KB	134 Kampung KB	Tidak Ada	Klasifikasi Kampung KB yang terbentuk : 36 Dasar.35 Berkembang, 26 Mandiri, 37 Berkelanjutan
8				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	Tidak Ada	Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan yang menunjang Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan target pada tiap sub kegiatan

				<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	100	100	<i>Belum semua jenis kelompok kegiatan ketahanan/kesejahteraan keluarga mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga baik berupa bantuan sarana ataupun kegiatan promosi dan sosialisasi</i>	<i>Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan yang menunjang Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan target pada tiap sub kegiatan</i>
					Orang	Orang		
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	Belum Optimalnya kesertaan Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (POKTAN) dari 13 Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan sosialisasi, terkait Keterbatasan Anggaran.	Terlaksananya Kegiatan HARGANAS Tingkat Kabupaten dan Workshop GenReAKSI oleh Forum GenRe Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat dalam upaya percepatan penurunan Stunting melalui pendewasaan usia perkawinan, dengan peserta sebanyak 280 orang.
					Laporan	Laporan		
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31	31		
					Unit	Unit		
				Penyediaan Biaya Operasional bagi	134	134	Tidak Ada	Terlaksana kegiatan

				Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Desa	Desa		pendampingan keluarga beresiko stunting oleh TPK di 134 Desa/Kelurahan
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	1 Kelompok	Belum terfasilitasinya Lomba untuk Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten dikarenakan Keterbatasan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Lomba Kelompok Kegiatan PIK-R dan Duta GenRe Tingkat Kabupaten, sebagai apresiasi dan stimulan kepada Kelompok Masyarakat pembangunan keluarga dan Individu berprestasi, dengan peserta sebanyak 65 peserat dari 13 Kecamatan.

Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Urusan Pangan; Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 3.13.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANUT REKOMENDASI DPRD
1	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>A <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan :</p> <p>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>B <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan :</p> <p>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>	100%	100%	-	-	-
					6 dokumen	6 Dokumen	-	-	-
					18 orang	18 orang	-	-	-
					1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

	C	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>						
		Sub Kegiatan :						
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket	-	-	-	-
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
	D	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>						
		Sub Kegiatan :						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-	-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-	-
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-	-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	-	-	-	-
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284 laporan	284 laporan	-	-	-	-
	E	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>						

			<i>Pemerintah Daerah</i>					
			Sub Kegiatan :					
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	-	-	-
			2 Pengadaan Mebel	27 unit	27 unit	-	-	-
			3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	-	-	-
			F <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
			Sub Kegiatan :					
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-	-
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	2 laporan	-	-	-
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	-
			G <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
			Sub Kegiatan :					
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit	-	-	-

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	23 unit	-	-	-
<p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p> <p>A Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan :</p>	93,00 skor PPH konsumsi	93,20 skor PPH konsumsi	-	Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan turut mendukung gerakan tersebut dengan menciptakan kreasi masakan berbahan non beras dan terigu, seperti dari talas, singkong dan jagung, sehingga		

			Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi <i>Sub Kegiatan :</i>					
			1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
			2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	2 laporan	-	-	-
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100%	83%	dari buku Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan data dari instansi terkait, ketersediaan beras lokal yang siap dikonsumsi di kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 19.975 ton, hanya 83 % mencukupi terhadap kebutuhan konsumsi beras masyarakat sebesar 24.184 ton	Kekurangan 4.208 ton beras untuk kebutuhan pangan masyarakat Kab. Tanjung Barat dapat ditutupi dari supply beras dari daerah lain. Untuk itu masih perlu strategi dan upaya yang sangat keras dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan guna peningkatan produksi bahan pangan tersebut, sehingga produksi dan ketersediaan	

							(konsumsi beras per orang sebesar 73,05 kg/kapita/tahun)	beras lokal di Kabupaten dapat mencukupi khususnya untuk konsumsi masyarakat Kab. Tanjabbar.	
			A Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Sub Kegiatan :						
			1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	
			B Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :						
			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	-	-	-	

			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80%	80%				
--	--	--	---	-----	-----	--	--	--	--

				A Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :						
				1 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	
				2 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Urusan Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.14.
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Barat Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	86%			
Perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Laporan	7 Laporan				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen				

				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
				Penetapan Wajib Retribusi Daerah	13,100 Dokumen	8,137 Dokumen			
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	78%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,100 Unit	115 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,100 Unit	115 Unit	Kekuatan anggaran untuk melakukan belanja sarana prasarana tidak sebesar pagu anggaran		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			

			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42 Unit	39 Unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37 Unit	37 Unit			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	2 Unit	prioritas kerja saat ini adalah pekerjaan pemeliharaan pada 2 unit gedung kantor		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4 Dokumen	3 Dokumen			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	2 Dokumen			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2 Dokumen	- Dokumen	Terjadi pergeseran anggaran kepada pembuatan KLHS RPJMD untuk mendukung prioritas daerah	Melakukan Tindakan pergeseran sehingga prioritas daerah dapat terakomodir	

				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	66/ 94.6/ 56.5/ 78.4/ 74.8 IKA/ IKU/ IKTL/ IKAL/ IKEG	70.00/95.75/55.9 8/0/0			
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Laporan	2 Laporan			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	80%	80%			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	80%	80%			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20 Ha	20 Ha			
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	18 Unit	18 Unit			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	100%	88%			

			BERACUN (LIMBAH B3)					
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	88%			
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	42%			
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	42%			
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25 Dokumen	4 Dokumen	pada tahun 2024 hanya terdapat 4 proses persetujuan teknis dan rekomendasi yang difasilitasi oleh DLH	berupaya maksimal pada persetujuan teknis dan rekomendasi yang dapat terfasilitasi	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	30 Badan Usaha	10 Badan Usaha	hambatan dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menembus akses yang berat	melakukan pengawasan yang lebih kreatif dan efektif	

			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	2 Orang	2 Orang			
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	90%	90%			
			Pengakuan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data. dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90%	100%			
			Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup. untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	6 Sekolah	6 Sekolah			

				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	3 Pengaduan	3 Pengaduan			
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 Perkara	3 Perkara			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	87%	78%			
				Pengelolaan Sampah	87%	78%			

				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kelompok	6 Kelompok	prioritas kelompok untuk dilakukan sosialisasi pada wilayah prioritas hanya mampu dilaksanakan pada 6 kelompok	Dilakukan inovasi dan efisiensi dalam sosialisasi pada target kelompok	Melakukan inovasi teknologi modern yang mampu menekan volume sampah di TPA, Serta melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dilevel rumah tangga.
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,000 Unit	1,125 Unit			
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	80,000 Ton	40,917 Ton	permasalahan dalam kegiatan ini adalah masih belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan	perlu peningkatan sarana dan prasarana serta efektifitas pengangkutan	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 3.15.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	21 Orang	1. 1 Orang Purna Bhakti 2. 1 orang jabatan eselon II yang masih kosong 3. 1 orang Jabatan fungsional Perencana yang masih Kosong	Telah mengajukan usulan kepada BKPSDM untuk mengisi kekosongan jabatan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%			

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%				
			Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan				

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan				
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	20 Unit				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	24 Unit				
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100% Perekaman, 100% KTP, 60% KIA	99,32% Perekaman, 98,72% KTP, 62,27% KIA.	1. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sesuai kebutuhan	1. Penambahan Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan		
						2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai	2. Pemenuhan kebutuhan pegawai		
						3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi	3. Pendidikan dan Pelatihan		
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%				
			Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan				

2				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99% Akta Kelahiran 0-18 Tahun	93,58% Akta Kelahiran 0-18 Tahun	1.	Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sesuai kebutuhan	1.	Penambahan Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan		
				2.			Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai	2.	Pemenuhan kebutuhan pegawai			
				3.			Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi	3.	Pendidikan dan Pelatihan			
					Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%					
					Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan					

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.16.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
				Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan			
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	Jumlah pegawai ASN 24 orang per Desember 2024 adanya 1 orang pegawai yang meninggal dunia	-	

				Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	146 Paket	146 Paket	-	
				Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	896 Paket	836 Paket	Ada rapat yang dilaksanakan setelah makan siang, sehingga untuk nasi kotak tidak terealisasi	
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1000 Dokumen	795 Dokumen	Koran yang berlangganan Jambi independent, Jambi Ekspres, Tribun Jambi dan cakrawala	-

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	650 Laporan	650 Laporan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	37 unit	37 unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34 unit	34 unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit	3 unit			
				Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 Unit	13 Unit			

				Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13 Unit	13 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Unit	3 Unit			
				Program Penataan Desa	100%	100%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	100%			
				Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	2 Desa	0 Desa	1. Desa Suban batas desa belum selesai 2. Desa Purwodadi Perbup Batas desa belum selesai	Mendorong desa menyelesaikan batas desa	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%			
				Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	114 Desa	114 Desa			
				Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	114 dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	114 dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang	57 orang			

				aparatur pemerintah desa					
				Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa	8 Desa	Beberapa segmen belum sepakat	Mendorong desa menyepakati batas desa	
				Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	100%			

				Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	422 lembaga kemasyarakatan	422 lembaga kemasyarakatan			
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	422 lembaga	422 lembaga			
				Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1 dokumen			

Sumber : Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Barat

8. Urusan Perhubungan; Dinas Perhubungan

Tabel 3.17.
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut DPRD
URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat	Perbub nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Program Penunjang Urusan Pemereintah Daerah Kab/Kota		12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Dok	8 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	3 Dok	3 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	1 Dok	1 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Kartu Inventaris	8 Dok	8 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Diamankan	8 Dok	8 Dok	Tidak Ada Masalah	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Stel	130 Stel	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia Beserta Perlengkapannya	127 Stel	127 Stel	Tidak Ada Masalah	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-

			Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi perkantoran (Kebutuhan Mebeler)	Penambahan Anggaran Belanja	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1404 Kotak	1000 Kotak	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko atau Formulir dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1500 Eksempler	1500 Eksempler	Tidak Ada Masalah	-	-
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang	Penambahan Anggaran Belanja	-

							tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan urusan perhubungan		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Terkelola	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Hitungan Beban Telepon/ Air / Listrik yang terpakai/dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	Perlu dilakukan penambahan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik	Penambahan Anggaran Belanja	-
			Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan/Kendaraan Kantor Kondisi Baik	96 Unit	96 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	32 Unit	32 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-

			Kendaraan Dinas Jabatan						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54 Unit	54 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Atau Lapangan Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-

		Peningkatan aktivitas/konektivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	100%	Tidak Ada Masalah	-	-
		PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 531, 57 HLM	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Paket	8 Paket	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Diuji	1210 Unit	1210 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	6 Paket	6 Paket	Tidak Ada Masalah	-	-
		UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	100%	100%	Tidak Ada Masalah	-	-

			Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	36 Kali	36 Kali	Tidak Ada Masalah	-	-
		PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Operasi	6 Operasi	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	6 Operasi	6 Operasi	Tidak Ada Masalah	-	-
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Masalah	-	-

			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Paket	1 Paket	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung tertib keselamatan pengguna angkutan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100%	100%	Tidak Ada Masalah	-	-

		PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Masalah	-	-

		PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Halte Sungai dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	Tidak Ada Masalah	-	-
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung pengembangan pelabuhan RORO Kuala Tungkal mengingat meningkatnya minat pengguna jasa kepelabuhan (Rehab Ruang Tunggu Penumpang, Rehab Berat Dolphin dan Pengembangan Dermaga dua Pelabuhan RORO Kuala Tungkal)	Penambahan Anggaran Belanja	-

			Pemeliharaan Dermaga Sngai	Jumlah Halte Sungai dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk menjaga prasarana laut kondisi baik yang menjadi penghubung antar desa ke kota	Penambahan Anggaran Belanja	-
--	--	--	----------------------------	--	--------	--------	--	------------------------------------	---

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

9. Urusan Komunikasi dan Informatika; Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.18.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD*
1	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Kominfo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	100%	100%	Masih ada beberapa jabatan struktural / fungsional di Dinas Kominfo yang masih kosong.	Melaporkan ke BKPSDM untuk pengisian beberapa jabatan struktural / fungsional yang masih kosong	
				<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>5 Laporan</i>			
				<i>Sub Keg. Penyusunan Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>			
				Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			
				Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>			
				Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			

				Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			

				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang	12 Bulan	12 Bulan			
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 Unit	19 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung			
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	12 Aplikasi 44 OPD	12 Aplikasi 44 OPD (100%)			

			Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kab. Tanjab Barat;	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44 OPD	44 OPD 100%		
			Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet Kab. Tanjab Barat;	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 OPD	44 OPD 100%		
			"A. Tersedianya subdomain yang dibutuhkan OPDB. Tersedianya pusat data dan informasi elektronik, aplikasi dan Portal Perangkat DataC. Tersedianya Portal Perangkat DaerahD. Tersedianya	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Aplikasi 13 Desa/ Kelurahan 44 OPD	12 Aplikasi 134 Desa/ Kelurahan 44 OPD (100%)	Belum adanya dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berpengaruh pada indeks SPBE Pemkab Tanjab Barat	Mengusulkan dalam Renja dan mengkomunikasikan dengan bidang Data BAPPEDA

			dukungan layanan penggunaan aplikasi SPBE di Lingkungan Pemkab. Tanjab BaratE. Melaksanakan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 Aplikasi	5 Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur yang dimiliki Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum memadai secara optimal . 2. Perubahan Regulasi menyebabkan perlu dilakukan update aplikasi - aplikasi 3. Kekurangan SDM Pengelola Teknologi Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dengan satu perangkat untuk Multi Aplikasi 2. Melakukan Update aplikasi dengan pemanfaatan source gratis atau adopsi aplikasi 3. Memanfaatkan SDM yang tersedia secara optimal 	
--	--	--	--	---	------------	------------	---	--	--

		<p>Internet Lingkup Pemkab. Tanjab Barat F. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik G. Melaksanakan Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Pendukung Penerapan e- Government di Pemkab. Tanjab Barat</p>	<p>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p>	<p>10 Dokumen</p>	<p>10 Dokumen</p>	<p>1. Terdapatnya Organisasi Perangkat Daerah yang belum melakukan Update Informasi Terhadap Portal Yang telah disediakan 2. Kekurangan SDM Pengelola Teknologi Informasi</p>	<p>1. Memberikan Konsultasi Langsung kepada Admin - Admin OPD yang telah ditunjuk 2. Memberi himbauan kepada OPD untuk melakukan update Informasi</p>	
--	--	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	--

				Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	12 Dokumen	12 Dokumen	1. Keterbatasan Anggaran untuk sosialisasi penerapan implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah yang belum Optimal.2. Pemahaman pemanfaatan teknologi masing - masing organisasi perangkat daerah belum optimal	1. Memberikan Monitoring langsung dan bersurat terhadap Organisasi Perangkat daerah terhadap penerapan SPBE2. Memberikan konsultasi dan rekomendasiterhadap Organisasi Perangkat Daerahyang akanmenerapkan pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan Layanan Pemerintah		
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 Media	4 Media				
				<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	4 Media	4 Media				Penempatan Media Informasi mengenai pembangunan dan promosi pemerintah kabupaten

				Sub Kegiatan Monitoring opini dan aspirasi publik	4 Dokumen	4 Dokumen	Belum optimalnya pemahaman OPD dalam merespon pengaduan masyarakat	Meningkatkan pengetahuan OPD khususnya operator yang bertugas memantau pengaduan masyarakat melalui sosialisasi dan bimbingan teknis	dengan menggunakan sarana billboard agar dilakukan secara merata dan menjangkau ke wilayah kecamatan-kecamatan dalam kabupaten. Untuk efektivitas dan efisiensi perlu optimalisasi penggunaan media sosial dan media elektronik lainnya. Yang dapat menasar publik secara cepat dan meluas
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen			

				Sub Kegiatan Pelayanan informasi publik	4 Dokumen	4 Dokumen	Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan informasi publik	Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasaranalayanan informasi publik	Untuk sarana billboard sudah diusulkan dalam Renja Dinas Kominfo Tahun 2024, namun dalam implementasinya belum terlaksana karena prioritas anggaran ke pemenuhan anggaran untuk kerjasama media.
				Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	500 Dokumen	500 Dokumen	Kurangnya SDM di Bidang PKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peningkatan SDM di Bidang PKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan untuk SDM)	Untuk optimalisasi media sosial dan media elektroniknya sudah dilaksanakan dengan memposting setiap kegiatan Pemkab melalui media sosial yang

									dikelola diskominfo lewat Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube. Termasuk di website www.tanjabbar kab.go.id
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	4 Layanan	4 Layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit			
2	Bidang Statistik			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	44 OPD	44 OPD			
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	44 OPD	44 OPD			

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen			
3	Bidang Persandian			ROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	45%	45%			
				PENGAMANAN INFORMASI					
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	44 OPD	44 OPD			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13 Laporan	13 Laporan			

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Perdagangan (Urusan Pemerintahan Pilihan); Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.19.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
	Perindustrian dan Perdagangan			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang			

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	1 Paket			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	25 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	22 Unit	22 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
2.	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan	-	Mengarahkan Koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				

		Perdagangan		ekonomi yang berbasis agribisnis, atau bidang lainnya baik di sektor hulu maupun hilir	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			-		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 unit usaha	50 unit usaha			
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50 unit usaha	60 unit usaha			
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					

				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit Usaha	14 Unit Usaha	Tidak Adanya fasilitas izin dikarenakan tidak adanya pembinaan dari KSP maupun KC/KCP Simpan Pinjam		
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	38 unit usaha	Dalam kegiatan tidak dianggarkan pelaksanaan pembinaan koperasi, penilaian dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan	Melakukan penilaian melalui dokumen laporan koperasi, penilaian dilaksanakan dengan kegiatan lainnya	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					

				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	35 unit usaha	35 unit usaha			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan					
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 unit usaha	3 unit usaha	Kekurangan Anggaran untuk Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	80 unit usaha	15 unit usaha	Kekurangan Anggaran untuk pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		

				Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	200 unit usaha	0	Anggaran untuk pelatihan dan pendampingan memanfaatkan sistem aplikasi pembukuan / mencatat keuangan usaha mikro dan usaha kecil di alihkan ke sub kegiatan belanja pakaian adat daerah yang berupa pakaian teluk belango		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 orang	45 orang	Usulan untuk proposal hibah tidak berkelompok dan alamat yang mengajukan proposal tidak tertera	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi himbuan kepada pelaku usaha yang ingi mengajukan proposal harus memiliki kelompok UMKM - Memberikan Konsultasi bagi yang membuat proposal untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti alamat usaha, izin usaha, NIB, No.HP dan RAB 	

3.	Urusan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Peningkatan Aktivitas perekonomian yang merata dari Desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
			- Dengan memanfaatkan letak strategis yaitu berbatasan dengan pulau Batam, negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Indragiri Hilir- Provinsi Riau), mendorong peningkatan ekspor dengan mengutamakan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen			

				hasil produk olahan dan produk unggulan daerah.					
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat daerah Kabupaten/Kota					
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	12 laporn			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					

				<p>Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p>	<p>48 laporan</p>	<p>Kegiatan untuk penanganan Inflasi terhadap Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan : 1. Melihat kondisi dan situasi ekonomi di lapangan, yang mana untuk tahun 2024, inflasi yang terjadi tidak begitu signifikan dan hanya komoditi cabe yang fluktuatif, harga yang turun naik. 2. Untuk penyaluran dana subsidi perlu payung hukum berupa Peraturan Bupati dan aturan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 pedoman berupa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian</p>	
--	--	--	--	---	-------------------	--	--

							<p>Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok. SK Bupati tentang Penetapan Besaran Harga Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Koordinasi dan Konsultasi kegiatan juga telah kami laksanakan, sampai akhir Desember 2024 dikarenakan situasi tersebut diatas, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan/laksanakan</p>		
				<p>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</p>					

				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha			
				PROGRAM STANDASISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan					
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	950 unit	803 unit	Dalam beberapa tahun ini belum maksimalnya Kegiatan ini dikarnakan Kekurangan nya Pagu Anggaran dan Kurangnya kesadarnya masyarakat untuk menerakan UTTP nya	Kekurangan Anggaran	

				Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	125 orang	106 orang	Dalam beberapa tahun ini belum maksimalnya Kegiatan ini dikarnakan kurang pagu Anggaran, Jadi kami sangat kesulitan untuk melaksanakan Penyuluh dan Pengawasan Baik Pengawasan Barang Terbungkus (BDKT) dan Pengawasan tera teraulang yang sudah di tera /belum di tera	Kekurangan Anggaran	
4.	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	Percepatan Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	40 Dokumen	40 Dokumen		

			- Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7 Dokumen	7 Dokumen			
			pengolahan dari bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	40 Dokumen	40 Dokumen			
			hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, melalui penawaran kelengkapan infrastruktur pendukung, birokrasi yang efektif dan efisien serta situasi yang kondusif.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Naskah Akademik RPIK, 1 Ranperda RPIK	1 Ranperda RPIK Belum di Sahkan oleh badan legeslatif daerah	Telah mengajukan nota dinas pembahasan ke DPRD Th 2024 sudah di daftarkan di dalam badan	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas					

				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	43 Dokumen	48 Dokumen			
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	10 Dokumen	10 Dokumen			

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tanjung Jabung Barat

11. Urusan Penanaman Modal; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.20.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN*)	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	99,99%	-	-	-
				<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan	-	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-

				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	100 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 Paket	1000 Paket	-	-	-
			Memenuhi kebutuhan sarpras	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	701 Laporan	-	-	-
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130 Paket	130 Paket	-	-	-
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</i>	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-

			Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		Memenuhi kebutuhan sarpras		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	19 Unit	19 Unit	-	-	-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit	-	-	-
2			Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	-	-	-
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	1 Perda	-	-	-
3			Meningkatkan layanan promosi dan investasi	Program Promosi Penanaman Modal	2	2	-	-	-
				<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>2 Calon Investor</i>	<i>2 Calon Investor</i>	-	-	-
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-

				Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
4			Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	5.229 Izin	-	-	-
				<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>2000 Izin</i>	<i>5.229 Izin</i>	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	4.688 Pelaku Usaha	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha sehingga meningkatnya pelayanan perizinan	-	-
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	400 Pelaku Usaha	541 Pelaku Usaha	Meningkatnya Pelayanan Perizinan menyebabkan meningkatnya pemantauan Pelaku usaha	-	-
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	57 Pelaku Usaha	57 Pelaku Usaha	-	-	-

				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
5			Meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	370 Milyar	554,64 Milyar	-	-	-
				<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>370 Milyar</i>	<i>554,64 Milyar</i>	-	-	-
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	-	-	-
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	Peningkatan Peserta Bimbingan Teknis dikarenakan meningkatnya minat Pelaku Usaha serta kegiatan ini mendapatkan bantuan pendanaan DAK		

				Pengawasan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	Peningkatan Pengawasan Penanaman Modal ditingkatkan untuk peningkatan realisasi investasi	-	-
6				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-
				<i>Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>	-	-	-
				Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Urusan Pariwisata (Urusan Pemerintahan Pilihan); Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 3.21.
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PARIWISATA	DISPARPORA	Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	60.000 Orang	444.474 Orang			
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Kawasan	4 Kawasan			
				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota	5 Unit	5 Unit			
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Lokasi	1 Lokasi			
				Pengembangan Destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Lokasi	1 Lokasi			

				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100%	100%			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Media	3 Media			
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	30%	13.64%	Banyak Pelaku Ekraf yang melakukan inovasi dan kreasi namun belum berdaya saing.	Terus melakukan pendampingan terhadap pelaku Ekraf.	
				Penyediaan Pasarana (Zona Kreatif/RuangKreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	5 Inovasi	12 Inovasi			
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	3 Unit	3 Unit			

				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	20 Orang	21 Orang			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa Bagi Masyarakat, uru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	20 Orang	30 Orang			
				Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	21 Orang			
KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA	DISPARPORA	Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.000 Orang	5.894 Orang	Belum tersusunnya data base kepemudaa, sehingga peningkatan kepemudaan masih terfokus diibukota kecamatan.	Melakukan roadshow dan pendataan pemuda ke desa dan kelurahan.	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha	381 Orang	390 Orang			

				Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	26 Orang	26 Orang			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	350 Orang	364 Orang			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1 Kwardcab	1 Kwardcab			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 Orang	107 Orang			
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	45 Medali	125 Medali			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	75%	60.02%	Meningkatnya antusias atlit muda untuk bergabung kecabang olahraga, namun kegiatan	Koordiansi kepengurus cabang olahraga untuk memaksimalkan pembinaan atlit muda kesekolah-	

							pembinaan olahraga sangat terbatas.	sekolah.	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	22 Unit	22 Unit			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	45%	20.78%	Tidak tercapainya target tersebut karena meningkatnya atlet muda yang bergabung pada beberapa cabor, dimana jumlah atlet awal tahun sebanyak 589 orang bertambah menjadi 948 orang.	Terus meningkatkan koordinasi pada setiap cabor untuk meningkatkan kemampuan atlet agar mampu berdaya saing.	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota	4 Dokumen	5 Dokumen			
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	178 Orang	227 Orang			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	37 Cabor	40 Cabor			

				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	45 Orang	167 Orang			
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	80 Orang	132 Orang			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8 Cabor/ Inorga	10 Cabor/ Inorga			
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	7 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	77	85.21			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dokumen/ laporan	40 Dokumen/ laporan			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3 Laporan	2 Laporan			

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan		Dokumen perubahan telah disusun sebelum melakukan laporan Prognosis. Sehingga tidak efisien dan efektif untuk penyusunan laporan prognosis.	Pergeseran pada setiap kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan melakukan reschedule perencanaan, agar anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien.	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	95%	95%			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Komponen Instalasi	10 Paket	10 Paket			

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	6 Dokumen		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	19 Unit		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit		
				Pengadaan dan Peralatan Mesin lainnya	11 Unit	11 Unit		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	36 Laporan		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa	12	12 Laporan		

				Pelayanan Umum Kantor	Laporan				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Kendaraan	14 Kendaraan			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung			

Sumber : Dinas Parpora Kab. Tanjung Jabung Barat

13. Urusan Perpustakaan; Urusan Kearsipan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 3.22.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah Perpustakaan dan Kearsipan yang efektif, efisien dan transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	100%	100%	Kurang maksimalnya kinerja disebabkan oleh kurangnya SDM yang berkompeten serta support anggaran yang kurang memadai.	Perlu peningkatan kompetensi SDM perencana, SDM perpustakaan, dan SDM kearsipan serta support anggaran.	
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak adanya pejabat fungsional perencana sehingga kurang optimalnya kinerja dalam kegiatan perencanaan.	Perlunya penambahan pejabat fungsional perencana yang potensial dan berkompeten dibidangnya.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Sumber Daya Manusia yang ada belum mencukupi dan potensial serta support pagu anggaran yang memadai	Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia dan alokasi pagu anggaran.	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 OB	24 OB			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			

				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	14 Laporan			
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 Paket	55 Paket			
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Paket	4 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik kantor	4 Paket	4 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket			
				Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Masih kurangnya Anggaran perjalanan Dinas.	Untuk perjalanan Dinas perlu dialokasikan tambahan pagu anggaran dikarenakan seringnya undangan dari Perpusnas dan ANRI yang harus dihadiri terkait Rakor, Bimtek, Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sehingga membutuhkan biaya perjalanan Dinas yang maksimal.	
				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1. Pengadaan sarana/ prasarana perlu perencanaan yang matang serta support anggaran yang memadai.	Meningkatkan SDM pejabat pengelola pengadaan sarana/ prasarana.	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	2. Pengadaan Kendaraan Dinas (usia kendaraan Dinas yang sudah tua dan kondisi fisik kendaraan)	2. Alokasi Anggaran Untuk Kendaraan Dinas	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15 Unit			
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

				Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 Unit	10 Unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	3 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			

2	Urusan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Pengelolaan, pelayanan, pengembangan otomasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan yang prima dalam rangka meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Akreditasi B	Akreditasi C	<p>1. Pada Tahun 2024 Perpustakaan Nasional tidak menganggarkan anggaran untuk akreditasi perpustakaan umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, akreditasi dilaksanakan untuk Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan (Hal ini sesuai dengan Surat Perpustakaan Nasional Nomor :B.2196/4/PPM.02/V.2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Akreditasi Perpustakaan. 2. Dinas perpustakaan sudah mengajukan anggaran perubahan untuk Re-akreditasi perpustakaan ditahun 2024 (Dilakukan secara mandiri, semua biaya ditanggung oleh Perpustakaan Umum) tetapi tidak disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</p>	Re-akreditasi perpustakaan mandiri akan dilakukan ditahun 2025 dan akan mengajukan kembali anggaran pada APBD-P Tahun 2025.	
---	----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	---	---	--

				1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Anggaran untuk pelaksanaan Akreditasi Mandiri telah diusulkan pada APBD P Tahun 2024 tetapi belum dapat disetujui dan terakomodir ditahun 2024.	akan diusulkan anggaran untuk Akreditasi Mandiri pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025	
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	500 Layanan	11.407 Layanan	Pengunjung layanan perpustakaan elektronik telah melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan 1. Perkembangan dunia teknologi yang disesuaikan dengan perkembangan generasi pengguna(Pemustaka) pada saat ini. 2. Perubahan prilaku masyarakat dan pemustaka sudah melek Literasi Digital hal ini dikarenakan Perpustakaan umum telah melakukan sosialisasi dan Promosi yang efektif. Permasalahan pada kegiatan ini adanya kendala teknis pada server.	Telah dilakukan maintenace setiap tahunnya, dan dilakukan migrasi keserver lainnya dan pengembangan pada layanan perpustakaan elektronik yaitu penambahan fitur yaitu layanan audio book untuk pemustaka disabilitas.	
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan			

				Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1200 Eksemplar	1434 Eksemplar			
				2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota	25 desa/kel	25 desa/kel			
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25 lokus	25 lokus			
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 perpustakaan	3 perpustakaan			
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 Orang	6 Orang			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan			
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2 Naskah	1 Naskah			
				1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2 Naskah	2 Naskah			

				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	2 Orang	kurangnya peranaktif masyarakat yang menyimpan Naskah Kuno untuk melaporkan kepemilikan Naskah Kuno ke Dinas Perpustakaan	Akan disosialisasikan kembali tentang pelestarian naskah kuno di Tahun 2025	
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	Akan dilaksanakan pengalihmediaan dan Alih Aksara Naskah Kuno pada Tahun 2025	Akan disosialisasikan kembali tentang pelestarian naskah kuno di Tahun 2025	
3	Urusan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Jumlah Arsip/Dokumen Daerah yang Dilestarikan dan Diselamatkan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100%	353%		Adanya Peningkatan Pengelolaan Arsip dari OPD, dan sudah mengaplikasikan aplikasi Srikandi di kabupaten Tanjung Jabung Barat	
				1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	2.500 Berkas	18.191 Berkas			
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2.500 Berkas	18.191 Berkas			
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.500 Berkas	18.191 Berkas			
				2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	5.000 Arsip	8.314 Arsip			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip	5.000 Arsip	8.314 Arsip	Karena telah dilakukan akuisisi dari pencipta arsip		

				Statis					
				3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	500 Pengguna	Karena telah dilakukan sosialisasi aplikasi SIKN-JIKN sehingga meningkatnya jumlah pengguna yang mengaksesnya		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat

c. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan; Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.23.
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIAJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUPUT))	CAPAIAN TAHUN 2024		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAKL ANJUT REKOME NDASI DPRD
						TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
I.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Peningkatan Nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%			
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disusun</i>	4 Jenis	4 Jenis			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen			

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji/Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan	14 Bulan	14 Bulan			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji/Tunjangan	18 Orang	17 Orang	Terjadinya Pengurangan ASN karena adanya Mutasi dan Pensiun	Melakukan upaya Pelaporan dan permohonan penambahan ASN ke BKPSDM Kabupaten	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honor Pengelola Keuangan	14 Orang	14 Orang			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai ASN yang disiplin	100%	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	120 stell	120 stell			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Komponen Listrik yang disediakan sesuai kebutuhan	8 Macam	8 Macam			

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Snack yang disediakan (Kotak)	400 Kotak	400 Kotak			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan	7 Macam	7 Macam			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat dan konsultasi OPD	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Air	12 Bulan	12 Bulan			
					Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Macam ATK yang disediakan sesuai kebutuhan	40 Macam	40 Macam			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Macam Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Macam	12 Macam			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Penyediaan BBM Peralatan Mesin dan Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan- mesin gedung kantor yang dipelihara	22 Unit	22 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang direhabilitasi sesuai dengan kebutuhan	1 Unit	1 Unit			
II.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Peningkatan Kapasitas	DINAS PERIKANAN	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	113	113.50	Angka sementara		

			Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Berkelanjutan		Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah	36.15	36.2	Angka sementara		
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.053 Ton	24053,76 Ton	Data produksi Perikanan Tangkap Belum Validasi Tingkat Provinsi dan Pusat (KKP)	Akan dilakukan Validasi menunggu Jadwal Validasi dari Provinsi dan Pusat (KKP)	
				<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</i>	6 Jenis	6 Jenis			
				Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Tangkap yang valid dan terbaru yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Alat Tangkap Ramah lingkungan yang disediakan	75 Piece	75 Piece			
				<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kelompok Nelayan yang Mandiri</i>	4 KUB	4 KUB			

				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan, pendampingan Asuransi Nelayan dan kartu KUSUKA	430 Orang	603 Orang	Peningkatan minat pelaku usaha pada program KUSUKA		
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang difasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	100 Orang	100 Orang			
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produk Perikanan Budidaya	1248 Ton	1137,5 Ton	Harga Pakan ikan terus meningkat sehingga Pembudidaya mengurangi jumlah tebar benih Prasarana pembudidaya yang ada belum dikelola secara optimal.	Meningkatkan akses permodalan dan SDM Kultur bagi pembudidaya ikan	
								Prasarana pembudidaya yang ada belum dikelola secara optimal.		
				<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan fasilitas pembentukan, pengembangan kelembagaan, Bimtek dan</i>	5 Kelompok	6 Kelompok			

					pelatihan CBIB /CPIB dan Pelatihan Pembuatan pakan Ikan					
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang difasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok			
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bimtek, Pelatihan Budidaya Ikan dan pelatihan Pembuatan pakan ikan	80 Orang	60 Orang	Budidaya ikan masih menjdai hasil sampingan bagi petani, sehingga minim peminat untuk budidaya ikan	Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang budidaya ikan kepada masyarakat	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produktifitas Usaha Budidaya	2.5	2.2			
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang valid dan terbaru yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan	4 Paket	4 Paket			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah sarana perikanan budidaya yang disediakan	8 jenis	8 Jenis			

				Kabupaten/Kota						
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan peningkatan kualitas air, obat-obatan dan vitamin ikan yang disediakan	3 Jenis	3 jenis			
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Jumlah penerima manfaat percontohan budidaya ikan	4 Kelompok	4 Kelompok			
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	6 Lokasi	6 Lokasi			
				<i>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pengawasan dan pembinaan Sumberdaya perikanan tangkap di perairan umum</i>	6 kali	6 Kali			
				Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap di perairan umum	6 Kali	6 Kali			

			Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	2480 Ton	1.038 Ton	Sub jenis kegiatan pengolahan pada kelompok pengolah berkurang, berkurangnya daya beli masyarakat	Peningkatan SDM melalui Diversifikasi Perikanan	
				<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbaru yang disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbaru yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan penerapan persyaratan mutu hasil perikanan</i>	5 Kegiatan	5 Kegiatan			

				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standard pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha/masyarakat perikanan yang mendapatkan bimbingan/pelatihan dan pendampingan usaha	150 Orang	150 Orang			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan	400 Orang	400 Orang			

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Pertanian; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 3.24.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	DTPH	Mewujudkan kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7 Dok.	7 Dok.			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok.	5 Dok.			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang	68 Orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	191 Stel	191 Stel			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan							

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket/Buku	15 Paket/Buku			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Paket/Buku	36 Paket/Buku			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167 Kotak	167 Kotak			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
			Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102 Unit	102 Unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88 Unit	88 Unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit			

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
	DTPH	Penyediaan, Pengembangan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian, - Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	P=1,99%, J=1,97%, K.Tnh=3%, U.Kayu=2%, U.Jalar=1,88%	P=0, J=356%, K.Tnh=0, U.Kayu=0, U.Jalar=1688%	Tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan, disebabkan terbatasnya anggaran.	Penambahan Anggaran. Menggalakan para petani untuk serentak melakukan Tanam padi Pada Musim April September	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2%	-	Minimnya petani melakukan Tanam padi Pada Musim April September		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan			
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan			
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	P=1,99%, J=1,97%, K.Tnh=3%, U.Kayu=2%, U.Jalar=1,88%	P=0, J=356%, K.Tnh=0, U.Kayu=0, U.Jalar=1688%	Tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan, disebabkan terbatasnya anggaran. Minimnya	Penambahan Anggaran. Menggalakan para petani untuk serentak melakukan Tanam padi Pada Musim April September	

							petani melakukan Tanam padi Pada Musim April September		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1 VUB	-	Anggaran dan SDM tidak mendukung	Penambahan Anggaran dan dukungan SDM yang memadai	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	64.45	64.45			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	24	24			
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	40.45	40.45			
				Pembangunan, Rehabilitas, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4 Unit	4 Unit			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	5 Unit	5 Unit			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15 Unit	15 Unit			

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	3 Unit	3 Unit			
		DTPH	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	29%	29%		
			Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2 .500 Ha	2.500 Ha		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 .000 Ha	1.000 Ha			
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 .500 Ha	1.500 Ha			
		DTPH	Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	25%	25%		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	13 BPP	13 BPP		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Unit	1 Unit			
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit			

Sumber : DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Pertanian; Dinas Perternakan dan Perkebunan

Tabel 3.25.
Dinas Perternakan dan Perkebunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN*	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOME NDASI DPRD*
		DISBUNAK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dok	13 dok	-	-	-
		DISBUNAK		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	8 dok	-	-	-
		DISBUNAK		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
		DISBUNAK		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	-	-	-

		DISBUNAK		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
		DISBUNAK		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit			
		DISBUNAK		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	-

		DISBUNAK		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.80%	Adanya kendaraan dinas yang tidak dioperasikan oleh penanggung jawab	Akan dilakukannya pengalihan penanggung jawab kendaraan tersebut	
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 unit	27 unit	Adanya kendaraan dinas yang tidak dioperasikan oleh penanggung jawab	Akan dilakukannya pengalihan penanggung jawab kendaraan tersebut	-
		DISBUNAK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit	19 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 unit	26 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	-	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit = 1.8 %, Karet = 0.6 %, Kelapa Dalam = 1.0 %, Kopi = 0.6 %, Pinang = 1.2 %	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit = 1.7 %, Karet = 0.2 %, Kelapa Dalam = 1.0 %, Kopi = 0.4 %, Pinang = 1,0 %	Untuk komoditi kelapa sawit sebagian besar sedang melaksanakan Replanting Kelapa Sawit dan mengalami track, untuk komoditi karet berkurang karena luasannya yang berkurang, dan komoditi pinang karena harga turun maka pekebun tidak memanen buah pinang yang sudah kuning/matang dan sebagian besar pekebun melakukan	Memberikan penyuluhan kepada pekebun agar tetap melaksanakan pemupukan sesuai anjuran teknis dan melaporkan ke dinas atau PPL jika ada terjadi serangan OPT yang bisa mengakibatkan tanaman menjadi rusak dan mati	-

					Kebuntingan Sapi = 73 %	Kebuntingan Sapi = 73 %	panen pinang muda		
		DISBUNAK		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	3 VUB	3 VUB	-	-	-
		DISBUNAK		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
		DISBUNAK		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

		DISBUNAK		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	800 ekor dan 0.8 ton	732 ekor dan 9 ton	Menyesuaikan anggaran dinas dan untuk capaian sub kegiatan dari anggaran APBD tercapai 502 ekor dan 230 ekor dari Pokir, Dumisake dan APBDP Prov. Jambi sehingga total realisasi target 732 ekor begitu juga dengan pakan ternak dari target 0,8 ton tercapai realisasi sebanyak 9 ton dari dana Pokir, Dumisake dan APBDP Prov. Jambi	-	-
		DISBUNAK		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	502 ekor	732 ekor	Untuk anggaran APBD target tercapai sebanyak 502 ekor, namun tahun 2024 ini mendapatkan bantuan ternak yang bersumber dari Pokir DPRD Prov. Jambi sebanyak 57 ekor (17 ekor kambing, 40 ekor sapi), Kegiatan Dumisake Prov. Jambi sebanyak 5 ekor sapi, APBDP dari DTPHP sebanyak 21 ekor sapi, CSR PT. Petrochina sebanyak 60 ekor (30 ekor kambing dan 30	-	-

							ekor domba) dan fasilitas 20 % dari perusahaan sebanyak 33 ekor sapi dan kambing sebanyak 54 ekor sehingga total keseluruhan sebanyak 732 ekor		
		DISBUNAK		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,25 ton	9 ton	Untuk anggaran APBD target tercapai sebanyak 0,25 ton, namun ditahun 2024 ini juga mendapatkan bantuan pakan ternak dari Pokir DPRD Prov. Jambi sebanyak 4.900 kg, Kegiatan Dumisake Prov. Jambi pakan ternak sebanyak 550 kg, APBDP dari DTPHP Prov. Jambi sebanyak 3.300 kg sehingga total keseluruhan 9.000 kg atau 9 ton	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	23%	23%	-	-	-
				Pengembangan Prasarana Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	600 ha	587 Ha	Adanya berkas permohonan dari kelembagaan pekebun yang masuk pada akhir	Permohonan akan diproses hingga penerbitan STDB pada tahun	-

							bulan Desember 2024 sehingga tidak cukup waktu untuk di proses penerbitan STDB nya.	anggaran 2025	
		DISBUNAK		Pembangunan Prasarana Pertanian	9 unit	6 unit	Anggaran menyesuaikan pagu dinas tahun 2024	Akan mengusulkan kegiatan dari sumber pendanaan lainnya seperti APBN dan BPDP	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2 unit	2 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4 unit	1 unit	Tidak terlaksananya Pembangunan Olah Pakan Silase sebanyak 3 unit di karenakan Juknis keluar di Bulan Juni 2024 dan terdapat kesalahan kode rekening belanja sementara tidak cukup waktu untuk melakukan MP karena pembahasan APBD Perubahan (murni) 2024 dipercepat sedangkan pelaksanaan Perubahan APBD 2024 melewati batas akhir kontrak pengadaan (21 Juli 2024)	Melakukan koordinasi dengan DTPHP Prov. Jambi dan Kementerian Pertanian terkait dana DAK Fisik	-
		DISBUNAK		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3 unit	3 unit		-	-

		DISBUNAK		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.5%	1.5%	-	-	-
		DISBUNAK		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	1 laporan	1 laporan	-	-	-

				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan	-	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
		DISBUNAK		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 ha	230 Ha	Adanya permohonan dari kelompok tani yang melebihi target dan anggaran dinas untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman sementara pekebun sanggup atau bersedia menyediakan bahan-bahan atau obat-obatan sendiri sehingga petugas teknis dinas mengajarkan dan mengedukasi cara penerapan pemakaian obat-obatan sesuai anjuran teknis	-	-

		DISBUNAK		Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	30 ha	30 ha	-	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	750 STDB	605 STDB	Anggaran APBD Tahun 2024 tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan untuk menerbitkan 750 STDB	Mengusulkan penambahan anggaran	-
		DISBUNAK		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	80.67%	-	-	-
		DISBUNAK		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
		DISBUNAK		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	30%	30%	-	-	-
		DISBUNAK		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	12 unit	12 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10 unit	10 unit	-	-	-
		DISBUNAK		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 unit	2 unit	-	-	-

Sumber : Dinas Perternakan dan Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat

d. URUSAN PENUNJANG

1. Urusan Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah

Tabel 3.26.
 Sekretariat Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Tahun Anggaran 2024

NO	Urusan Pemerintah	OPD	Kebijakan	Program/Kegiatan	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Penunjang Pemerintah	Sekretariat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok.	4 Dok.			
				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.			

				Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.			
				Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
				Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	132 Orang/bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok.	1 Dok.			
				Sub. Keg. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok.	1 Dok.			
				Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	2 Dok.			
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			

		Bagian Umum		Keg. Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	5 Paket			
				Sub. Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok.	3 Dok.			
		Bagian Umum		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket			
				Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan			
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			

		Bagian Umum		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	21 Unit			
				Pengadaan Mebel	2 Paket	2 Paket			
				Pengadanaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89 unit	89 unit			
		Bagian Umum		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
		Bagian Umum		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145 Unit	145 Unit			
				Sub. Keg. Pemeliharaan Mebel	325 Unit	325 Unit			
				Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	625 Unit	625 Unit			

				Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Unit	15 Unit			
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			
				Sub. Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Paket	6 Paket			
		Bagian Umum		Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket			
				Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga Sekretaris Daerah	3 Paket	3 Paket			
		Bagian Organisasi		Keg. Penataan Organisasi	100%	100%			
				Sub. Keg. Pengelolaan dan Analisis Jabatan	3 Dok.	3 Dok.			

				Sub. Keg. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan			
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dok.	2 Dok.			
		Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan		Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%			
				Sub. Keg. Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub. Keg. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub. Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
		Bagian Tata Pemerintahan		Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%			
				Sub. Keg. Penataan Administrasi Pemerintah	4 Dok.	4 Dok.			
				Sub. Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dok.	2 Dok.			
				Sub. Keg. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dok.	3 Dok.			
		Bagian Kesejahteraan Rakyat		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%			
				Sub. Keg. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	8 Dok.	8 Dok.			

				Sub. Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9 Dok.	9 Dok.			
				Sub. Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 Dok.	3 Dok.			
		Bagian Hukum		Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100%			
				Sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4 Dok.	4 Dok.			
				Sub. Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus			
		-		Sub. Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5 Dok.	5 Dok.			
		Bagian Kerjasama		Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%			
				Sub. Keg. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	3 Dok.	3 Dok.			
		-		Sub. Keg. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	2 Dok.	2 Dok.			
		-		Sub. Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	5 Lap.	5 Lap			
				Program Perekonomian dan Pembangunan					
		Bagian Ekonomi		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	100%			

				Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen			PT. BPR Tanggo Rajo telah melakukan beberapa langkah dalam hal terobosan dan inovasi dalam membangun tingkat kepercayaan masyarakat yaitu dengan :
				Sub. Keg. Pengendalian dan Distruksi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan			a. BPR sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas IT melalui perubahan core banking system dari yang semula berbasis di Bukittinggi Padang Sumbar sekarang sudah berubah ke berbasis teknologi yang lebih baik dari

									sebelumnya di Bandung dimana saat ini masih tahap progres penyesuaian.
				Sub. Keg. Perencanaan dan Pengawas Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen			b. BPR sedang melakukan peninjauan dengan beberapa vendor untuk mesin ATM, diharapkan kedepan apabila sistem dan keuangan BPR memadai serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh OJK, BPR akan berupaya untuk pengadaan ATM atau mobile banking.

		-		Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan BLUD	1 Dok.	1 Dok.			selanjutnya Pemerintah Daerah akan mendorong BPR untuk pengembang an inovasi dalam pembiayaan kepada UMKM
		-		Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dok.	1 Dok.			Pemerintah Daerah bersama BPR telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan salah satu direktur, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian perdamaian pelaksanaan petusan kasasi MA RI nomor 4374 K/Pdt/2023 dimana para pihak telah bersepakat untuk berdamai

									dan Pemerintah Daerah telah memenuhi dan membayar hak yang bersangkutan serta pemulihan kembali jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur sesuai dengan kesepakatan
		-							Terdapat peluang besar dalam pengembangan BUMD dan potensi deviden yaitu dengan pengelolaan PI 10% migas, namun berdasarkan ketentuan pengelolaan PI 10% dimaksud melalui BUMD Provinsi Jambi,

									terkait hal tersebut Pemerintah Daerah bersama JBS selalu intens melakukan koordinasi percepatan kepada Pemerintah dan BUMD Provinsi Jambi dalam rangka percepatan realisasi PI 10% dimaksud.
		Bagian Administrasi Pembangunan		Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%			
		-		Sub. Keg. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	1 Dok.	1 Dok.			
		-		Sub. Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan			
		-		Sub. Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan			
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%			

		-		Sub. Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	500 Paket Tender	500 Paket Tender		-	
		-		Sub. Keg. Pengeloaan Pengadaan secara Elektronik	2 Server	2 Server		-	
		Bagian Sumber Daya Alam		Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%			
		-		Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dok.	1 Dok.			
		-		Sub. Keg. Koordinasi, Sinkroniasasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dok.	1 Dok.			
		-		Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan Air	1 Dok.	1 Dok.			

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD

Tabel 3.27.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN*	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Set.DPRD	-	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	100%	100%			
	Set.DPRD	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	26 Laporan	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
	Set.DPRD	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
	Set.DPRD	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34 Orang	34 Orang	Tidak Ada		

Set.DPRD	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
Set.DPRD	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
Set.DPRD	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	3 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln			
Set.DPRD	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

Set.DPRD	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
Set.DPRD	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38 Unit	38 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	27 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14 Unit	14 Unit	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	2 Ha	2 Ha	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bln	12 bln			
Set.DPRD	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35 Orang	35 Orang	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Layanan Administrasi DPRD	12 bln	12 bln			
Set.DPRD	-	Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2 Paket	12 Laporan	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Set.DPRD	-	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2 Dokumen			

	Set.DPRD	-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	9 Dokumen	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) Ranperda, 7 (Tujuh) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD, dan hanya 9 (Sembilan) Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda, 1 Ranperda akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.	Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025	
	Set.DPRD	-	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	7 Dokumen	3 Dokumen	Berdasarkan usulan Raperda yang disampaikan oleh Legislatif pada Tahun 2024 hanya 3 Raperda.	Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025	
	Set.DPRD	-	Pembahasan Kebijakan	2	2 Dokumen			

		Anggaran	Dokumen				
Set.DPRD	-	Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%			
Set.DPRD	-	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%			
Set.DPRD	-	Pendalaman Tugas DPRD	35 org	35 Orang	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Publikasi dan dokumentasi dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli	10 Orang	10 Orang	Tidak Ada		
Set.DPRD	-	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%			

	Set.DPRD	-	Pelaksanaan Reses	2 kali	2 kali	hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pada pasal 87 ayat 3 berbunyi Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.	Tetap dianggarkan 3 kali untuk tahun 2025	
	Set.DPRD	-	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	-				
	Set.DPRD	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen		Selama tahun 2024 terkait Penyusunan Kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terjadi Perubahan atau perbaikan kode etik yang memerlukan penyelesaian.	Tetap dianggarkan sebagai antisipasi Perubahan atau perbaikan terkait kode etik yang mungkin saja timbul.	

	Set.DPRD	-	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		Selama tahun 2024 terkait Kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut yang memerlukan penyelesaian.	Tetap dianggarkan sebagai antisipasi permasalahan terkait kode etik yang mungkin saja timbul.	
	Set.DPRD	-	Fasilitasi Tugas DPRD	100%				
	Set.DPRD	-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
	Set.DPRD	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Set DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat

e. URUSAN PENDUKUNG

1. Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.28.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dok	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	5 Lap	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			

	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	1. Mutasi ASN 2. ASN Purna Tugas	Akan menyesuaikan Kembali dengan jumlah ASN	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	76	Menggunakan Target Renstra	Akan menyesuaikan Kembali Target di DPA	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Terdapat Masalah	-	-

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Terdapat Masalah	-	-
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Terdapat Masalah	-	-
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dok	12 Dok	Tidak Terdapat Masalah	-	-
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	Tidak Terdapat Masalah	-	-
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit	Tidak Terdapat Masalah		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	Tidak Terdapat Masalah	-	-

	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30 Unit	33 Unit	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 Unit	150 Unit	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Terdapat Masalah	-	-
2.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG	BAPPEDA Kab. Tanjung		Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Tidak Terdapat	-	-

	URUSAN PEMERINTAHAN	Jabung Barat					Masalah		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	319 Dokumen	319 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-

3.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92%	92%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92%	92%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	2 Laporan	2 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-

	PEMERINTAHAN			Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92%	92%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	Tidak Terdapat Masalah	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Terdapat Masalah	-	-

4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Inovatif	Inovatif			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	20 >	20 >			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Terdapat Masalah	-	-

Sumber : Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Keuangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.29.
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	94.81%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 Paket	90 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	113.65%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424 Laporan	441 Laporan	Pada sub kegiatan ini laporan perjalanan dinas melebihi dari target kinerja tahun 2024		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.00%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86.54%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	8 Dokumen	Pada sub kegiatan ini untuk belanja bahan bakar minyak genset dan belanja tagihan air tidak dapat terealisasi 100%	Kegiatan ini bersifat rutin menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak diperlukan penyelesaian masalah	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75.96%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	25 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93 Unit	62 unit	Pada sub kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan saja sehingga terjadinya efisiensi anggaran kegiatan	Kegiatan ini bersifat rutin menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak diperlukan penyelesaian masalah	
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit			
			Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	95%			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%			

				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen			
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	44 Dokumen			
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	44 Laporan	44 Laporan			
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	44 Dokumen			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	44 Dokumen			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%			
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	24 Dokumen	24 Dokumen			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			

				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80%			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	-	Tidak adanya pengeluaran untuk keadaan darurat dan mendesak yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya	Terkait dengan pengeluaran Bantuan Tidak Terduga harus dilakukan inventarisir kriteria darurat dan mendesak yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati tentang pengelolaan belanja tidak terduga yang saat ini sedang berproses di OPD terkait.	
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan			
			Profesionalisme pengelolaan Aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen			

				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan			
				Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan			
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			

Sumber : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Keuangan; Badan Pendapatan Daerah

Tabel 3.30.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.00%			
			untuk mendukung pelayanan publik yang efektif	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	3 Paket	3 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Mebel	52 Unit	52 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 Unit	40 Unit			

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91 Unit	91 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.16%	11.40%			
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	111,945,600,000.00	141,768,284,928.34			
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan			
				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2500 Obyek Pajak	2.936 Obyek Pajak	Adanya program PTSL oleh Pemerintah Pusat sehingga		

							terjadi kenaikan jumlah permohonan BPHTB		
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	66 Layanan	Terjadinya kenaikan jumlah permohonan kepengurusan pajak daerah		
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen	35 Dokumen			
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	16 Laporan			

Sumber : Bapenda Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Urusan Kepegawaian; Urusan Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tabel 3.31.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%			
				Nilai Sakip OPD	62	70.1			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85.7			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen			

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	27 Orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 Paket	56 Paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	160 Paket	160 Paket			

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3020 Paket	3020 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800 Paket	800 Paket			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50643 Paket	50643 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63 Unit	63 Unit			

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	21 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 Unit	40 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	33 Unit			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	7 Unit			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Indeks Profesionalitas ASN	73	N/A	Belum Final Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari BKN terkait	Berkoordinasi dengan BKN terkait penilaian Indeks Profesionalitas ASN	

							Indikator dalam penilaian		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.3	13.9			
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	9.7	32.8			
				Persentase Jabatan Sesuai Kompetensi	92	82.9	Tidak terpenuhinya persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yaitu: Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Cultral	Mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan	
				Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	80	80.8			
				Tingkat Penurunan Pelanggan Disiplin	25	75			

				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	162 Dok	171 Dok			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4 Dokumen	Dikarenakan Proses Pengadaan ASN dan PPPK tahun 2024 masih tahap proses pelaksanaan hingga tahun 2025, sehingga perencanaan kebutuhan pengadaan untuk tahun 2025 belum diusulkan.	Melakukan rapar Intern terkait perencanaan kebutuhan pengadaan tahun 2025 berdasarkan formasi yang belum terisi.	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	9 Dokumen	9 dokumen			Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Penerimaan CPNSD sebanyak 230 orang dan PPPK sebanyak 550 orang sesuai dengan petunjuk

									<p>dan arahan Kepempan-RB dan BKN, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menganggarkan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga diminta untuk menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu diluar Belanja Pegawai.</p>
									<p>Tahun 2024 Pelaksanaan Penerimaan Formasi Guru hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme PPPK sebanyak 150</p>

									orang, sesuai petunjuk dari Kemenpan-RB dan BKN. Saat ini PBPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk formasi guru sebanyak 1.303 Orang.
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	148 Dokumen	157 Dokumen			
				Mutasi dan Promosi ASN	525 Dok	538 Dok			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	508 Dokumen			
				Pengelolaan Mutasi AS	5 Dokumen	5 Dokumen			Melakukan mutasi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, berdasarkan formasi/ lowongan kebutuhan yang tersedia dan sesuai kompetensi serta melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemerintah

									Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
				Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	25 Dokumen			Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi PPPK sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025, besaran TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
				Pengembangan Kompetensi ASN	2 Dok 243 Org	2 Dok 367 Org			
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	70 Orang	126 Orang			
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	11 Orang	11 Orang			

				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	87 Orang	148 Orang			
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	75 Orang	82 Orang			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dok 102 Org	4 Dok 192 Org			
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	100 Orang	190 Orang			
				Pembinaan Disiplin ASN	2 Orang	2 Orang			

Sumber : BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat

f. URUSAN PENGAWASAN

1. Urusan Pengawasan; Inspektorat

**Tabel 3.32.
Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Daerah	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100%			
			Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 232/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			

			Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024					
			Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 263/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
			Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 275/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
			Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tanggal 04 Juli 2024 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	32 Orang/bulan	terjadi pengurangan Asn pada Inspektorat Daerah dikarenakan ada yang pensiun	rekrutmen ASN di Tahun 2025 ada Penambahan 13 PNS dan 4 P3K
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	84%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	116 Paket	143 Paket			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134 Orang	67 Orang	Jadwal diklat bersamaan dengan jadwal pemeriksaan	melakukan perekrutan ASN ke Inspektorat Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	8 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54 Paket	54 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 Paket	13 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	8 Unit			

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	101 Unit			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	5 Unit	dikamakan terjadinya perpindahan ke gedung bbangunan baru yang fasilitasnya belum memadai	pemenuhan secepatnya fasilitas untuk penunjang kegiatan pengawasan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	66%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 Unit	24 Unit	2 (Dua) motor rusak berat	diperlukan penghapusan Aset tersebut	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit			

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63 Unit	34 Unit	Peralatan masih dalam kondisi prima	hanya perawatan yang memang dibutuhkan untuk dilakukan perawatan	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	80 %	80 %			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	193 LHP	333 Laporan			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 Laporan	63 Laporan			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	88 Laporan			
				Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	126 Laporan			
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	18 Laporan			
				Pengawasan Desa	65 Laporan	38 Laporan			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8 Laporan	8 Laporan			
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	13 Laporan			

	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100 %	100 %			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	100 %			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	505 Rekomendasi	567 Rekomendasi			
				Pendampingan dan Asistensi	100 %	100%			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	17 Kegiatan	25 Kegiatan			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	44 Perangkat Daerah			

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat

g. URUSAN KEWILAYAHAN

1. Kecamatan Bram Itam

Tabel 3.33.
Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	KEWILAYAHAN	KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	22 Orang			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	44 Paket			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Pakert	12 Pakert			

		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220 Laporan	220 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit			

		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,5 Mutu Layanan	77,63 Mutu Layanan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kali	3 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Kali	3 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

		KANTOR KELURAHAN BRAM ITAM KIRI		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas	10 Pokmas			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa			
		KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen			

Sumber : Kecamatan Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Kecamatan Kuala Betara

Tabel 3.34.
Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	16 orang/bulan	Masih ada Jabatan yang belum terisi, kurangnya ASN	Penambahan ASN terutama Staf untuk membantu para KASI	
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya	33 Paket	31 Paket	Adanya ASN yang memasuki Purna Tugas	Untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan	
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Paket	24 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,9 Mutu Layanan	83,01 Mutu Layanan			

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Kali	3 Kali			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	12 bulan			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN		Peningkatan Efektifitas Kegiatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		

		KUALA BETARA		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		KELURAHAN BETARA KIRI, KECAMATAN KUALA BETARA	- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 - Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Tidak Ada		
		KELURAHAN BETARA KIRI, KECAMATAN KUALA BETARA	Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	12 Pokmas	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Kecamatan Betara

Tabel 3.35.
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN BETARA		PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Administrasi Keuanga Perangkat Daerah					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	Telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2024		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BETARA		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-			
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	Tidak Ada		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BETARA		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BETARA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BETARA		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
		KANTOR KECAMATAN BETARA	- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 '- Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/K ota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Paket	3 Paket	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BETARA	Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/K ota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	15 Pokmas			
		KANTOR KECAMATAN BETARA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Faasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
		KANTOR KECAMATAN BETARA		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Kecamatan Pengabuan

Tabel 3.36.
Kecamatan Pengabuan
Kabupaten Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEWILAYAHAN	KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	13 Orang	Adanya mutasi pegawai sehingga realisasi gaji tidak terealisasi 100% dan adanya	Melaksanakan Infentarisir Jumlah Pegawai di Kecamatan Pengabuan dan	

							kekosongan jabatan di Kecamatan dan Kelurahan	melaksanakan pelaporan adanya kekosongan jabatan	
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	29 Stel	29 Stel			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15 Paket			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			

		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pengadaan Mebeler	22 Unit	22 Unit			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit			

		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan			

				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37 Pokmas	37 Pokmas			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN PENGABUAN		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen			

Sumber : Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Kecamatan Senyerang

Tabel 3.37.
Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN SENYERANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Pejabatnya tidak terpenuhi		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	21 stell PDH	21 stell PDH		
					6 Stell Pakaian Olah Raga	6 Stell Pakaian Olah Raga		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 lembar Materai	83 lembar Materai		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				

				Urusan Pemerintah Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	6 unit	2 Unit Rusak Berat dan Satu Rusak Ringan	Di usulkan Lelang ke BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	8 unit				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
			Mempermudah Pendataan Penerima Bantuan Sosial serta monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9 Desa / 1 kelurahan	9 Desa / 1 kelurahan				
			Membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa / 1 Kelurahan	9 Desa / 1 Kelurahan				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						

			Pemerataan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Kegiatan Belanja Modal Jalan	4 Kegiatan Belanja Modal Jalan	Dana APBD		
					Desktop All in One	Desktop All in One	Dana BKBK Kelurahan		
					Printer	Printer	Dana BKBK Kelurahan		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Orang RT di Kel. Senyerang Honorarium 12 Bulan	19 Orang RT di Kel. Senyerang Honorarium 12 Bulan			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Desa / 1 Kelurahan	9 Desa / 1 Kelurahan			

Sumber : Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Kecamatan Seberang Kota

Tabel 3.38.
Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN SEBERANG KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	14 laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Saldo gaji pada akhir tahun selalu besar	Saldo gaji yang selalu besar tiap tahunnya diharapkan dapat memenuhi jumlah PNS Terutama Pada jabatan yang masih kosong	

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	38 paket	38 paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 pompong lama sudah diajukan lelang (belum dapat terhapus dari daftar aset), 1	untuk pengadaan pompong baru sebaiknya menunggu Pompong lama terhapus dulu dari	

							pompong lagi tahun pembuatan 2020 juga mengalami rusak berat,	daftar aset	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	14 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 unit	4 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN					

				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	Pada Tahun 2024 Triwulan III Kecamatan Seberang Kota ditunjuk oleh Dinas P3AP2KB untuk meresmikan Sekolah Lansia "Selatang", Sekolah Lansia Tangguh, diharapkan pada Tahun 2025 ada pembiayaan pada kegiatan ini	Dapat menginput kegiatan Sekolah Lansia ini pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

							melalui sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Keg. Pemberdayaan Masy. di wilayah Kecamatan.		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Dana BKBK Provinsi Jambi tidak terlaksana di Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun 2024, dikarenakan Dana ini baru bisa direalisasikan pada akhir tahun 2024, sehingga Kecamatan dan Kelurahan Ragu untuk melaksanakannya	Sebaiknya Dana BKBK direalisasikan pada Anggaran Murni pada tahun 2025	
				Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit	2 unit			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Orang	10 orang			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Koordinasi Penyelenggaraan					

				Ketentraman dan Ketertiban Umum					
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan			
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Desa/1 Kel	7 Desa/1 Kel	Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi ataupun pelatihan di Dinas, terkait Peraturan,Permen dagri,Permendes, Perbup dan sebagainya didalam mengelola Keuangan Desa, Dana Desa,ADD ,Aset Desa, Bumdes dan lainnya masih	Adanya Keseriusan bagi Perangkat Desa yang sudah mengikuti Sosialisasi, pelatihan, dan menjadi catatan serta evaluasi terhadap segala bentuk pelaporan yang mengacu pada Peraturan,Permendagri ,Permendes,Perbup dan sebagainya, pelaporan dari perangkat Desa tidak hanya dilaporkan ke Dinas terkait saja,tetapi	

							belum optimal	juga disampaikan kepada Kecamatan	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Desa/1 Kel	7 Desa/1 Kel	Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi ataupun pelatihan di Dinas, terkait Peraturan,Permen dagri,Permendes, Perbup dan sebagainya didalam mengelola Keuangan Desa, Dana Desa,ADD ,Aset Desa, Bumdes dan lainnya masih belum optimal	Adanya Keseriusan bagi Perangkat Desa yang sudah mengikuti Sosialisasi, pelatihan, dan menjadi catatan serta evaluasi terhadap segala bentuk pelaporan yang mengacu pada Peraturan,Permendagri ,Permendes,Perbup dan sebagainya, pelaporan dari perangkat Desa tidak hanya dilaporkan ke Dinas terkait saja,tetapi juga disampaikan kepada Kecamatan	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-			

Sumber : Kecamatan Seberang Kota Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Kecamatan Tungkal Ilir

Tabel 3.39.
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	73%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	68 orang/bulan	Ada nya jabatan yang kosong dan ada ASN yg	Tetap di anggarkan di Tahun 2025	

							pensiun serta Mutasi		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Dokumen	19 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	168 stel	168 stel	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	20 Paket	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800 Paket	800 Paket	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	8 Paket	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	Tidak Ada		

		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 Unit	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	8 unit	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39 unit	39 unit	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 unit	32 unit	Tidak Ada		

		ILIR							
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 unit	9 unit	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,5 Mutu Layanan	82,96 Mutu Layanan			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Kali	3 Kali			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	12 bulan			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			

		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR	- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 - Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	32 Unit	32 Unit	Tidak Ada		

			dan Kecamatan						
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR	Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167 Pokmas	167 Pokmas	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	80%			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen			
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
		KECAMATAN TUNGKAL ILIR		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	0	Kegiatan ini tidak di Kecamatan Tetapi di Pem otda dan di PMD	Tidak di Anggarkan lagi Tahun 2025	

Sumber : Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat

8. Kecamatan Merlung

Tabel 3.40.
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	KEWILAYAHAN	KANTOR KECAMATAN MERLUNG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			

		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	21 orang			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	60 Paket	60 Paket			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket			

		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	10 Unit			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	13 Unit			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74	74			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Urusan	1 Urusan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen			

		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	7 Unit	pemotongan dana BKBK dari provinsi sebesar 70%	Kordinasi dengan OPD terkait agar Dana BKBK bisa d disesuaikan di awal penganggaran	
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas	9 Pokmas			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6 Berita Acara	6 Berita Acara			

		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 laporan	3 laporan			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya	6 kali	6 kali			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa			
		KANTOR KECAMATAN MERLUNG		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 desa	10 desa			

Sumber : Kecamatan Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat

9. Kecamatan Tungkal Ulu

Tabel 3.41.
Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	14 orang/ bulan	Adanya ASN yang pensiun dan banyak jabatan di kecamatan yang kosong	Diperlukannya penambahan atau pemerataan ASN di kecamatan	
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	71 Paket	71 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 orang	1 orang	Waktu pelaksanaan bimtek/diklat tidak pas dengan kesiapan ASN untuk berangkat	Mencari bimtek/diklat dengan jadwal yang sesuai	
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN		Penyediaan Komponen	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		

		TUNGKAL ULU		Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN		Pengadaan Mebel	-	-	Tidak Ada		

		TUNGKAL ULU							
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	12 unit	12 unit	Tidak Ada		

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,90 Mutu Layanan	82,82 Mutu Layanan			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Kali	3 Kali			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

				kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait					
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 urusan	7 urusan			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Nonperizinan	2 laporan	-	Tidak terlaksana karena Perjanjian Kerja Sama dengan Ombudsman tidak jadi dilakukan	Perlunya koordinasi lebih lanjut mengenai kerja sama terkait	
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Peningkatan Efektifitas Kegiatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		

				Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		KELURAHAN TUNGKAL ULU, KECAMATAN TUNGKAL ULU	1) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 2) Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	2 Unit	- Pembangunan di RT 08 tidak terlaksana karena tidak mendapatkan hibah tanah - Terjadinya perubahan cuaca yang tidak terduga di lokasi sehingga tanah menjadi becek dan tidak bisa dilakukan pengerjaan	Segera mencari solusi lain yang bisa diambil, misalnya dengan mengajukan perubahan lokasi dengan pagu yang sama.	

		KELURAHAN TUNGKAL ULU, KECAMATAN TUNGKAL ULU	Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/K ota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	12 Pokmas	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		POGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6	6			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7 kali	7 kali			
		KANTOR KECAMATAN		Sinergitas Dengan	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		

		TUNGKAL ULU		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi vertikal Terkait Di wilayah Kecamatan					
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa			
		KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat

10. Kecamatan Muara Papalik

Tabel 3.42.
Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
1	KEWILAYAHAN	KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	tidak ada		

		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	70 Paket	70 Paket	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	30 Paket	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	4 unit	Dikarenakan adanya selisih harga di toko	kedepannya harus di koordinasikan	

							denga SSH yang di input.	harga di toko-toko Elektronik.	
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Laporan	12 bulan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya					
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,5 Mutu Layanan	70,5 Mutu Layanan			

		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN MUARA PAPALIK)	2 Laporan	2 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34 urusan	34 urusan			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK	Meningkatkan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (KECAMATAN MUARA PAPALIK)	2 Laporan		Layanan non Perizinan Kecamatan Seperti Pengurusan Ktp, KK, Akte dan Lainnya Dilaksanakan oleh Dinas Capil, tidak lagi dilaksanakan oleh Kecamatan.	Kegiatan ini tidak dimasukkan lagi dalam renja kecamatan Tahun 2025 dan 2026 dst.	
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			

		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK	Memperudah Pendataan Penerima Bantuan Sosial serta monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK	Membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK	Pemerataan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	2 Unit	Penyerapan Dana BKBK baru dilaksanakan setelah APBDP bulan November (waktu pelaksanaan terlalu mepet) meyebabkan rendahnya persentase	Kabag Pemerintahan dan BKAD agar membantu pelaporan ke Kabag Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga BKBK Prov. Jambi bisa dilaksanakan di APBD Murni atau dari awal	

							realisasi pelaksanaan	tahun	
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas	20 Pokmas/Ormas	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6	6			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan	6 Laporan			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	tidak ada		
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa			
		KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	tidak ada		

Sumber : Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat

11. Kecamatan Tebing Tinggi

Tabel 3.43.
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	11 orang/bulan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	22 Paket	22 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Paket	24 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pengadaan Mebel	-	-	-		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	4 unit	1 unit	Tidak Ada		

				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,90 Mutu Layanan	86,48 Mutu Layanan			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Kali	3 Kali			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	12 bulan			
		KANTOR KECAMATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		

		TEBING TINGGI		Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		KELURAHAN TEBING TINGGI, KECAMATAN TEBING TINGGI	- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 '- Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	3 Unit	Penyerapan Dana BKBK baru dilaksanakan setelah APBDP bulan November (waktu pelaksanaan terlalu mepet)	Kabag Pemerintahan dan BKAD agar membantu pelaporan ke Kabag Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga BKBK Prov. Jambi bisa	

			Khusus ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan				meyebabkan rendahnya persentase realisasi pelaksanaan	dilaksanakan di APBD Murni atau dari awal tahun	
		KELURAHAN TEBING TINGGI, KECAMATAN TEBING TINGGI	Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas	39 Pokmas	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		POGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6	6			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi vertikal Terkait Di wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa			
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat

12. Kecamatan Renah Mendaluh

Tabel 3.44.
Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya	37 Paket	37 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pengadaan Mebel	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	12 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,90 Mutu	79,20 Mutu			

	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	11 Kali	11 Kali			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34 Urusan	34 Urusan			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Kali	11 Kali			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	Tidak Ada		

	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Program	5 Program			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas	17 Pokmas	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		POGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6	6			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6 Kali	6 Kali			
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi vertikal Terkait Di wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		
	KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa			
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat

13. Kecamatan Batang Asam

Tabel 3.45.
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya	55 Paket	37 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-		

		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pengadaan Mebel	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	12 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,90 Mutu Layanan	79,20 Mutu Layanan			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	11 Kali	11 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34 Urusan	34 Urusan			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Kali	11 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga Kemasyar Kemasyar	5 Lembaga Kemasyarak atan	Tidak Ada		

				Pembangunan Di Desa	akatan				
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Program	5 Program			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keliurtahan serta Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan, Perbup Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit	Penyerapan Dana BKBK baru dilaksanakan setelah APBDP bulan November (waktu pelaksanaan terlalu mepet) meyebabkan rendahnya persentase realisasi pelaksanaan	Kabag Pemerintahan dan BKAD agar membantu pelaporan ke Biro Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga BKBK Provinsi Jambi bisa dilaksanakan di APBD Murni atau dari awal tahun	

			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Ko tan Untuk Kelurahan dan Kecamatan.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM	Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Ko tan Untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas	17 Pokmas	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		POGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6	6			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6 Kali	6 Kali			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi vertikal Terkait Di wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa			
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada		

Sumber : Kecamatan Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat

h. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Urusan Pemerintahan Umum; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Tabel 3.46.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN *	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD*
I	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perda Kab. Tanjab Barat No 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	100%	-	-	
				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	-	-	
			Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : (4-49/2023)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	-	-	
			Perbup Kab. Tanjab Barat No. 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang			

			Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39 Tanggal 29 Desember 2023)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dok	6 Dok	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	2 Lap			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut perlengkapannya	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dok	6 Dok			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	6 Dok	6 Dok	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dok	24 Dok			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	6 Lap	-	-	

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			Dalam Rangka Meningkatkan Kehidupan Demokratis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perangkat Daerah terkait melakukan Kajian
				Pengadaan Aset Tetap lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	6 Lap	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 Lap	6 Lap	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Lap	6 Lap	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit			
				Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	6 Unit	6 Unit			

				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	Pemberian Bantuan Dana Bagi Partai Politik disesuaikan dengan Kondisi Kekinian dan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud 1. Melaksanakan Studi
			Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 170/Kep.Bup/ /Kesbangpol/2024	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	-	-	
			tentang Penyelenggara Pelatihan/TC Kegiatan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2024	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	-	-	

		<p>Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 190/Kep.Bup/ /Kesbangpol/ 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Rekrutmen Awal dan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jambi dan Tanjung Jabung Barat serta Kegiatan Training Centre dan Pengiriman Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024</p> <p>Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 267/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2021 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanjab Barat periode 2021-2024</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>200 Orang</p>	<p>200 Orang</p>		<p>Tiru tentang Tata cara Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan serta koordinasi mengenai percepatan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>2. Terkait kenaikan Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik bahwa usulan kenaikan di mulai dari Pengajuan anggota DPRD ke Kepala Daerah selanjutnya di Proses di Badan Kesbangpol dan Badan Kesbangpol membentuk Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai</p>
--	--	---	--	------------------	------------------	--	--

			Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 507/Kep.Bup/ /Kembangpol/2024 tentang Penyelenggara Pelatihan/TC Paskibraka Kegiatan Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dan Penyelenggara Kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2024	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Lap	4 Lap	-	-	Politik, selanjutnya Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai Politik bekerja dengan Tim TPAD dengan Syarat melihat kemampuan keuangan Daerah 3. Karena Kemampuan daerah masih belum mampu, maka nilai bantuan hibah keuangan kepada Partai Politik masih sama dengan tahun sebelumnya.
			Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 273/Kep.Bup/Kembangpo I/ 2024 Tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Kab. Tanjab Barat TA 2024	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	-	-	

			Keputusan Bupati Tanjab Barat No 241/Kep.Bup/Kesbangpo I/ 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kab.Tanjab Barat Untuk Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2024	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	-	-	
			Keputusan Bupati Tanjab Barat No 239/Kep.Bup/ Kesbangpol/2024 tentang Tim Pemantauan Perkembangsan Politik Daerah Kab. Tanjab Barat TA 2024	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	650 Orang	650 Orang	-	-	
				Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / Pemilihan Umum Kepala Daraeh , serta	30 Orang	30 Orang			

				pemantauan situasi politik di daerah					
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	4 Lap	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	-	-	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	-	-	
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	100 Org	100 Org			

				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	4 Lap	4 Lap	-	-	
			Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 651/Kep.Bup/Kesbangpo I/2023 tentang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	-	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No/348/Kep.Bup/Kesbangpo I/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Kab. Tanjab Barat periode tahun 2021-2026	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	-	-	
			Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 258/Kep.Bup/Kesbangpo I/2024 Tentang Pemberian Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanjab Barat TA 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	455 Org	455 Org	-	-	

			Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 418/Kep.Bup/Kesbangpo I/2024 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika TA 2024	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Lap	4 Lap			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	-	-	
			Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 249/Kep.Bup/Kesbangpo I/2024 tentang Tim Koordinasi Pemantauan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	-	-	
			Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelijen, pemantauan orang asing , tenaga kerja asing dan lembaga, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta	300 Org	300 Org	-	-	

				penanganan konflik di daerah					
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	4 Lap	-	-	
			Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 203/Kep.Bup/ Kesbangpol /2024 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Tanjab Barat	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	10 Dok			

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran Ditahun 2024 ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang melakukan kebijakan strategis didasarkan keputusan kepala daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati atau Surat Edaran dan Instruksi Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dari kebijakan strategis ini, gambaran terkait hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.3.47 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
DINAS KESEHATAN			
1.	Jaminan Kesehatan Nasional	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 461/Kep.Bup/Dinkes 2024 Tentang Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk dalam rangka Iniversal Health Coverage di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Memeberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk kabupaten tanjung jabung barat
DINAS PEKERJAAN UMUM			
2.	Terjaminnya layanan pengolahan Air Limbah domestik bagi masyarakat	Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis Standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesehatan masyarakat • Mencegah stunting • Tersedianya air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari
	Tersedianya Air bersih yang layak bagi kebutuhan masyarakat.		
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
3.	Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71/KEP.BUP/PERAKIM/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanjung	- Percepatan Penanganan Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat

		<p>Jabung Barat (pergantian atas Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 438/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat).</p> <p>2. Perda Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman</p> <p>3. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 455/Kep.Bup/BAPPEDA/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.</p> <p>5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</p> <p>6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak huni</p>	- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
4.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Menjaga dan meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman serta kenyamanan masyarakat
	Menguatkan peran petugas perlindungan masyarakat	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah
	Meningkatkan pelayanan social masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP	Meningkatkan Pemberantasan penyakit Masyarakat
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan SatPol PP	Meningkatkan Tugas dan fungsi serta pembinaan terhadap Perlindungan Masyarakat
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja	

		Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota	
		Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
5.	Meningkatkan penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal -Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota - Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Meningkatkan Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA			
	Tatananan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku	Peraturan kepala bnpb nomor 8tahun 2011 tentang standarisasi data kebencanaan	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib dan rukun antar umat beragam , lapisan masyarakat dan kelompok
6.	Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 8 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten tanjung jabung barat (lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2013 nomor 3, tambahan lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2013 nomor 5); jo peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 8 tahun 2012.pembentukan dan susunan perangkat daerah (bab.vi ketetntuan peralihan pasal 13 ayat 2 nomenklatur badan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 8 tahun 2012	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat seryta perlindungan masayrakat

	Mengikutsertakan sdm bimbingan teknis dan pelatihan pelatihan penanggulangan bencana	Peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukandan susunan perangkat daerah (bab.vi ketetntuan peralihan pasal 13 ayat 2 nomenklatur badan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 8 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana dan kebakaran diubah menjadi badan penanggulangan bencana kabupaten tanjung jabung barat	Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah
	Mengembangkan sdm berbasis kompetensi	Peraturan kepala bnpb nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana kabupaten (jitupasna)	Terwujudnya desa siaga bencana
	Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan	Peraturan kepala bnpb nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
	Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah beresiko rawan bencana	Peraturan kepala bnpb nomor 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana
	Penerbitan sk bupati, tim koordinasi penanggulangan bencana tingkat kabupaten	Peraturan kepala bnpb nomor 3 tahun 2010 tentang rencana nasional penanggulangan bencana	Meningkatnya sarana dan prasaran pendukung
	Penanggulangan bencana yang terencana, terarah , terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel	Peraturan kepala bnpb nomor 5 tahun 2010 tentang rencana aksi nasional penanggulangan resiko bencana	Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana serta meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
DINAS TENAGA KERJA			
7.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya pekerja rentan yang bekerja pada sektor-sektor pekerjaan informal.
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal

	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.	Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	
	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Instruksi Presiden	Inpres Nomor 9 Tahun 2000.	Peningkatan KKG dengan fokus pada Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 3 Tahun 2018	Perlindungan Perempuan dan Anak
	SK Bupati	Keputusan Bupati Nomor 171/Kep-Bup/DP3AP2KB/2024	Perlindungan Perempuan
	PERDA Tanjung Jabung Barat	Perda No 11 Tahun 2018	Kabupaten Layak Anak
8.	SK Bupati	Keputusan Bupati Nomor 527/Kep.Bup/DP3AP2KB	Koordinator Penggunaan DAK BOKB Kab.Tanjung Jabung Barat
	SK Bupati	Keputusan Bupati Nomor 289/Kep.Bup/DP3AP2KB/2024	Tim Audit Kasus Stunting
	SK Bupati	Keputusan Bupati Nomor 84/Kep.Bup/BAPPEDA/2022	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	SK Bupati	Keputusan Bupati Nomor 582/Kep.Bup/DP3AP2KB/2024	Pembentukan Tim Perumus Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Tanjung Jabung Barat
DINAS KETAHANAN PANGAN			
9.	Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah

	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2024
	Kegiatan Gerakan Pangan Murah tahun 2024	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 05/TS.02.02/K.I/2024 tentang Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024 Melalui Gerakan Pangan Murah	Meningkatkan keterjangkauan & daya beli pangan pokok bagi masyarakat sekitar lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
	Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan oleh Pemerintah Daerah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
10	Meningkatkan pengelolaan sampah dan kebersihan di kabupaten tanjung jabung barat	Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir terkelola dengan baik dan efisien
		Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	
		Peraturan presiden republik indonesia nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	
		Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor p.10/menlhk/setjen/plb.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan data strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga	
		Peraturan bupati tanjung jabung barat nomor 56 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten tanjung jabung barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	
		Perpres no.. 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM bersubsidi di indonesia	
	Menjaga kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kualitas lingkungan dan sumber daya alam terjaga secara kualitas
	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		

Menyusun kajian lingkungan untuk mendukung menataan lingkungan di tanjung jabung barat	Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.	Tersedianya koridor pengelolaan lingkungan dalam program pembangunan daerah jangka panjang dan jangka pendek
	Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	
	Permenlhk nomor 67 tahun 2017 tentang pelaksanaan pp 46 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	
	Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan klhs dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah	
1. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan non limbah bahan berbahaya dan beracun serta meminimalisir pencemaran lingkungan 2. Perlakuan pengelolaan non limbah bahan berbahaya dan beracun yang setara dengan limbah bahan berbahaya dan beracun hasil uji karakteristik laboratorium lingkungan	Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 102, 59, 103, 104, 60.	Terjaganya lingkungan dari potensi dan bahaya pencemaran bahan berbahaya beracun dan berbahaya
	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
	Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	
	Keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.	
	Keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 29 tahun 2003 tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada perkebunan kelapa sawit.	
Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup	Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kualitas lingkungan dan sda terjaga dengan upaya pelaku usaha yang beroperasi sesuai peraturan yang berlaku
	Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

		Permenlhk nomor 22/menlhk/setjen/set 1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan hutan	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
11	Surat Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati
DINAS PERHUBUNGAN			
12	<p>Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.</p> <p>Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan • pp Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan • PP Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan • Permenhub Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan • Permenhub Nomor 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang angkutan Penyeberangan • Permenhub Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal angkutan Penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C dan Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Perhubungan • Terciptanya Tertib Laik Angkutan Lalu Lintas Pada Hari Biasa, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah • Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut • Meningkatkan PAD Pada Sektor Perhubungan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
13	Jumlah Koperasi Aktif	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - Permenkop dan UKM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan	1. Pendataan Koperasi 2. Pembinaan terhadap koperasi aktif
	Jumlah UMKM Berkelanjutan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Menumbuhkan dan Pengembangan UKM dalam Rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demografi ekonomi yang berkeadilan
	Bantuan modal UMKM	Keputusan Kepala Dinas No. 500.3.10.2/62/ Diskopperindag/2024 tentang Penerima Hibah Berupa Barang Pada Diskopperindag	Melalui program Dumisake telah diberikan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebanyak 8 kelompok
	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemberdayaan kemandirian dan kewirausahaan UKM

Pembinaan Kelompok IKM	<ul style="list-style-type: none"> • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN • Permenperin nomor 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Ovop • Permenperin Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Pembinaan IKM diharapkan Adanya Perkembangan IKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat • Adanya Kegiatan Bimtek Dan Pelatihan Bagi Wirausaha Baru Dan Lanjutan Untuk Menumbuhkan Industri Baru Serta Meningkatkan Keahlian SDM IKM • Menfasilitasi ikm memperoleh bantuan mesin dan peralatan guna meningkatkan produktifitas industri
Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk IKM	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	1. Promosi Dan Pemasaran Produk Melalui Pameran Kerajinan Dan Produk, Ikm Baik Di Tingkat Daerah Maupun Nasional
	2. Keppres Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	2. Pemberian Sovenir
Fasilitasi IKM memperoleh NIB, PIRT, Halal dan HAKI	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	1. Dengan Adanya Fasilitasi Nib, Pirt, Dan Halal Bagi Produk Ikm Maka Kualitas Produk Dapat Terjamin Dan Pemasaran Produk Dapat Dipasarkan Secara Luas
	2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Design Produk	2. Dengan adanya Fasilitasi perolehan HAKI baik merk maupun Design sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga hasil karya serta nilai ekonomis yang terkandung didalamnya dan juga untuk mengantisipasi adanya pelanggaran Hak atas kenyataan intelektual orang lain
	3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
	4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
Nilai Ekspor Agro Industri	- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Disebutkan bahwa salah satu tugas dari bidang perdagangan luar negeri adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan ekspor diharapkan hasil dari pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekspor didapat nilai ekspor riil yang dilakukan pelaku ekspor di Kabupaten/Kota

	Persentase Pemasaran Produk Unggulan daerah ke Pasaran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	Tujuan : a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal; b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk unggulan. c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru; d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. f. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan PUD g. mendorong percepatan terbentuknya perda atau perbup PUD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)	Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Perlu adanya kontrol dan pendamping dari DPMPSTSP bagi pelaku usaha dalam proses perizinan dan non perizinan
14	Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permen PAN RB No 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan Permen PAN RB No 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Perbup No. 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya SDM DPMPSTSP sesuai dengan SOTK Meningkatnya kualitas maupun Kualitas dan Kuantitas SDM dan Kinerja Aparatur DPMPSTSP

	Memenuhi kebutuhan sarpras	1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mili Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Perpres No 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	1. Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang Program dan Kegiatan DPMPTSP 2. Terpenuhi sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik Kab. Tanjab Barat
	Meningkatnya koordinasi antar OPD teknis	Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan prima
	Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan	Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, gratis, bermutu, transparan, pasti, sederhana dan terjangkau
	Meningkatkan layanan promosi dan investasi	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal	Menciptakan iklim yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan
	Meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	Pelaku usaha terdampingi dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya dan terpenuhi kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan berusahanya
	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal	Menarik minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
15	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Daerah	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Mengoptimalkan peran perpustakaan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga kunjungan literasi meningkat yang berujung pada peningkatan kreatifitas dan mempersempit kesenjangan akses pengetahuan.

		Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	
		Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
	Meningkatkan jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengelolaan arsip sesuai dengan kaedah - kaedah kearsipan sebagaimana yang ditetapkan oleh ANRI.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
		PERDA Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	
DINAS PERIKANAN			
16	Melakukan Sosialisasi Tentang Modifikasi alat Tangkap	Permen KP No. 36 Tahun 2023 Tentang Penetapan alat Tangkap Ikan	Sosialisasi tentang alat Tangkap ramah Lingkungan
	Sosialisasi Penerapan Proses Perizinan Berusaha Perikanan	Permen KP No. 28 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur	Sosialisasi tentang Penangkapan Ikan yang berkelanjutan dan terukur
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
17	Meningkatnya daya Saing Pariwisata	Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat	Pengembangan Potensi Pariwisata: mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik itu pariwisata alam, budaya, maupun buatan, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional
			Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan : untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam. Dengan adanya rencana induk, diharapkan pengelolaan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek konservasi.

			Pengaturan Infrastruktur dan Fasilitas Pariwisata: untuk mengatur kebutuhan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata.
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Salah satu masalah yang diselesaikan adalah kurangnya keterampilan dan kapasitas SDM dalam mengelola industri pariwisata. Perda ini mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja di sektor pariwisata.
	Meningkatnya Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina	Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda: untuk meningkatkan kualitas SDM pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan yang relevan dengan tuntutan zaman. Pemuda yang terampil dan berpengetahuan akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
			Penguatan Karakter Pemuda : membentuk karakter pemuda yang kuat dan berintegritas. Dengan memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti, pemuda diharapkan memiliki sikap yang positif, tanggung jawab, dan mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
			Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Berorganisasi : untuk mendorong pemuda agar aktif dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Melalui organisasi, pemuda dapat mengembangkan kepemimpinan, keterampilan manajerial, dan kerjasama tim yang dapat bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka
	Peningkatan Prestasi di Bidang Olahraga	Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keolahragaan	Pengembangan Potensi Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat: untuk menggali dan mengembangkan potensi olahraga yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat, baik olahraga tradisional maupun modern. Tujuannya adalah menciptakan lebih banyak prestasi olahraga yang dapat mengharumkan nama daerah.
			Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga: Salah satu masalah yang diselesaikan adalah kurangnya fasilitas olahraga yang memadai. Perda ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat, baik untuk kegiatan rekreasi maupun kompetisi.

			Pengembangan Atlet dan Peningkatan Prestasi Olahraga: untuk menciptakan sistem yang dapat memfasilitasi pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dengan adanya rencana induk dalam keolahragaan, diharapkan atlet lokal dapat terlatih dengan baik dan mampu berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
			Penguatan Organisasi Keolahragaan: berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan ini mencakup penguatan struktur organisasi olahraga, termasuk federasi olahraga dan organisasi pemuda yang berfokus pada olahraga
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
18	Perluasan Areal Tanam Padi	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 567/Kep.Bup/DTPH/2024 tentang Penetapan Calon Kelompok Tani Penerima Hibah Berupa Barang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2024	Peningkatan Produksi Padi
	Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis Smart Greenhouse		Peningkatan Produksi Buah Melon
Dinas Peternakan dan Perkebunan			
19	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.	'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan	Memberikan dukungan dalam pengelolaan benih unggul perkebunan (pengawasan, penyediaan benih unggul melalui BPT) menjadi lebih optimal. Selain itu juga perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta penyediaan sarana dan prasarana pasca panen menjadi sesuai dengan standar minimum. Meningkatkan pelatihan kemampuan dan pengetahuan pekebun dalam upaya peningkatan produk kearah hilirisasasi produk perkebunan
	Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Mengevaluasi permasalahan dari konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat dan mencari penanganan serta langkah - langkah apa yang telah ditempuh untuk mendapatkan masukan dan apa penyebab terjadinya suatu kasus/konflik juga upaya - upaya untuk pencegahan dan

			penanganan berbagai kasus gangguan usaha perkebunan
	Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian	Permentan ini menjadi acuan bagi dinas kabupaten untuk melaksanakan pengawasan, pengadaan, peredaran dan pengguna Alsintan Pertanian sehingga tidak adanya alsintan yang mutunya tidak memenuhi standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi lokasi
	Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting	Percepatan peningkatan populasi melalui Upsus SIWAB dimaksudkan agar populasi sapi dan kerbau meningkat yang dilakukan dengan IB atau kawin alam dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi
SEKRETARIAT DAERAH			
20	Penyuluh Hukum Terpadu	SK NO 429/KEP.BUP/HUKUM/2024	Mewujudkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan bagi Masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan Kewajibannya sebagai warga negara dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
21	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
INSPEKTORAT			
22	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tah+B5+B5:B10:B8un Anggaran 2024	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 - PEDOMAN PENILAIAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) TAHUN 2024	upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 232/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah 	untuk mengetahui perkembangan dan kendala penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP
	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 263/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah 	untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 275/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	dalam rangka mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar tercipta suasana Pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme, dipandang perlu membentuk unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tanggal 04 Juli 2024 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di perangkat daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
23	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 508/Kep.Bup/Kesbangpol/2024 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah • Peraturan Gubernur Jambi no 129 Tahun 2007 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan Program Pembauran Kebangsaan Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kebangsaan Kab. Tanjung Jabung Barat 2024-2026	<p>Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Provinsi Jambi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Tanjab Barat No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kab. Tanjab Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan kebijakan di Bidang Pembauran kebangsaan
Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 273/Kep.Bup/Kesbangpol/2024 tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Kab.Tanjung Jabung Barat T.A 2024	<ul style="list-style-type: none"> UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kegiatan Pendidikan Politik dan operasional Sekretariat Partai Politik Peningkatan Demokrasi Meningkatkan indeks Partisipasi Politik
Keputusan Bupati Tanjab Barat No 241/Kep.Bup/Kesbangpol/2024 tentang pemberian Dana Hibag Bantuan Keuangan Partai Politik Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Masa Bakti 2019-2024 TA 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pelaksanaan koordinasi, Fasilitas dan Perumusan bahan Kebijakan terkait situasi Politik di daerah Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula
Keputusan Bupati Tanjab Barat No 151/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2011 Pedoman, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan Kebijakan terkait situasi Politik di daerah
Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 651/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 348/Kep.Bup/Kesbangpol/2021 tentang Forum Kerukunan Umta Beragama dan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan kebijakan di bidang kerukunan umat beragama

	Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 	
	Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 258/Kep.Bup/Kesbangpol/2024 tentang Pemberian Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanjab Barat TA 2024	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama
	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 204/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2023 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Pedoman Pemantauan Orang Asing di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan bahan Kebijakan di Bidang Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di Kab. Tanjab Barat
	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 418/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2024 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika TA 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Pemasyarakatan wawasan kebangsaan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan kebijakan terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 203/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Tanjung Jabung Barat	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi terkait dengan upaya penanganan dan penyelesaian konflik sosial

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023 telah disampaikan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dimana terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi, yaitu:

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
1.	Dikarenakan jumlah tenaga pendidik dari tahun ke tahun semakin berkurang salah satunya, banyak yang memasuki usia pensiun sehingga dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar disekolah. Dalam rangka mengatasi hal tersebut dapat dilakukan perekrutan guru melalui jalur penerimaan pppk sebagaimana yang telah dilakukan namun belum memenuhi target yang telah di tetapkan. Untuk itu pemerintah kabupaten segera melakukan percepatan perekrutan guru melalui jalur penerimaan pppk maupun pns secara transparan dan berkeadilan, mengutamakan guru yang selama ini telah mengabdikan dan berstatus guru tidak tetap (gtt) yang sudah terdaftar dalam dapodik.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuka jumlah formasi sesuai kebutuhan tenaga pendidik tanjung jabung barat namun pada pelaksanaannya banyak formasi yang disediakan tidak terisi oleh pelamar.	Dalam penyelesaian masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat akan membuka formasi tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu ketikamennghadiri rapat-rapat pembahasan pansus LKPJ sesuai jadwal yang telah	kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan siap apabila diperlukan mendampingi AKD pad asaat dibutuhkan konsultasi ke instansi terkait	Agar segala permasalahan segera di temukan solusi, dan untuk kedepannya segala kegiatan pembangunan berjalan lebih baik sehingga tujuan dan misi pembangunan tercapai.

	ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu kepada Kepala OPD agar memperhatikan hal diatas.		
DINAS TENAGA KERJA			
3.	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditujukan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada Bapak Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke Instansi terkait.	Bersedia hadir tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ bersama Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, dan bersedia mendampingi kegiatan konsultasi ke Instansi terkait	Pembahasan LKPJ bersama Pansus perlu dihadiri langsung oleh kepala OPD
DINAS KETAHANAN PANGAN			
4	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu diminta kepada kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada Saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke instansi terkait	Bersedia hadir lebih tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ bersama Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati	kegiatan Pembahasan LKPJ bersama Pansus dan OPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
5	Melakukan inovasi teknologi modern yang mampu menekan volume sampah di TPA, Serta melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dilevel rumah tangga.	Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi pengolahan sampah seperti mesin pencacah sampah organik di TPA. Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan kompos dari sampah organik.	Mengurangi volume sampah di TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memanfaatkan sampah organik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
DINAS PERHUBUNGAN			
6	Pasca beralihnya status kepemilikan aset Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dari Kementerian Perhubungan RI menjadi milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga beban pemeliharaan aset tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dikarenakan umur ekonomis pelabuhan Roro Mulai berkurang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan yang tidak sedikit dalam rangka mengembalikan fungsi pelabuhan agar optimal, sementara kontribusi terhadap PAD belum signifikan. Untuk itu kepada Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat segera mengambil langkah-langkah strategis menyikapi kondisi yang terjadi pada Pelabuhan RORO Kuala Tungkal saat ini, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait.	- Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan kajian manfaat terperinci dalam aspek pelayanan umum yang diharapkan berefek pada kemandirian dan kenyamanan pengguna jasa transportasi . - Membuat Rencana Usulan pengembangan maupun pemeliharaan pelabuhan melalui dana APBN/ Dana Alokasi Khusus Kementerian Perhubungan.	Efisiensi Manfaat Asas Pelayanan Pelabuhan
			Efisiensi Alokasi APBD melalui Pemanfaatan APBN/DAK.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			

7	<p>Anjloknya harga pinang sebagai komoditas utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat akibat situasi pasar global mengakibatkan penurunan secara drastic pendapatan perkapita penduduk (Petani) telah mempengaruhi kehidupan perekonomian di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Terkait hal tersebut Pemerintah harus melakukan terobosan dan Langkah-langkah inovatif yang strategis menyikapi hal tersebut.</p> <p>Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan Bersedia hadir lebih tepat waktu dan LKPJ bersama Pansus, yang ditujukan dengan mengikuti pembahasan LKPJ bersama ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat Pansus sesuai dengan jadwal yang telah pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati, bersedia telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk itu diminta mendampingi kegiatan dan Konsultasi ke kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada Instansi terkait rapat-rapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk ekspor pinang masih terkendala dengan mahalnya biaya transportasi menuju Pelabuhan, sementara Pelabuhan yang tersedia hanya ada di Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan yang ada di Surabaya, untuk itu Pemkab Tanjab Barat telah berusaha mencari Pelabuhan (dermaga) ekspor yang terdekat. 2. Pemkab Tanjung Jabung Barat Telah mencari Solusi yakni memanfaatkan produk turunan dari pinang tersebut agar dapat dimanfaatkan baik melalui pembinaan maupun pelatihan terhadap pengelolaan upih pinang menjadi wadah makanan, pembuatan permen pinang dan serbuk minuman dari pinang, 3. Dalam rangka meningkatkan Harga dan untuk menjaga kualitas pinang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah terbentuk satu Komunitas petani pinang yakni IG Pinang Betara. 4. Pemkab Tanjung Jabung Barat telah menghadiri Rapat Koordinasi Ekspor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan memohon fasilitasi Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat agar Harga komoditas Pinang Tanjung Jabung Barat bisa Kembali mahal ditingkat petani. <p>bersedia hadir lebih tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ Bersama pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, bersedia mendampingi kegiatan dan konsultasi keinstansi terkait.</p>	<p>Pemkab Tanjab Barat telah berusaha mencari Solusi agar harga Pinang Tanjung Jabung Barat bisa stabil dan naik Kembali ditingkat Petani.</p> <p>Pembahasan LKPJ bersama Pansus terkadang bersamaan dengan kegiatan / hal-hal lain yang perlu di hadir langsung oleh kepala OPD</p>
---	---	---	--

	<p>DPRD selanjutnya, diminta kepada saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke Instansi terkait.</p>		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
8	<p>Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahsan LKPJ bersama Pansus, yang ditujukan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak</p>	<p>Bersedia hadir lebih tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ bersama Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, bersedia mendampingi kegiatan dan Konsultasi ke Instansi terkait</p>	<p>Pembahasan LKPJ bersama Pansus terkadang bersamaan dengan kegiatan/ hal-hal lain yang perlu di hadir langsung oleh kepala OPD</p>

	meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke Instansi terkait.		
DINAS PERIKANAN			
9	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ Bersama Pansus, yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu diminta kepada kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat selanjutnya	Kepala OPD akan melakukan perbaikan dengan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan	Agar waktu yang telah ditetapkan dapat diikuti oleh seluruh kepala OPD sehingga waktu yang telah diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura			
10	Kurangnya keseriusan OPD dalam pembahasan LKPJ bersama PANSUS, yang ditujukan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan PANSUS LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar Kepala OPD tidak meninggali tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke instansi terkait	Bersedia hadir tepat waktu dan mengikuti rapat pembahasan LKPJ bersama PANSUS maupun rapat-rapat pembahasan lainnya dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati. Bersedia mendampingi kegiatan dan konsultasi ke instansi terkait	Pembahasan LKPJ bersama PANSUS terkadang bersamaan waktunya dengan kegiatan/hal-hal lain yang perlu dihadiri langsung oleh Kepala OPD
Dinas Peternakan dan Perkebunan			
11	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam Pembahasan LKPJ Bersama Pansus, yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu	Berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan memberikan pembinaan kepada seluruh Pejabat Eselon 3 untuk berpartisipasi aktif dan disiplin waktu dalam memenuhi undangan Rapat Paripurna DPRD sesuai arahan Pimpinan (Bupati)	Pembahasan LKPJ menjadi bahan evaluasi kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa hasil rekomendasi harus ditindaklanjuti sehingga penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun

	diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya. Diminta kepada Saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan Paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar Kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke instansi terkait		berjalan dan berikutnya menjadi lebih baik lagi.
Sekretariat Daerah			
12	Keberadaan BPR Tango Rajo diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kredit lunak guna pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). Oleh karena itu, manajemen PT. BPR Tango Rajo mesti melakukan terobosan dan berinovasi, yakni mengembangkan produk (terutama permodalan) yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat, membangun sistem perbankan yang profesional dan adaPTif dengan perubahan teknologi, sehingga akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat, serta peningkatan kualitas manajemen atau tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPR Tango Rajo	<p>PT. BPR Tango Rajo telah melakukan beberapa langkah dalam hal terobosan dan inovasi dalam membangun tingkat kepercayaan masyarakat yaitu dengan :</p> <p>a. BPR sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas IT melalui perubahan core banking system dari yang semula berbasis di Bukittinggi Padang Sumbar sekarang sudah berubah ke berbasis teknologi yang lebih baikdari sebelumnya di Bandung dimana saat ini masih tahap progres penyesuaian.</p> <p>b. BPR sedang melakukan peninjauan dengan beberapa vendor untuk mesin ATM, diharapkan kedepan apabila sistem dan keuangan BPR memadai serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh OJK, BPR akan berupaya untuk pengadaan ATM atau mobile banking.</p> <p>selanjutnya Pemerintah Daerah akan mendorong BPR untuk pengembangan inovasi dalam pembiayaan kepada UMKM</p>	Permasalahan telah ditindaklanjuti
	Terhadap adanya gugatan salah satu direktur pada PT. BPR Tango Rajo dan telah memiliki putusan hukum yang tetap (inkrah). Maka pemerintah kabupaten bersama dengan manajemen PT. BPR Tango Rajo segera menindaklanjuti dan melaksanakan putusan yang dimaksud dalam rangka menciptakan pemerintahan yang berwibawa dan taat hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPR Tango Rajo	Pemerintah Daerah bersama BPR telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan salah satu direktur, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian perdamaian pelaksanaan petusan kasasi MA RI nomor 4374 K/Pdt/2023 dimana para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan Pemerintah Daerah telah memenuhi dan membayar hak yang bersangkutan serta pemulihan kembali jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur sesuai dengan kesepakatan	Permasalahan telah ditindaklanjuti

	Terkait telah ditetapkannya manajemen bumd jabung barat sakti yang baru (definitif), diharapkan manajemen BUMD Jabung Barat dapat melakukan terobosan dalam pengembangan usaha dan memastikan bahwa bumd harus berkontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan daerah melalui deviden maupun sumbangsih lainnya. Oleh karena itu pemerintah harus konsen dalam pembinaan dan pengawasan	Terdapat peluang besar dalam pengembangan BUMD dan potensi deviden yaitu dengan pengelolaan PI 10% migas, namun berdasarkan ketentuan pengelolaan PI 10% dimaksud melalui BUMD Provinsi Jambi, terkait hal tersebut Pemerintah Daerah bersama JBS selalu intens melakukan koordinasi percepatan kepada Pemerintah dan BUMD Provinsi Jambi dalam rangka percepatan realisasi PI 10% dimaksud.	Permasalahan telah ditindaklanjuti
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
13	Anjloknya Harga Pinang Sebagai Komoditas Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Akibat Situasi Pasar Global Mengakibatkan Penurunan Secara Drastis Pendapatan Perkapita Penduduk (Petani) Telah Mempengaruhi Kehidupan Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terkait Hal tersebut, Pemerintah Harus Melakukan terobosan dan Langkah-langkah Inovatif Yang Strategis Menyikapi Hal tersebut.	Mengkoordinasikan, Memfasilitasi dan Menyampaikan ke Tingkat Provinsi dan Pusat Melalui Forum-forum dan Pertemuan Lainnya Mengkoordinasikan Dengan Pihak Swasta / Investor	Meningkatkan Pendapatan Petani (Masyarakat)
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
14	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapat-rapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya. Diminta kepada Saudara Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke instansi terkait.	Untuk kedepannya kami selaku Kepala OPD akan serius dan hadir tepat waktu pada rapat-rapat pembahasan dengan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama	Selanjutnya akan mempedomani jadwal / Kesepakatan yang telah ditetapkan

	<p>Sesuai dengan data pendapatan yang disampaikan terdapat beberapa target pendapatan dengan capaian realisasi terjadi ketimpangan yang cukup besar dan kurang realistis. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan belum dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang. Diharapkan ke depan dalam penetapan target pendapatan agar dilakukan dengan lebih realistis dan matang.</p>	<p>Terima kasih atas sarannya bapak dewan, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai realisasi kepada OPD terkait yang melakukan penetapan target, untuk kedepannya agar lebih terencana dan lebih matang dan lakukan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi pendapatan, penyesuaian dapat dilakukan dinamis sesuai dengan perkembangan situasi ekonomi dan regulasi.</p> <p>Terkait rencana target tidak sesuai penerimaan disebabkan dengan alokasi kurang bayar yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya akan disesuaikan dengan strategi pencapaian target yang lebih realistis.</p>	<p>Penting untuk melakukan evaluasi dan kajian mendalam sebelum menetapkan target pendapatan agar lebih realistis dan tercapai. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki perencanaan pendapatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Historis meninjau data pendapatan dari periode sebelumnya untuk mengidentifikasi trend dan pola. • Kajian Eksterna : Mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan mikro yang dapat mempengaruhi pendapatan • Pendekatan Partisipatif : Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif • Penetapan Target Bertahap : Membuat target yang dapat dicapai secara bertahap, bukan lompatan besar yang tidak realistis. • Monitoring dan Evaluasi : Secara rutin memantau realisasi pendapatan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. <p>Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berdasarkan data, diharapkan target pendapatan dapat lebih realistis dan mengurangi ketimpangan antara target dan realisasi.</p>
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
15	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara, menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas PNS dan PPPK yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama termasuk dalam pemberian tunjangan dan fasilitas dalam hal ini Tambahan Penghasilan Pegawai. untuk itu kiranya dilakukan pengkajian dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PPPK sebagaimana yang telah diterima PNS selama ini. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan motivasi kinerja</p>	<p>Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi PPPK sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025, besaran TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</p>	<p>Meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja bagi Pegawai</p> <p>Penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kompetensi dan sesuai Kebutuhan Organisasi sehingga dapat meningkatkan Kinerja, Produktivitas dan Prestasi Kerja serta dapat memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karir.</p>

<p>pegawai dimaksud.</p>		
<p>dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif di tiap-tiap perangkat daerah terkait mutasi pegawai ASN agar kepala BKPSDM selaku leading sektor Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat memberikan saran dan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku.</p>	<p>Melakukan mutasi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, berdasarkan formasi kebutuhan yang tersedia dan sesuai kompetensi serta melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Pegawai Non ASN yang tidak lulus seleksi CPNSD/ PPPK tahap 1 tetap bekerja seperti biasa, dan OPD tetap membuat perjanjian kerja. dan telah dianggarkan Gaji Non ASN tahun 2025 di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>
<p>salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sampai saat ini masih membutuhkan peran Pegawai Non ASN pada Tiap-tiap Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja antara Pegawai Non PNS dengan Kepala OPD, dalam rangka mewujudkan keadilan agar dilakukan pemberlakuan yang sama dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai Non PNS dimaksud untuk Tiap-tiap Perangkat Daerah.</p>	<p>Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Penerimaan CPNSD sebanyak 230 orang dan PPPK sebanyak 550 orang sesuai dengan petunjuk dan arahan Kepempan-RB dan BKN, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menganggarkan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga diminta untuk menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu diluar Belanja Pegawai.</p>	<p>Meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja bagi Pegawai</p>
<p>dikarenakan Jumlah Pendidik dari Tahun ke Tahun semakin berkurang salah satunya, banyak yang memasuki usia pensiun sehingga dapat mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar disekolah. Dalam rangka mengatasi hal tersebut dapat dilakukan perekrutan guru melalui jalur penerimaan PPPK sebagaimana yang telah dilakukan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. untuk itu pemerintah kabupaten segera melakukan percepatan perekrutan guru melalui jalur penerimaan PPPK maupun PNS secara transparan dan berkeadilan, mengutamakan guru yang selama ini telah mengabdikan dan berstatus guru tetap (GTT) yang telah terdaftar dalam Dapodik.</p>	<p>Tahun 2024 Pelaksanaan Penerimaan Formasi Guru hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme PPPK sebanyak 150 orang, sesuai petunjuk dari Kemenpan-RB dan BKN. Saat ini BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima PPPK untuk formasi guru sebanyak 1.303 Orang.</p>	<p>Berdasarkan pengumuman Setda Nomor: 800.1.2.2/1913/BKPSDM/2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 saat ini BKPSDM masih proses penerimaan PPPK tahap 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Non ASN Kab. Tanjab Barat yang (Tidak Lulus pendaftaran CPNSD/ PPPK tahap 1) 2. Non ASN yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun di Instansi Pemerintah. 3. PPG yang terdata pada Dapodik, karena pada formasi guru tahap 2 masih ada 92 formasi yang kosong

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

16	<p>Dalam Rangka Meningkatkan Kehidupan Demokratis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perangkat Daerah terkait melakukan Kajian Pemberian Bantuan Dana Bagi Partai Politik disesuaikan dengan Kondisi Kekinian dan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Studi Tiru tentang Tata cara Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan serta koordinasi mengenai percepatan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Terkait kenaikan Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik bahwa usulan kenaikan di mulai dari Pengajuan anggota DPRD ke Kepala Daerah selanjutnya di Proses di Badan Kesbangpol dan Badan Kesbangpol membentuk Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai Politik, selanjutnya Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai Politik bekerja dengan Tim TPAD dengan Syarat melihat kemampuan keuangan Daerah 3. Karena Kemampuan daerah masih belum mampu, maka nilai bantuan hibah keuangan kepada Partai Politik masih sama dengan tahun sebelumnya. 	<p>Terkait Penambahan nilai bantuan hibah keuangan Partai Parpol, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Barat membuat surat usulan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjung Jabung Barat membentuk Tim Kenaikan Bantuan Dana Hibah kepada Partai Politik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna untuk dilakukan Kajian selanjutnya</p>
----	---	--	---

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dalam Bab IV Sistematika Laporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, terdapat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang mana terdiri atas:

- a. Capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
- b. Capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

Adapun ditahun 2024, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, yakni:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024
Yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Kementerian	Dasar Pelaksanaan Tugas	Program/Kegiatan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kementerian Pertanian	Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 Nomor :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan							

		DIPA: SP: DIPA-018.08.4.109125/2024	Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (24 Unit)	Kec. Pengabuan (Mekar Jati, Pasar Senin, Teluk Nilau, Parit Sidang, Sungai Jering, Parit Bilal, Sungai Raya), Bram Itam (Pembengis), Senyerang (Kempas Jaya, Senyerang, Teluk Ketapang, Sungai Landak, Sei. Kepayang, Margo Rukun, Sungai Rambai)	2,707,200,000	2,707,200,000	100	24 Unit	100
				Irigasi Perpipaan (6 Unit)	Renah Mendaluh (Muara Danau), Batang Asam (Rawa Medang, Sri Agung)	564,000,000	564,000,000	100	6 Unit	100

			Kegiatan : Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Optimasi Lahan (2.197 Ha)	Bram Itam (Pembengis, Tanjung Senjulang, Mekar Tanjung, Batang Asam (Tanjung Bojo), Betara (Muntialo, Lubuk Terentang), Pengabuan (Mekar Jati, Parit Bilal, Parit Sidang, Sungai Pampang, Teluk Nilau, Serindit, Sungai Raya), Senyerang (Sungai Kayu Aro, Sungai Kepayang, Sungai Landak, Senyerang, Sungai Rambai, Teluk Ketapang, Margo Rukun, Seberang Kota (Harapan Jaya), Tungkal Ilir (Teluk Sialang, Sungai Nibung, Sriwijaya)	2,147,750,000	2,147,750,000	100	2.197 Ha	100
2	Kementerian Pertanian	DIPA.Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 018.03.4.109119/2024	Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							
			Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Bantuan Benih Padi Biofortifikasi (500 Ha)	Batang Asam (Rawa Medang, Sri Agung)	-	-	-	500 Ha	100

				Bantuan Benih Padi Inbrida (1.000 Ha)	Batang Asam (Rawa Medang, Sri Agung, Dusun Kebun, Tanjung Bojo), Pengabuan (Mekar Jati), Senyerang (Teluk Ketapang), Tebing Tinggi (Kelagian), Seberang Kota (Harapan Jaya), Betara (Lubuk Terentang), Tungkal Ilir (Sungai Nibung)	-	-	-	1.000 Ha	100
			Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	Bantuan Benih Jagung (500 Ha)	Batang Asam (Rawa Medang, Sri Agung), Tebing Tinggi (Purwodadi, Dataran Kempas), Merlung (Pinang Gading), Bram Itam (Pembengis, Bram Itam Raya, Semau, Mekar Tanjung, Kemuning), Muara Papalik (Intan Jaya)	-	-	-	500 Ha	100

				Bantuan Benih Padi Kegiatan Optimasi Lahan (1.907 Ha)	Bram Itam (Pembengis, Tanjung Senjulang, Mekar Tanjung Senjulang), Batang Asam (Tanjung Bojo), Betara (Muntialo), Pengabuan (Mekar Jati, Parit Bilal, Parit Sidang, Sungai Pampang, Pasar Senin, Teluk Nilau, Sungai Raya), Senyerang (Sungai Kayu Aro, Sungai Kepayang, Sungai Landak, Senyerang, Sungai Rambai, Kempas Jaya, Teluk Ketapang, Margo Rukun), Tungkal Ilir (Teluk Sialang, Sungai Nibung, Sriwijaya)	-	-	-	1.907 Ha	100
3	Kementerian Pertanian	Penetapan Pengguna Anggaran DTHP Provinsi Jambi Nomor KPTS-1847/DTPHP-5.2/VI/2024	Program Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian	Bantuan Traktor Roda Dua Singkal (1 Unit)	Kec. Senyerang (Sungsang)	-	-	100	1 Unit	100
		Penetapan Pengguna Anggaran DTHP Provinsi Jambi Nomor KPTS-1837/DTPHP-5.2/VI/2024	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Handspayer (10 Unit)	Kec. Pengabuan (Parit Pudir, Teluk Nilau, Sungai Jering, Sungai Raya, Sungai Serindit)	-	-	100	10 Unit	100
		Penetapan Pengguna Anggaran DTHP Provinsi Jambi Nomor KPTS-1846/DTPHP-5.2/VI/2024		Bantuan Cultivator (3 Unit)	Kec. Pengabuan (Parit Pudir), Kec. Bram Itam (Pembengis)	-	-	100	3 Unit	100
		Penetapan Pengguna Anggaran DTHP Provinsi Jambi Nomor KPTS-1841/DTPHP-5.2/VI/2024		Bantuan Power Thresher (3 Unit)	Kec. Pengabuan (Sungai Jering)	-	-	100	3 Unit	100

Hambatan/ Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan :

- Bantuan benih padi datang tidak sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan oleh kelompok tani
- Bantuan sarana produksi padi yang diberikan tidak dilengkapi dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida
- Tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan, disebabkan terbatasnya anggaran

Upaya Permasalahan :

- Bantuan benih sebaiknya dilengkapi dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida
- Spesifikasi bantuan sarana produksi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan
- Pendistribusian bantuan harus tepat waktu, sehingga bisa sesuai dengan jadwal tanam yang ditetapkan. Keterlambatan pendistribusian bantuan akan mengganggu jadwal tanam.

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PENUGASAN TAHUN 2024

No.	Kementerian	Dasar Pelaksanaan Tugas	Program/Kegiatan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kementerian Pertanian	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Program Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian							

	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani (4 Unit)	Kec. Betara (Desa Terjun Gajah, Desa Muntialo), Kec. Bram Itam (Desa Pembengis), Kec. Pengabuan (Kel. Teluk Nilau)	760,000,000	760,000,000	100	4 Unit	100
			Sarana Data dan Informasi BPP (2 Unit)	Tungkal Ilir (Kel. Patunas), Kuala Betara (Kel. Betara Kiri)	95,000,000	95,000,000	100	2 Unit	100
	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura (14 Unit)	Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Seberang Kota, Bram Itam, Pengabuan, Senyerang, Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam, Muara Papalik, Renah Mendaluh	6,650,000,000	5,697,600,000	85.7	12 Unit	85.7
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura (1 Unit)	Kec. Batang Asam (Desa Sri Agung)	142,500,000	142,500,000	100	1 Unit	100
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan (2 Unit)	Kec. Batang Asam (Desa Sri Agung, Desa Tanjung Bojo)	570,000,000	570,000,000	100	2 Unit	100

				Kegiatan Penunjang - Jasa Pendamping/Fasilitator Non ASN Kegiatan DAK Fisik Swakelola (42 OB)	Kec. Bram Itam (Desa Pembengis)	84,000,000	84,000,000	100	42 OB	100
				Kegiatan Penunjang - Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (1 Paket)	Kec. Bram Itam (Desa Pembengis)	105,600,000	99,955,500	94.7	1 Paket	100
				Kegiatan Penunjang - Perjalanan Dinas Ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengawasan, dan pengendalian (82 Frekuensi)	Kec. Bram Itam (Desa Pembengis)	106,166,000	106,166,000	100	82 Frekuensi	100
				Kegiatan Penunjang - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (6 Frekuensi)	Kec. Bram Itam (Desa Pembengis)	27,134,000	27,134,000	100	6 Frekuensi	100

				Kegiatan Penunjang - Jasa Konsultan Pengawas Untuk Kegiatan Kontraktual (42 OB)	Kec. Bram Itam (Desa Pembengis)	105,600,000	99,955,500	94.7	42 OB	100
--	--	--	--	---	---------------------------------	-------------	------------	------	-------	-----

2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN (SK)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KECAMATAN	LOKASI KELURAHAN/DESA	PAGU	REALISASI	VOLUME (UNIT)	
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: RU.1003-DR/1232 Tanggal 18 Oktober 2024 2023 tentang	kegiatan Bantuan Stiumulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1	Kecamatan Bram Itam	Pembengis	200,000,000	200,000,000	10
				2	Kecamatan Pengabuan	Parit Bilal	200,000,000	200,000,000	10
						Teluk Nilau	200,000,000	200,000,000	10
						Parit Sidang	1,200,000,000	1,200,000,000	60

		penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 Tahap XII		3	Kecamatan Seberang Kota	Harapan Jaya	200,000,000	200,000,000	10
						Muara Seberang	300,000,000	300,000,000	15
						Tungkal V	200,000,000	200,000,000	10
				4	Kecamatan Senyerang	Senyerang	200,000,000	200,000,000	10
						Teluk Ketapang	200,000,000	200,000,000	10
				5	Kecamatan Tungkal Ilir	Tungkal I	200,000,000	200,000,000	10
						Patunas	400,000,000	400,000,000	20
JUMLAH							3,500,000,000	3,500,000,000	175

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO	KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN (SK)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KECAMATAN		LOKASI KELURAHAN/DESA	PAGU	REALISASI	VOLUME (UNIT)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Bidang Perumahan	Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 459/KEP>BUP/DPUPR-7/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program DUMISAKE Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasn	Kegiatan Dua Milyar Satu Kecamatan (DUMISAKE)	1	Tungkal Ilir	Tungkal I	180,000,000	180,000,000	9
						Tungkal III	140,000,000	140,000,000	7
						Tungkal IV Kota	140,000,000	140,000,000	7
				2	Bram Itam	Semau	140,000,000	140,000,000	7
						Kemuning	140,000,000	140,000,000	7

		Permukiman dengan Luas 10 Ha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.		3	Betara	Mandala Jaya	140,000,000	140,000,000	7
							Makmur Jaya	140,000,000	140,000,000
JUMLAH							1,020,000,000	1,020,000,000	51

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Adapun hambatan atau permasalahan pada tugas pembantuan ini antara lain:

- a. Kondisi cuaca yang sering hujan menyulitkan percepatan pekerjaan di Lapangan .
- b. Kurangnya Informasi terkait siapa penerima bantuan dari kegiatan Dumisake ataupun BSPS sehingga terjadi *Double* Pencatatan ketika menganggarkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui anggaran APBD.

Adapun upaya penyelesaian permasalahan di lapangan adalah:

- a. Percepatan pekerjaan di lapangan untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor cuaca atau pasang surut air
- b. Berkoordinasi kembali ke Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Balai Perumahan terkait BNBA Penerima Bantuan.

3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1.	Pertanian	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-018.05.4.109120/2024 tanggal 24 Nopember 2024	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Pinang di Kab. Tanjung Jabung Barat 11 Ha	Desa Bunga Tanjung, Desa Mandala Jaya, Desa Sungai Terap Kec. Betara	42,825,000	42,645,000	99.58	11 ha	100
2.	Pertanian	DIPA BBPPTP Medan Tahun Anggaran 2024 dan Surat dari Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Nomor : B-48/KB.010/E.8/01/2024 tanggal 9 Januari 2024	Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam di Kab. Tanjung Jabung Barat 100 Ha	Peremajaan Kelapa Dalam seluas 100 Ha	Desa Karya Maju Kec. Pengabuan, Desa Tungkal II Kec. Tungkal Ilir, Desa Sungai Dungun Kec. Kuala Betara dan Kel. Senyerang Kec. Senyerang	-	-	-	100 ha	100

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Barat akhir tahun anggaran 2024 merupakan sebuah wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun isi yang tertuang dalam laporan ini adalah dasar hukum, visi dan misi Kepala Daerah, data umum daerah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara rutin maupun periodik selama satu tahun anggaran. Sedangkan dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian target dan sasaran yang dilaksanakan melalui Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan dari implementasi arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana telah disampaikan dalam BAB dan bahasan sebelumnya, maka beberapa hal yang perlu disampaikan kembali dalam bab ini antara lain:

1. Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki letak yang strategis yakni disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut China Selatan dimana merupakan segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura, Johor, Riau) dengan memiliki total luas wilayah 5.375,16 km² dengan luas daratan 5.009,82 km² dan luas lautan 365,34 km².
2. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya maka Pemeritah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berpegang pada komitmen sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).**
3. Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 sebanyak 336.978 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.66 persen.
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 sebanyak 3.266 orang yang terdiri dari 1.454 laki-laki dan 1.812 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, 69,01 persen PNS merupakan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana/Doktor/PHD. Dilihat dari jenis kelamin, PNS dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat

kebawah didominasi oleh laki-laki. Sedangkan PNS dengan tingkat pendidikan Diploma/Sarjana muda didominasi oleh perempuan.

5. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 meningkat mencapai 4,45 %. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,60%, kemudian diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 11,72%.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020 sebesar 69,62 hingga menjadi 72,01 pada tahun 2024.
7. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 10,29% menjadi 9,54 % pada tahun 2024.
8. Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 138.124.227.221,59 atau 116,37% dari target sebesar Rp. 118.692.650.003,00. Penerimaan dari Dana Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 1.871.370.786.390,00 atau 97,23 % dari target sebesar 1.924.609.610.848,00.
9. Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, yaitu :
 - 1) Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ada beberapa program yaitu:
 - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan, Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (24 Unit) dengan alokasi da realisasi anggaran sebesar 2,707,200,000 dan Irigasi Perpipaian (6 Unit) dengan alokasi da realisasi anggaran sebesar 564,000,000.
Kegiatan : Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan alokasi da realisasi anggaran sebesar 2,147,750,000
 - Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Bantuan Benih Padi Biofortifikasi (500 Ha) dan Bantuan Benih Padi Inbrida (1.000 Ha)
Kegiatan : Pengeloaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Berupa Bantuan Benih Padi Kegiatan Optimasi Lahan (1.907 Ha)
 - Program Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian, Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian berupa Bantuan Handspayer (10 Unit) Bantuan Cultivator (3 Unit), dan Bantuan Power Thresher (3 Unit).

- Dan untuk capaian kinerja pelaksanaan penugasan dari kementerian pertanian pada Program Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Pertanian, Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian.
- 2) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dengan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan pagu dan realisasi sebesar **Rp. 3,500,000,000**
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Bidang Perumahan dengan program Kegiatan Dua Milyar Satu Kecamatan (DUMISAKE) dengan pagu dan realisasi sebesar **Rp.1,020,000,000**.
- 3) Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat dana Tugas Pembantuan pada program Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan berupa Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Pinang di Kab. Tanjung Jabung Barat 11 Ha dengan alokasi anggaran sebesar 42,825,000 dan realisasi 42,645,000 dan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam di Kab. Tanjung Jabung Barat 100 Ha pada Desa Karya Maju Kec. Pengabuan, Desa Tungkal II Kec. Tungkal Ilir, Desa Sungai Dungun Kec. Kuala Betara dan Kel. Senyerang Kec. Senyerang.

Demikian LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat akhir tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai salah satu produk manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag